



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat ;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, perlu disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah.
4. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
6. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan pemerintah daerah.

BAB II STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

SPKD merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarnya.

Pasal 3

Sistematika SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Kondisi Umum Daerah
- BAB III : Profil Kemiskinan Daerah
- BAB IV : Determinan Kemiskinan Daerah

- BAB V : Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan
BAB VI : Tinjauan Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah
BAB VII : Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah
BAB VIII : Sistem Monitoring dan Evaluasi
BAB IX : Penutup

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

SPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal Peraturan Gubernur yang mengatur Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah belum diundangkan, maka penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada RPJPD dan mengacu pada RPJMN.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **30 Desember 2019**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **30 Desember 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttđ

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 60

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG
STRATEGI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi, dari tahun ke tahun menjadi isu global, nasional bahkan lokal sehingga perlu perhatian banyak pihak dan menjadi prioritas pembangunan. Kemiskinan tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keberdayaan dalam memenuhi hak-hak dasar, antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, dan lainnya.

Berbagai kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang diimplementasikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, telah menurunkan jumlah penduduk miskin, namun laju penurunan kemiskinan melambat. Di sisi lain kerentanan penduduk miskin masih sangat tinggi dan ketimpangan sulit diturunkan.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan antara lain : (a) terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial; (b) masih adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah; (c) akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar masih rendah, dan terdapat perbedaan akses antar kelompok pendapatan; (d) globalisasi yang berdampak pada gejolak ekonomi dan menimbulkan kerentanan di dalam masyarakat terutama masyarakat miskin; (e) meningkatnya kerentanan masyarakat miskin sebagai akibat dari perubahan iklim.

Kompleksitas kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, oleh karena itu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) diperlukan sebagai cara dalam mengurai persoalan yang kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep, menentukan masalah utama serta mempermudah pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan. Selain itu prioritas penanganan permasalahan di setiap daerah juga berbeda sesuai dengan kondisi daerah tersebut, menyangkut indikator kemiskinan dalam dimensi yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. SPKD diperlukan untuk memastikan indikator-indikator tersebut menjadi prioritas dalam rencana intervensi yang disusun oleh pemerintah daerah.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dan *stakeholder* untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama (*mainstreaming*) dalam penyusunan program kerja di daerah;
2. Mempertajam intervensi penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) terutama tujuan penanggulangan kemiskinan;

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

D. METODE DAN TAHAPAN PENYUSUNAN SPKD

Penyusunan dokumen SPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD dan Buku Panduan Penanggulangan Kemiskinan yang diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta memperhatikan hasil Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dokumen/kertas hasil diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan.

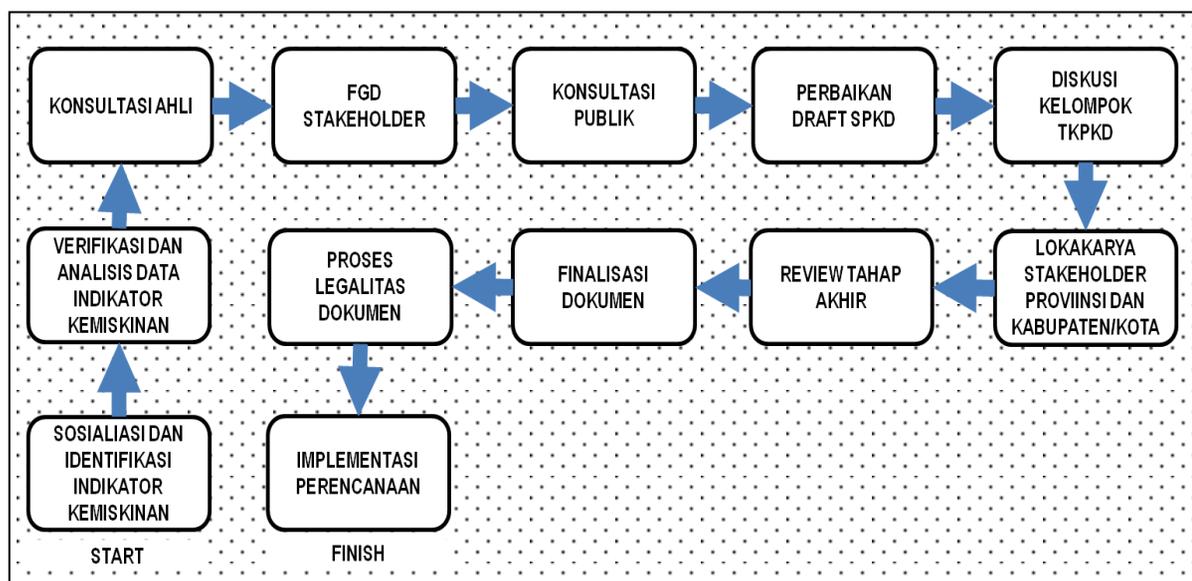
Penyusunan SPKD dilakukan untuk mempertajam dokumen RPJMD dengan metode :

1. Pendekatan substansi RKPD dan Renja Perangkat Daerah terkait penanggulangan kemiskinan. Fokus utamanya adalah bagaimana SPKD dapat mengisi, mempertajam dan memperkaya substansi dari setiap dokumen perencanaan dan penganggaran regular daerah dengan cara memastikan seluruh substansi dari setiap bagian dalam SPKD dapat mengisi dan mempertajam substansi terkait isu percepatan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

2. Pendekatan substansi terhadap tahapan dan tata cara penyusunan dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Fokus utamanya bagaimana substansi dari setiap bagian dalam SPKD dapat mengisi, memperkaya dan mempertajam tahapan dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan dan regular daerah (RKPD dan Renja Perangkat Daerah).

3. Pendekatan Prioritas Wilayah. Fokus utamanya adalah bagaimana SPKD dapat memetakan sasaran prioritas wilayah dan bentuk intervensi berdasarkan analisis indikator utama dan indikator pendukung.

Tahapan penyusunan SPKD dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan SPKD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2023

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode dan tahapan penyusunan SPKD, daftar istilah, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Kondisi Umum Jawa Tengah

Berisi uraian tentang luas dan batas wilayah administrasi, aspek geografi dan demografi, dan struktur dan pertumbuhan wilayah.

3. Bab III Profil Kemiskinan Jawa Tengah

Berisi uraian tentang konsep kemiskinan dan kondisi kemiskinan di Jawa Tengah.

4. Bab IV Determinan Kemiskinan Jawa Tengah

Berisi uraian tentang analisis akar masalah dan analisis prioritas wilayah intervensi.

5. Bab V Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan

Berisi uraian tentang gambaran umum anggaran daerah, analisis pendapatan daerah, dan analisis belanja daerah.

6. Bab VI Tinjauan Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah

Berisi uraian tentang tinjauan kebijakan, pemetaan dan analisis pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dan tinjauan kelembagaan.

7. Bab VII Isu Strategi dan Rencana Aksi,

Berisi uraian tentang Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah.

8. Bab VIII Sistem Monitoring dan Evaluasi,

berisi uraian tentang maksud dan tujuan, pelaksana, tolak ukur dan ruang lingkup, diagram alur monitoring dan evaluasi, dan tata kelola kelembagaan.

9. Bab IX Penutup.

BAB II KONDISI UMUM JAWA TENGAH

A. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

1. Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa, berada di dua titik pertumbuhan penting (Jakarta-Surabaya), dan pusat pariwisata DIY. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak di $5^{\circ}40'$ - $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}30'$ - $111^{\circ}30'$ Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa), dengan luas sebesar 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa atau 1,70% dari luas seluruh Wilayah Indonesia. Panjang garis pantai Jawa Tengah sebesar 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km.

Letak Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada sisi barat, Provinsi Jawa Timur pada sisi timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia pada wilayah selatan, serta Laut Jawa pada sisi utara. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, meliputi 573 kecamatan, 7.809 desa, dan 769 kelurahan.



Sumber : Peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI), BAKOSURTANAL Skala 1:25.000 Edisi Tahun 2000, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Posisi geostrategik dari Provinsi Jawa Tengah memiliki kedudukan cukup strategis antara lain:

- a. Terletak di tengah Pulau Jawa, berada di dua titik pertumbuhan penting (Jakarta-Surabaya) dan pusat pariwisata DIY;
- b. Termasuk dalam simpul transportasi utama nasional yang menghubungkan antar pusat-pusat pertumbuhan dan sebagai jalur

- distribusi barang dan jasa yang strategis di Pulau Jawa, serta sebagai pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- c. Memiliki potensi pertanian yang tersebar di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah, menjadikan Jawa Tengah memiliki kekuatan geo strategis sebagai basis utama politik pertanian nasional;
 - d. Menjadi pusat industri ramah lingkungan, pusat perdagangan jasa skala internasional, serta pusat pariwisata internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - e. Memiliki peran penting dalam keseimbangan lingkungan di wilayah provinsi sekitar sebagai satu kesatuan bio region Pulau Jawa.

Dengan memiliki letak strategis di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pemanfaatan lahan di bidang perdagangan dan jasa yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah di setiap Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kewilayahannya saat ini. Dikarenakan Provinsi Jawa Tengah menjadi penghubung utama antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Sinergitas antara pemerintah dan penduduk dalam menyukseskan perdagangan dan jasa dapat berpengaruh atau berdampak pada turunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

1.1. Topografi

Wilayah Provinsi Jawa Tengah secara topografi sekitar 53% berada pada ketinggian 0-99 m dpl, dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah beragam, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12% dari total wilayah.

1.2. Geologi

Secara geologis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi, yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal) dan Gunung Merbabu (di Kabupaten Semarang, Boyolali dan Magelang).

Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, serta gromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis

tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Potensi sumber daya mineral yang tersebar di Jawa Tengah meliputi 32 jenis mineral non logam (Phospat, Asbes, Talk, Mika, Leusite, Oker, Granit, Dasit, Diorit, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonite, Batuapung, Trass, Diatome, Marmer, Batugamping, Dolomit, Basal, Andesit, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, Kalsit, Zeolit, Sirtu, Batu Sabak, Toseki), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

1.3. Hidrologi

Jawa Tengah memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak, dengan 18 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas. DAS tersebut yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah, antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain.

Wilayah DAS selain merupakan wilayah subur, juga merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana. Sungai-sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas daerah pengaliran lebih dari 1.000 km² perlu diwaspadai karena daerah pengalirannya cukup luas dengan debit yang cukup besar, sehingga mengakibatkan wilayah di sekitarnya rawan banjir limpasan.

1.4. Klimatologi

Kondisi iklim Jawa Tengah termasuk kategori iklim tropis basah, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23°C–28°C dengan kelembaban udara berkisar antara 80%-88%. Pada tahun 2018, bulan dengan curah hujan tinggi di Jawa Tengah terjadi mulai Oktober – April, dengan jumlah curah hujan mulai 134 mm pada Bulan Oktober dan puncaknya mencapai 249 mm di Bulan Desember. Bulan-bulan kekeringan di Jawa Tengah (curah hujan kurang dari 50 mm) pada tahun 2018 terjadi selama 4 bulan dari Bulan Juni-September, dimana pada Bulan Juli dan Agustus tidak terjadi hujan sama sekali.

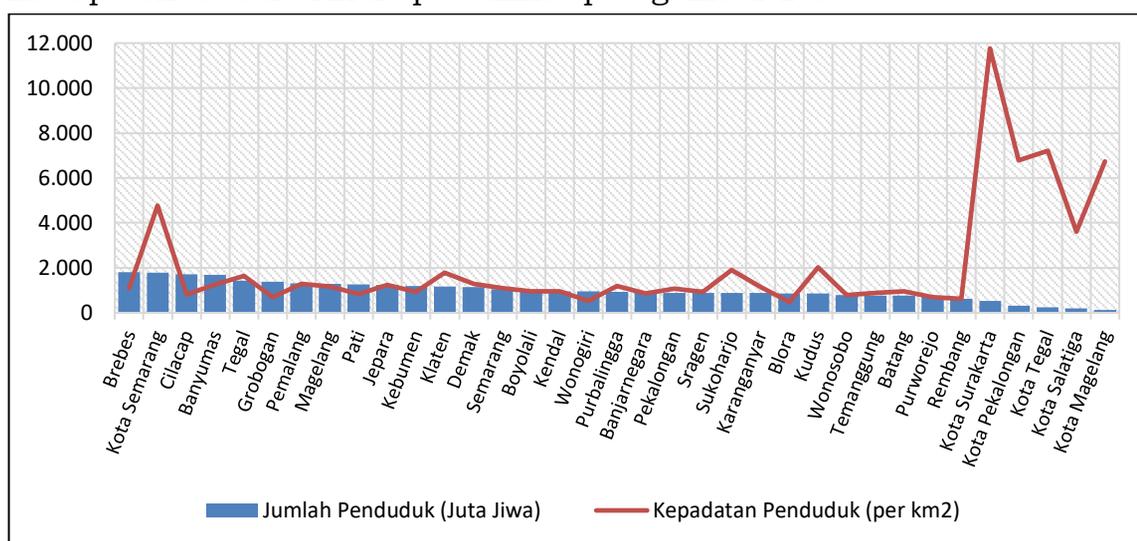
Namun demikian jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan di setiap daerah di Jawa Tengah berbeda-beda, hal ini akan berpengaruh terutama kepada usaha tani padi tadah hujan. Selain itu juga sangat berpengaruh pada kecukupan air bersih pada daerah-daerah yang mengandalkan sumber airnya dari ketersediaan air hujan.

1.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2014 sampai dengan 2016 menunjukkan terjadinya perubahan komposisi penggunaan lahan. Luas lahan sawah bertambah dari 990.652 hektar

Kota Magelang merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit sebanyak 121.872 jiwa atau 0,35%.

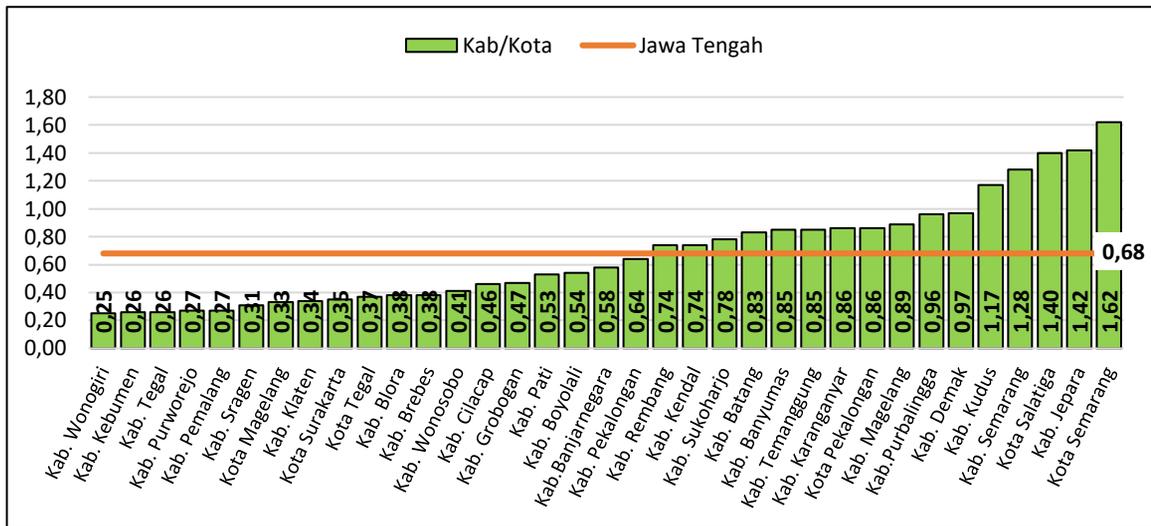
Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 mencapai 1.060 jiwa/km², mengalami kenaikan sebesar 9 jiwa/km² dibandingkan tahun 2017 sebesar 1.051 jiwa/km². Sebaran kepadatan penduduk di kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kota Surakarta menduduki peringkat pertama di Jawa Tengah sebesar 11.770 jiwa/km², kepadatan selanjutnya diikuti oleh Kota Tegal dan Kota Pekalongan dengan masing-masing kepadatan penduduk sekitar 7.324 jiwa/km² dan 6.766 jiwa/km². Sementara kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Blora (481 jiwa/km²), Kabupaten Wonogiri (525 jiwa/km²) dan Kabupaten Rembang (625 jiwa/km²). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah kota rata-rata memiliki kepadatan penduduk lebih besar dibandingkan wilayah kabupaten. Secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.3.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 2.3
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah (Juta Jiwa)
terhadap Kepadatan Penduduk (per km²) tahun 2018

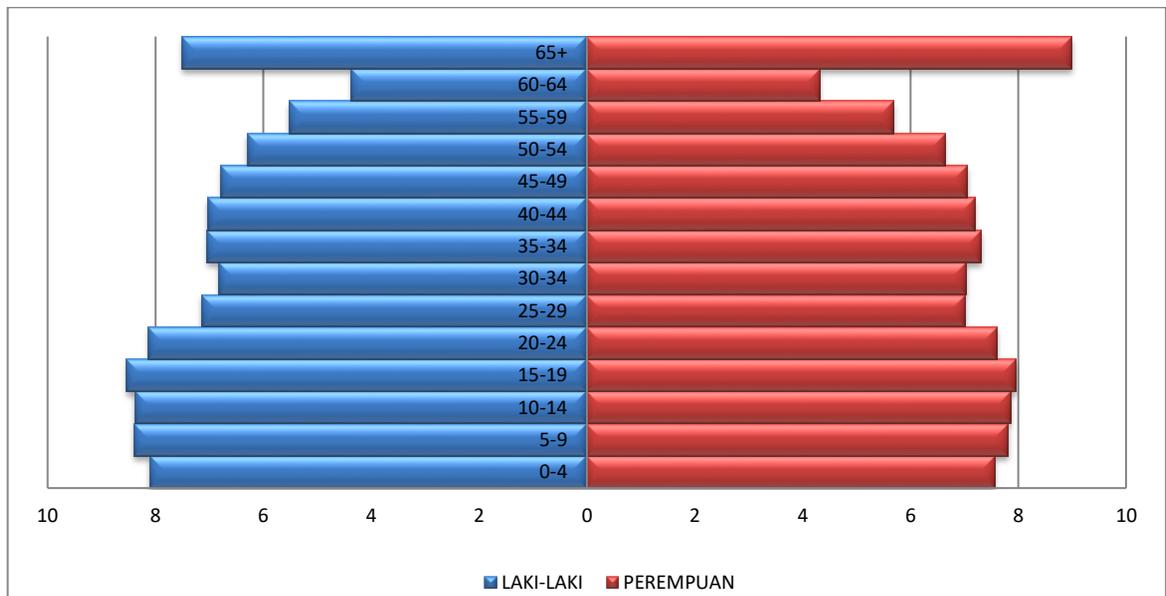
Jika dilihat berdasarkan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 0,68%. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tinggi yaitu Kota Semarang sebesar 1,62% diikuti oleh Kabupaten Jepara sebesar 1,42% dan Kota Salatiga sebesar 1,40% sedangkan yang rendah yaitu Kabupaten Wonogiri sebesar 0,25% diikuti Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Tegal masing-masing sebesar 0,26%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.4.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017 ke Tahun 2018 (%)

Dilihat dari struktur penduduk Jawa Tengah, penduduk kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 8.194.304 jiwa (23,76%), kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 23.363.185 jiwa (67,74%) dan kelompok umur 65 tahun ke atas sebanyak 2.933.346 jiwa (8,50%), sebagaimana gambar 2.5.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 2.5
Piramida Penduduk Jawa Tengah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Kondisi tersebut menggambarkan bonus demografi yang menunjukkan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia non produktif (65 tahun ke atas). Kondisi ini tidak terjadi secara terus menerus melainkan hanya terjadi sekali dan tidak bertahan lama.

Bonus demografi di Jawa Tengah mempunyai waktu peluang relatif lebih pendek dibanding dengan tingkat nasional maupun provinsi lain di pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Banten. Angka ketergantungan di Jawa Tengah telah mencapai di bawah 50 sejak tahun 2015 yaitu 48,1 dan diproyeksikan akan terus menurun

sampai dengan tahun 2020, dan kembali akan meningkat mulai tahun 2025. Sampai dengan tahun 2030, rasio ketergantungan Jawa Tengah diproyeksikan akan meningkat menuju angka 50. Artinya peluang bonus demografi Jawa Tengah hanya akan terjadi sampai dengan tahun 2020.

Apabila tidak dikelola dengan baik bonus demografi menjadi beban daerah dan lingkungan sekitar. Bonus demografi harus dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Pemanfaatan bonus demografi didukung oleh berbagai sektor/bidang serta lintas program antara lain kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja.

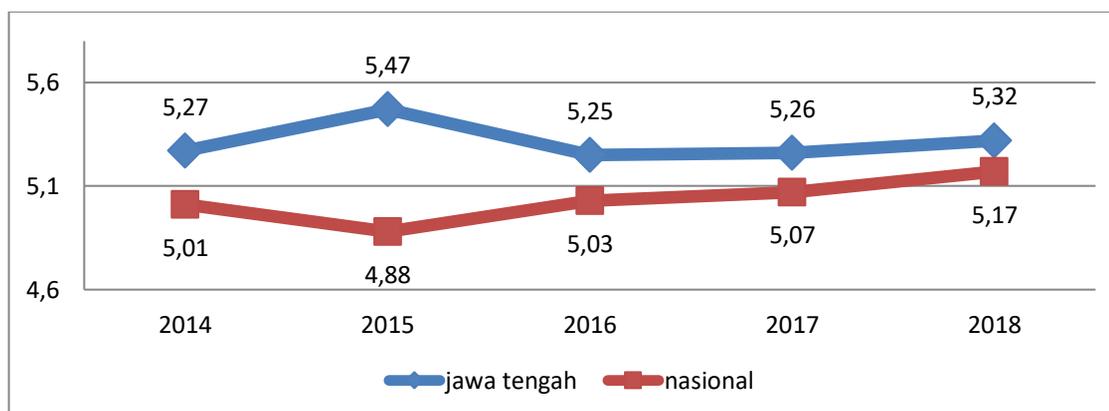
Dari sisi pelayanan kesehatan perlu diupayakan peningkatan derajat kesehatan untuk menurunkan angka kematian terutama ibu dan anak, serta meningkatkan usia harapan hidup. Dari sisi pendidikan perlu diupayakan peningkatan kompetensi dan daya saing penduduk melalui pendidikan formal, non formal, dan informal tanpa mengesampingkan kesetaraan gender. Dari sisi kesempatan kerja, perlu diupayakan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak atau kemudahan berwirausaha. Melalui pekerjaan yang layak memberikan peluang keluarga untuk meningkatkan penghasilnya sehingga terbebas dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Selain pemenuhan layanan dasar, ketahanan pangan perlu diwujudkan melalui sistem logistik daerah yang menjamin ketersediaan terutama stok pangan yang ada di masyarakat, memperpendek rantai distribusi, serta adanya pengelolaan stok melalui cadangan pangan dan stabilisasi harga, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar.

B. STRUKTUR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH

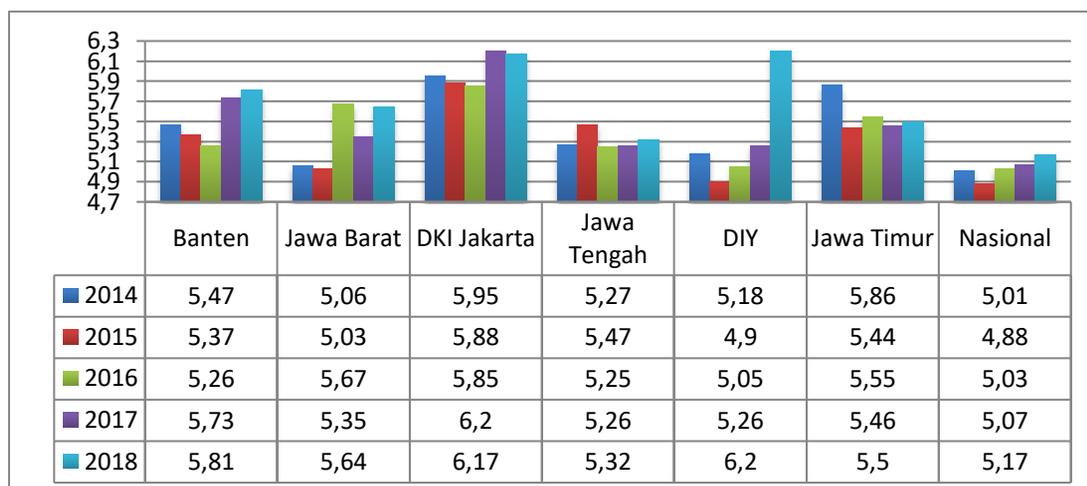
1. Pertumbuhan PDRB

Ekonomi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir tumbuh relatif stabil pada kisaran 5,2% - 5,4%, dan terus meningkat sejak tahun 2016-2018 meskipun peningkatannya lambat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selalu lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa relatif lebih rendah, terutama pada tahun 2018 sebagaimana gambar 2.6. dan 2.7.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

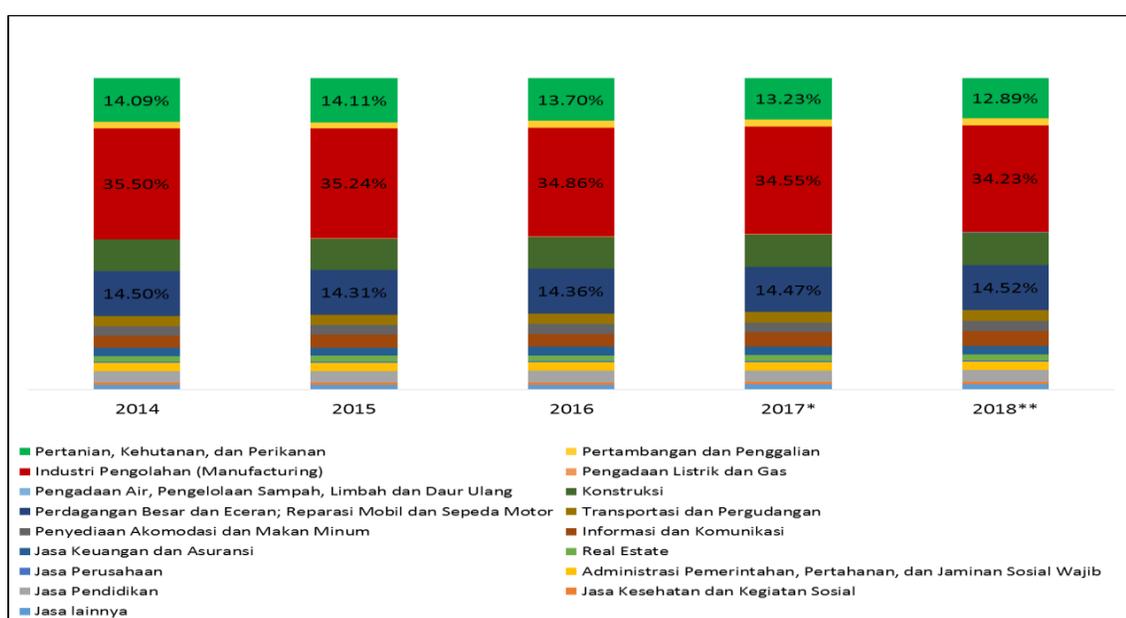
Gambar 2.6
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 (%)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2019, diolah

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi se-Jawa
Tahun 2014-2018 (%)

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang diukur dengan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari Rp.764.959,150 trilyun (2014) menjadi Rp.941.283,278 trilyun (2018). Peningkatan nilai PDRB didukung dengan peningkatan nilai PDRB pada seluruh lapangan usaha. Struktur perekonomian Jawa Tengah menurut lapangan usaha selama tahun 2014-2018 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan dan perikanan; dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor, meskipun demikian angka distribusinya tidak selalu tumbuh positif dari tahun ke tahun. Rincian kontribusi tiap lapangan usaha terhadap PDRB dapat dilihat pada gambar 2.8



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019 – data diolah

Ket : * angka sementara, ** angka sangat sementara

Gambar 2.8
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (tahun 2010) menurut Kontribusi
Lapangan Usaha, Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

Berdasarkan Gambar 2.8 di atas, dapat dikatakan bahwa di Jawa Tengah terjadi penurunan persentase lapangan usaha pada sektor pertanian sebagai sektor yang digeluti sebagian besar penduduk miskin. Penurunan tersebut juga terjadi di tingkat Nasional, yang menunjukkan penurunan jumlah pekerja di sektor pertanian 35,9 juta orang (30%) dari jumlah total pekerja pada tahun 2017 menjadi 35,7 juta (29%) dari total pekerja di Indonesia pada tahun 2018.

Penurunan proporsi jumlah petani bukanlah suatu hal yang mengejutkan bagi negara yang sedang tumbuh perekonomiannya. Data menunjukkan bahwa proporsi pekerja sektor pertanian di Malaysia jauh lebih kecil yaitu hanya 11%. Proporsi ini bahkan lebih kecil lagi yaitu di bawah 2% untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman dan Inggris.

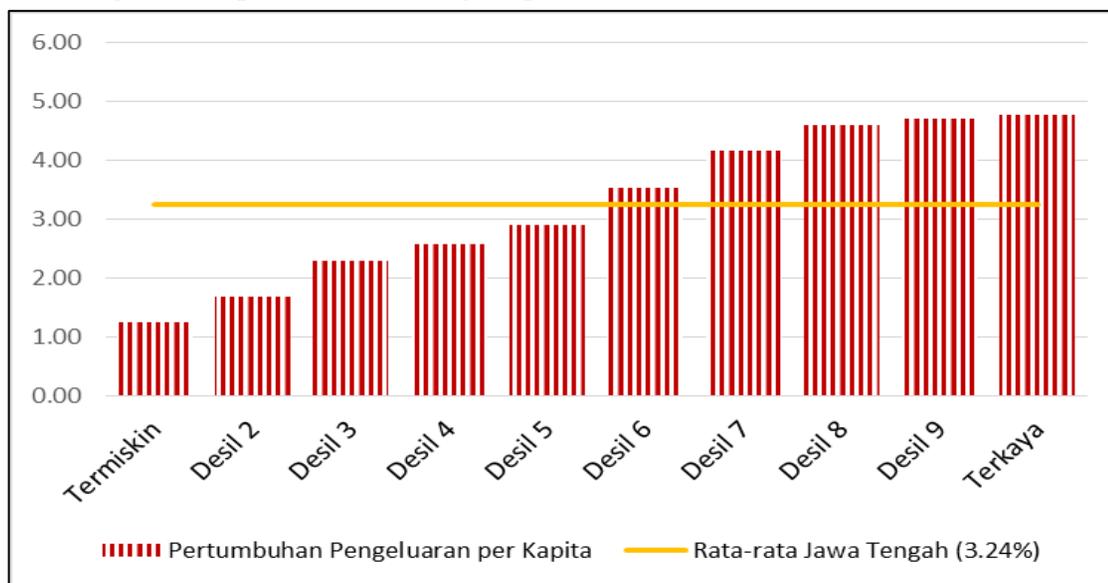
Menghadapi situasi ini ada dua pilihan kebijakan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan, yaitu tetap berpihak dan memperkuat sektor pertanian dengan prioritas memperkuat setiap aspek dari sarana produksi dan lingkungan, manusia, teknologi, organisasi, jaringan, serta mengembangkan industri berbasis pertanian, atau pilihan kedua menyiapkan transformasi sosial bagi penduduk yang memiliki penghidupan berbasis pertanian untuk berpindah ke sektor non pertanian. Pilihan kedua didasarkan pada pemikiran bahwa kontribusi pekerja sektor pertanian memang seharusnya berkurang seiring dengan berkurangnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB. Jika tidak, tenaga kerja sektor pertanian akan berlebih dan menimbulkan masalah seperti produktivitas yang rendah, upah yang rendah, serta kemiskinan.

Meskipun demikian, transformasi pekerja sektor pertanian ke sektor non pertanian tidak selalu terjadi secara langsung, untuk dapat bekerja di sektor non pertanian dengan upah yang lebih tinggi, sebagian pekerja pertanian di perdesaan diharuskan berpindah terlebih dahulu ke sektor non pertanian.

Fenomena kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian ini sangat erat kaitannya dengan sulitnya mengentaskan kemiskinan di perdesaan. BPS mencatat penurunan kemiskinan yang nyata dari tahun ke tahun, bahkan untuk pertama kalinya menyentuh angka di bawah 10% pada tahun 2018. Sayangnya, tingkat kesenjangan antara desa dan kota justru mengalami peningkatan. Di tahun 2018, tingkat kemiskinan di desa sekitar 13,2% sementara di kota hanya sebesar 7%. Selain itu proporsi orang miskin yang tinggal di desa adalah 60% lebih banyak dibandingkan orang miskin yang tinggal di perkotaan. Jika dilihat dari pekerjaannya, 53% orang miskin di perdesaan bekerja di sektor pertanian, dimana hal ini berkaitan erat dengan jumlah petani yang berlebih dan rendahnya produktivitas tenaga kerja.

Pertumbuhan pendapatan yang ditunjukkan dengan pengeluaran per kapita di Jawa Tengah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2008-2018) juga menunjukkan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Pada saat secara rata-rata Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan pendapatan sekitar 3,24 persen, kelompok pendapatan terendah (desil 1-4) hanya

tumbuh di bawah rata-rata provinsi yaitu 1,25-2,57 persen, yang tumbuh di atas rata-rata provinsi adalah desil 5-10. Perbandingan kesenjangan pertumbuhan antara desil 1 (termiskin) dengan desil 10 (terkaya) cukup mencolok, kelompok desil 1 selama 10 tahun hanya tumbuh sebesar 1,25 persen sementara desil 10 tumbuh sampai 4,76 persen. Berdasarkan gambaran tersebut pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah belum menunjukkan pertumbuhan yang inklusif.



Sumber: SEPAKAT – Bappenas, 2018

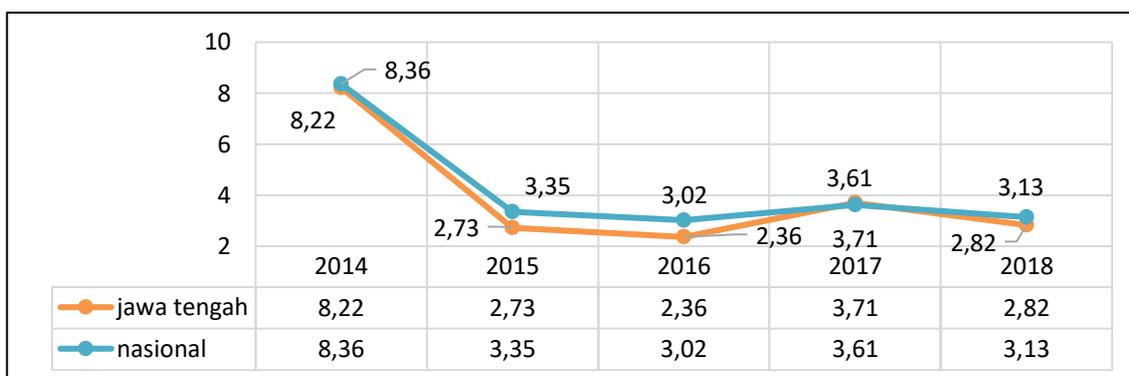
Gambar 2.9
Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Tahun 2008-2018
menurut Desil, Provinsi Jawa Tengah

2. Inflasi

Angka inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2014-2018 memiliki tren menurun. Angka inflasi di Jawa Tengah tercatat pada tahun 2018 sebesar 2,82%, lebih rendah jika dari angka inflasi tahun 2017 sebesar 3,71%. Tingkat inflasi ini rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, naiknya harga bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, angkutan udara, dan apel. Penahan laju inflasi adalah turunnya harga beras, tarif listrik, pisang, cabai rawit dan jeruk, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah.

Relatif rendahnya inflasi tidak terlepas dari optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah dalam mengendalikan inflasi melalui pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan, perluasan akses informasi dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga.

Pada tahun 2018 inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,82 relatif lebih rendah dibandingkan dengan Nasional sebesar 3,13. Kondisi inflasi Jawa Tengah dan nasional selama lima tahun terakhir (2014-2018) dapat dilihat sebagaimana gambar 2.10.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

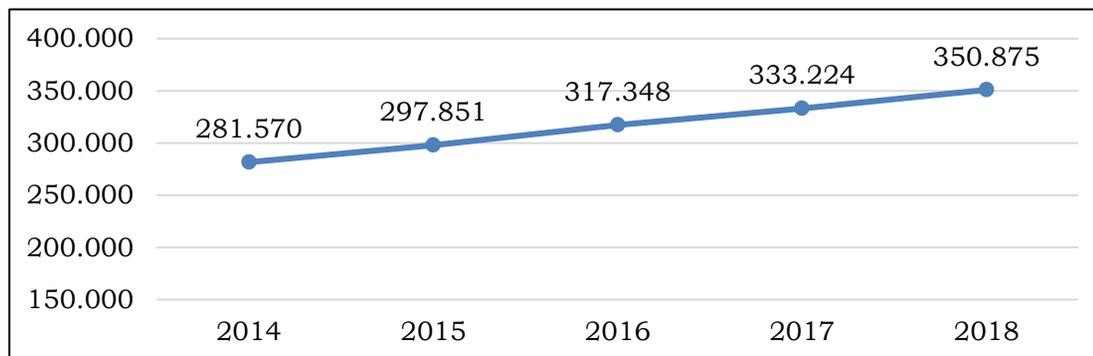
Gambar 2.10
Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018 (%)

Rendahnya inflasi di Jawa Tengah berdampak positif pada kemampuan atau daya beli masyarakat terhadap kebutuhan minimum makanan dan non-makanan yang ditunjukkan dengan pengeluaran rata-rata penduduk Jawa Tengah per bulan.

Berdasarkan data BPS tahun 2018 dapat diketahui bahwa biaya pengeluaran penduduk di Provinsi Jawa Tengah rata-rata per kapita per bulan sebesar Rp.938.581,- yang terdiri dari komoditi makanan sebesar Rp.460.891,- dan non makanan sebesar Rp.477.690,-.

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Jawa Tengah masih di atas garis kemiskinan yang merupakan standar instrumen untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kebutuhan minimum makanan dan non-makanan.

Kondisi inflasi umum yang rendah dan dapat ditekan dalam empat tahun terakhir menciptakan situasi yang berpotensi memudahkan penurunan kemiskinan, karena dapat menahan lonjakan peningkatan garis kemiskinan (GK). Perkembangan garis kemiskinan menunjukkan peningkatan seiring meningkatnya harga-harga barang yang dikonsumsi masyarakat miskin, dengan rendahnya inflasi yang terus dapat dipertahankan terutama inflasi harga beras medium, peningkatan GK juga dapat ditekan terutama pada periode 2016-2018.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014-2018, diolah.

Gambar 2.11
Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2018

Berdasarkan Gambar 2.11. di atas dapat diketahui bahwa seiring rendahnya inflasi sejak tahun 2016, peningkatan GK pada periode tahun 2016-2018 lebih rendah dari peningkatan GK pada periode 2014-2016.

BAB III

PROFIL KEMISKINAN JAWA TENGAH

A. KONSEP KEMISKINAN

Secara umum kemiskinan dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidakmampuan atau kekurangmampuan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan.

Banyak konsep dan pengukuran yang digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan karena kemiskinan bersifat multidimensi dan kompleks. Konsep kemiskinan yang digunakan dalam dokumen SPKD ini adalah konsep kemiskinan menurut BPS.

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran dikonseptualisasikan dengan garis kemiskinan). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK).

GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan garis kemiskinan non makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.

Indikator kemiskinan konsumsi ditunjukkan dengan persentase penduduk di bawah GK terhadap seluruh penduduk atau persentase penduduk miskin, indikator ini disebut *head count index* (P0), karakteristik penduduk di bawah garis kemiskinan juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, artinya semakin sulit kemiskinan diturunkan. Nilai agregat dari indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program (BPS, 2003).

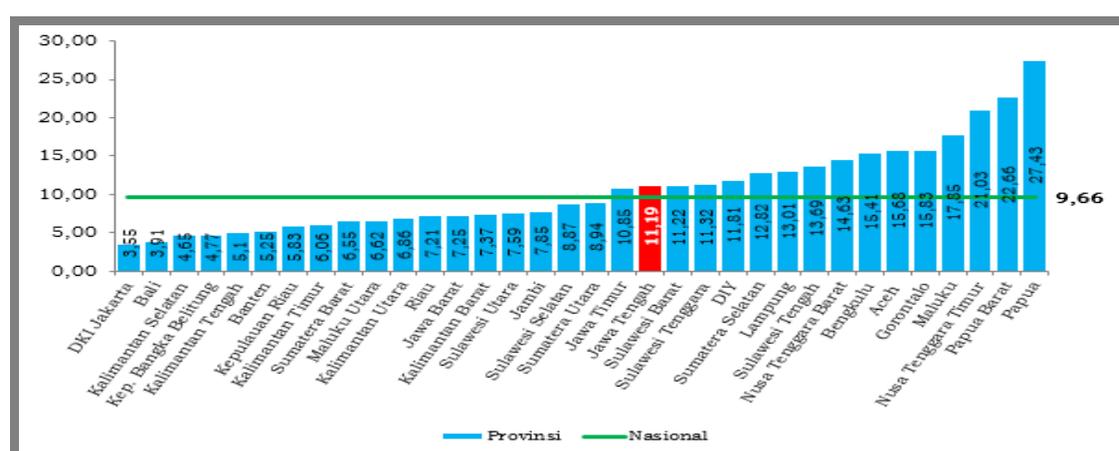
Selain itu kesenjangan antar penduduk miskin juga dapat dilihat dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin.

B. KONDISI KEMISKINAN DAERAH

Kondisi kemiskinan Jawa Tengah menggambarkan persentase penduduk miskin (Po) dan jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

1. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin

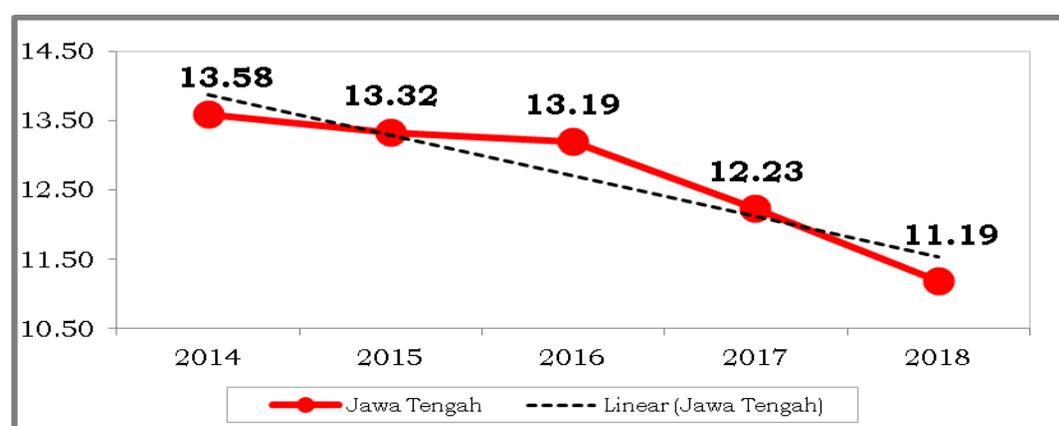
Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar 11,19%, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 9,66%, sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2019, diolah

Gambar 3.1
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018

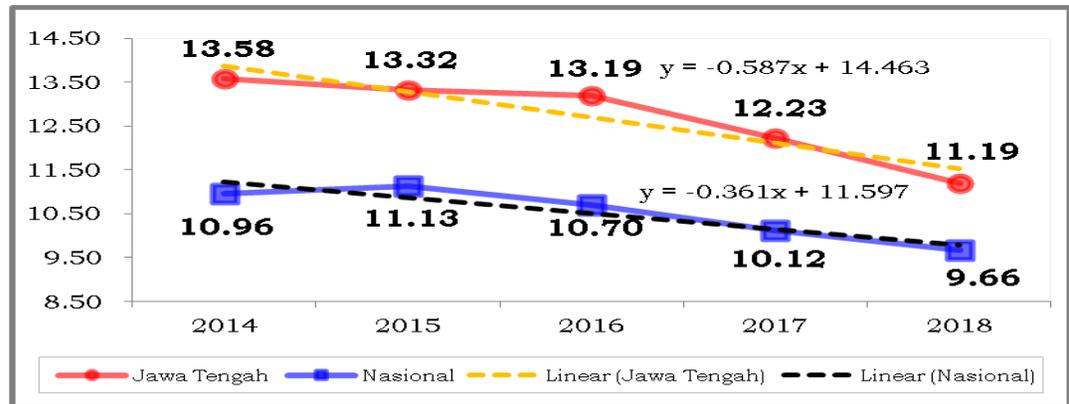
Penduduk miskin di Jawa Tengah selama kurun waktu 2014-2018 terus mengalami penurunan dari 13,58% di tahun 2014 menjadi 11,19% di tahun 2018, sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2014- 2018, diolah

Gambar 3.2
Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (%)

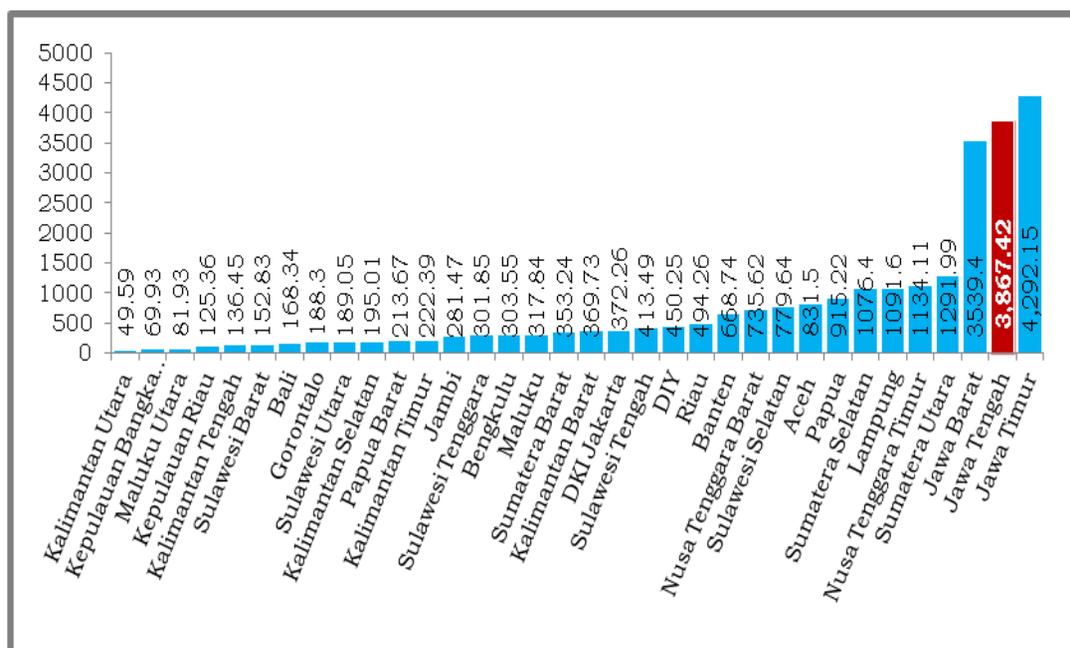
Apabila dianalisis dari sisi relevansi, rata-rata penurunan kemiskinan di Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 0,59 lebih besar dibandingkan Nasional (0,36), sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014-2018, diolah

Gambar 3.3 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2014-2018 (%)

Meskipun persentase penduduk miskin konsisten menurun, namun jumlah absolutnya cukup besar. Jumlah penduduk miskin tahun 2018 (September) sebanyak 3,87 juta jiwa, menurun 320 ribu jiwa dibanding tahun 2017 (September) sebanyak 4,19 juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan terbesar kedua setelah Jawa Timur, sebagaimana gambar berikut:

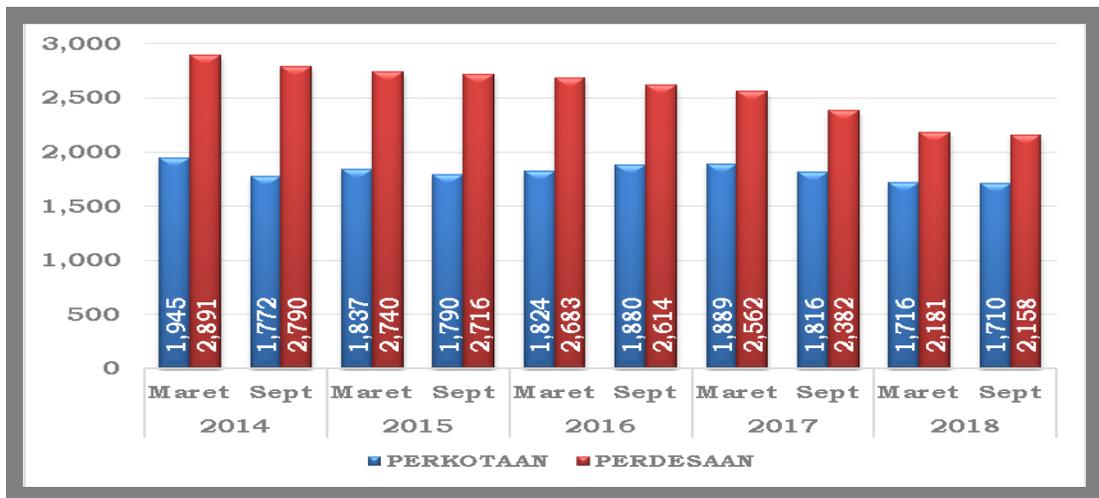


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019 diolah

Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018 (Ribu Jiwa)

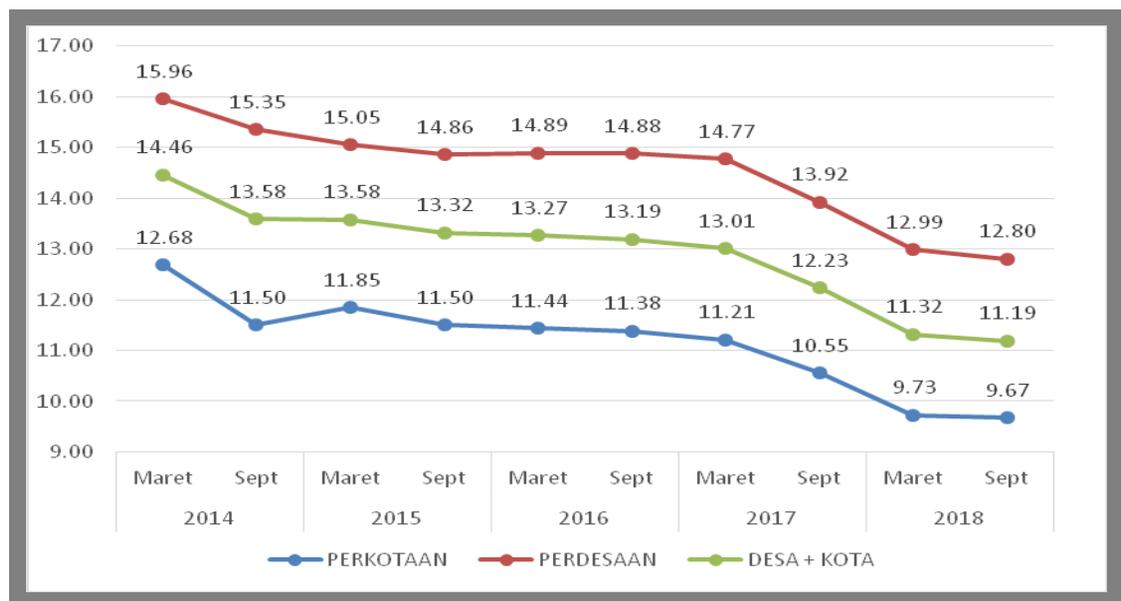
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Tengah merupakan permasalahan dan prioritas yang penting untuk segera diselesaikan.

Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, jumlah penduduk miskin perdesaan sebanyak 2,16 juta jiwa (12,80%), lebih besar dibandingkan di perkotaan sebanyak 1,71 juta jiwa (9,67%), sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

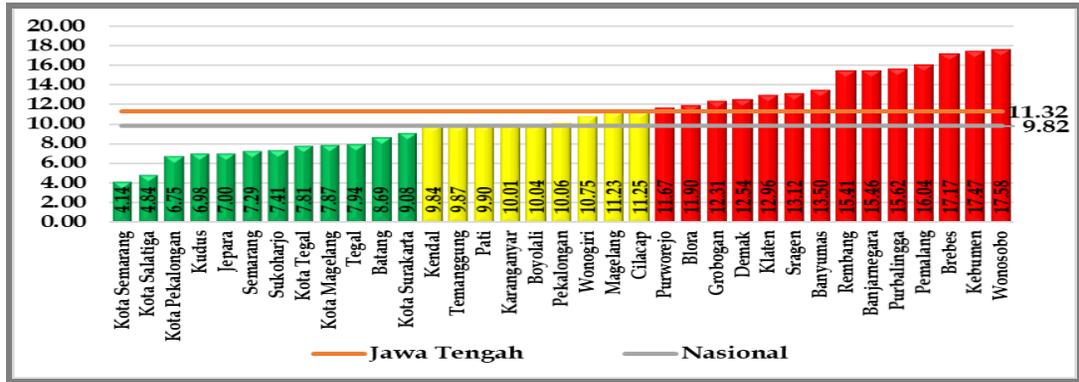
Gambar 3.5
Jumlah Penduduk Miskin Jawa Tengah menurut Wilayah Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014-2018 (juta jiwa)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019 diolah

Gambar 3.6
Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah menurut Wilayah Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014-2018

Berdasarkan wilayah kabupaten/kota sampai dengan tahun 2018, terdapat 14 Kabupaten dengan angka kemiskinan di atas nasional dan Jawa Tengah, sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018, diolah

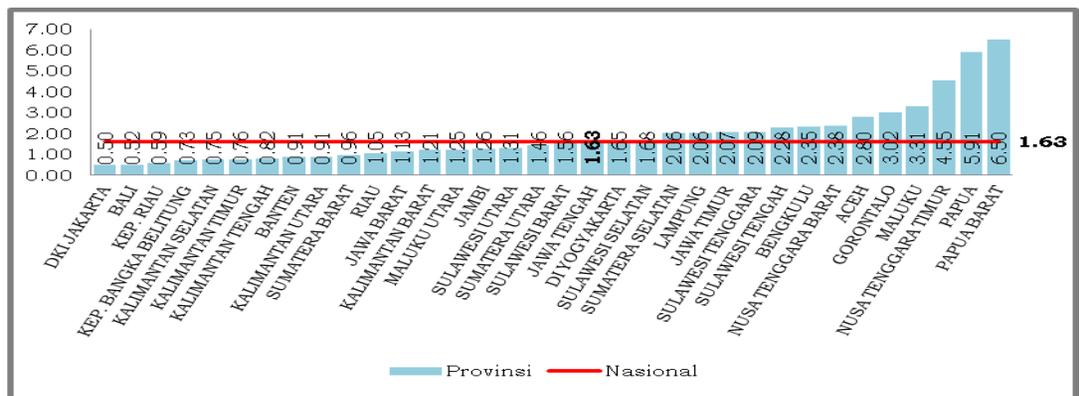
Gambar 3.7
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 (%)

Berdasarkan gambar tersebut, persebaran penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 kelompok, yaitu :

- Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 14 kabupaten meliputi Blora, Grobogan, Demak, Purworejo, Sragen, Klaten, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Brebes, Kebumen, dan Wonosobo;
- Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 9 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Kendal, Pati, Temanggung, Boyolali, Karanganyar, Magelang, Pekalongan, Wonogiri, dan Cilacap;
- Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 12 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Jepara, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, dan Kota Surakarta.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar 1,63 sama dengan rata-rata Nasional sebesar 1,63, sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018, diolah

Gambar 3.8
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018 (%)

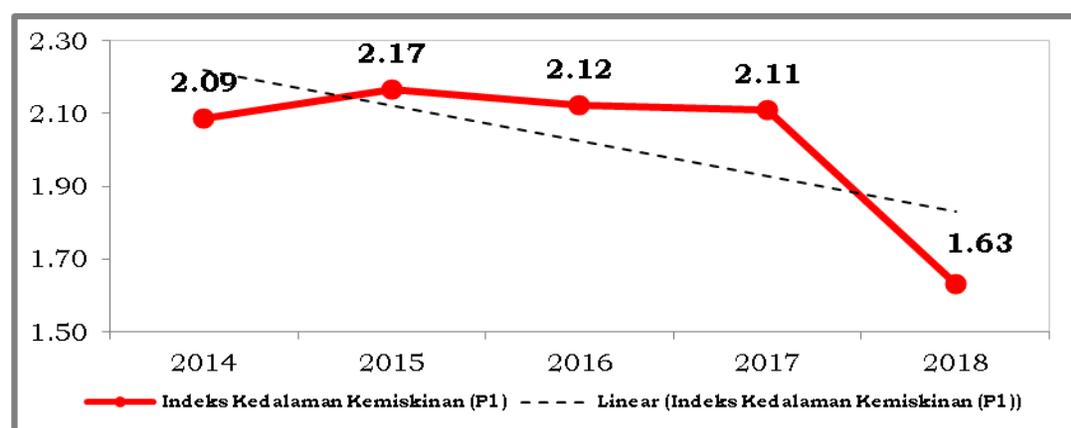
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2018 berada pada urutan ke-3 (tiga) tertinggi, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.8. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, didasarkan pada unsur pembentuk indeks kedalaman kemiskinan, Jawa Tengah masih menghadapi permasalahan garis kemiskinan yang cenderung meningkat dan atau pengeluaran orang miskin yang stagnan atau pertumbuhannya yang melambat.

Tabel 3.1
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2016-2018 (%)

No.	Provinsi/ Nasional	2016	2017	2018
1.	Jawa Timur	1,95	2,09	2,07
2.	D.I. Yogyakarta	1,75	2,09	1,65
3.	Jawa Tengah	2,12	2,11	1,63
4.	Jawa Barat	1,28	1,39	1,13
5.	Banten	0,76	0,78	0,91
6.	Bali	0,53	0,55	0,52
7.	DKI Jakarta	0,43	0,61	0,50
	Nasional	1,74	1,79	1,63

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2016- 2018

Dalam kurun waktu tahun 2014-2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Jawa Tengah menunjukkan kondisi fluktuatif meskipun mulai tahun 2017 trendnya menurun, yang menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil, sebagaimana gambar berikut:

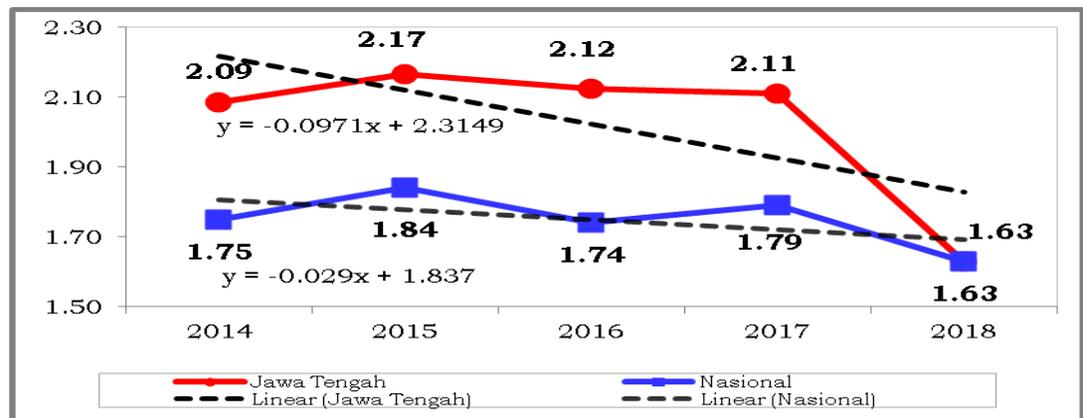


Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 20104-2018, diolah

Gambar 3.9
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 (%)

Fenomena ini disebabkan antara lain: 1) Meningkatnya garis kemiskinan tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya pengeluaran konsumsi kelompok masyarakat miskin; 2) Meningkatnya garis kemiskinan lebih tinggi dibanding dengan peningkatan pengeluaran konsumsi kelompok masyarakat miskin; dan 3) Penurunan pengeluaran konsumsi kelompok masyarakat miskin lebih tajam dibanding peningkatan garis kemiskinan.

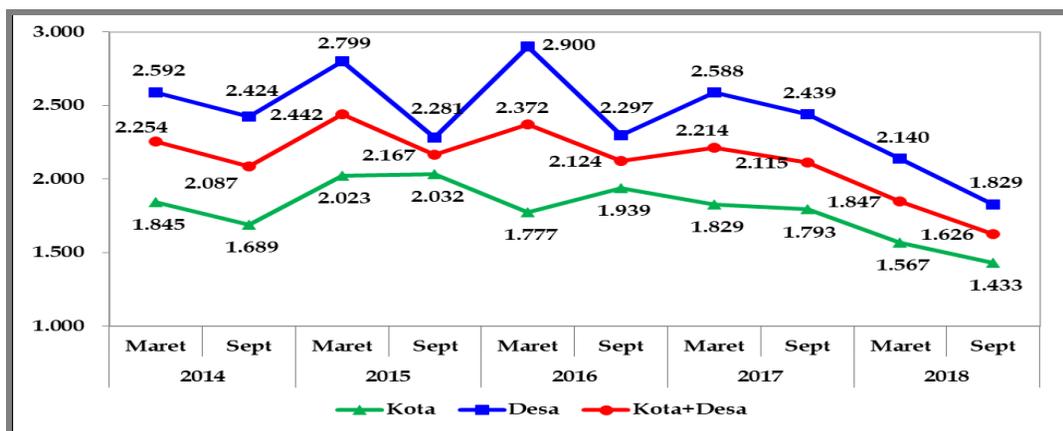
Apabila dianalisis dari sisi relevansi, rata-rata penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 0,1 lebih besar dibandingkan Nasional (0,03), sebagaimana gambar berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2014-2018, diolah

Gambar 3.10
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional
Tahun 2014-2018 (%)

Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) periode September 2018 di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Pada September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perdesaan mencapai sebesar 1,829 sedangkan di perkotaan sebesar 1,433 sebagaimana gambar berikut:



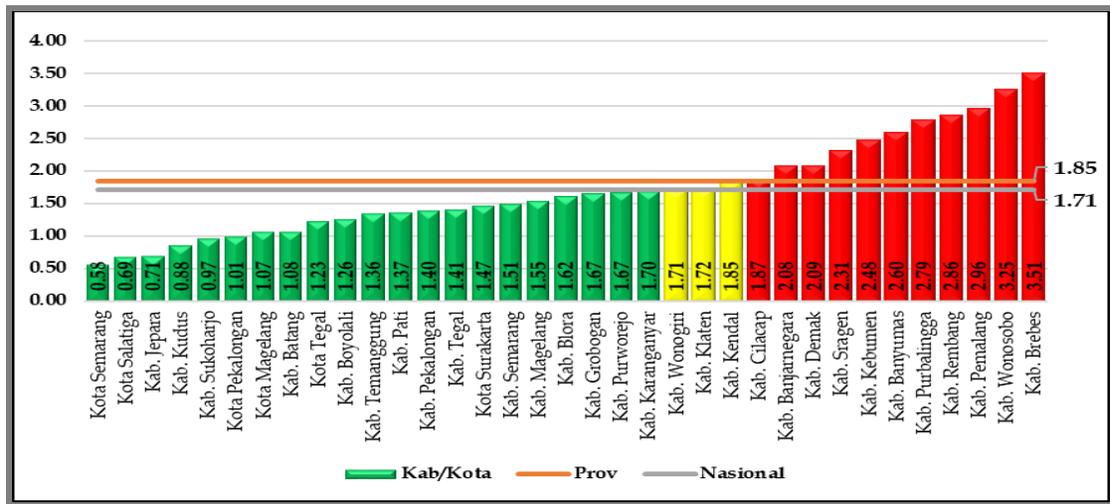
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

Gambar 3.11
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah
menurut Wilayah Perdesaan dan Perkotaan
Periode Maret 2014 – September 2018

Indeks tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

Berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2018, apabila dibandingkan dengan provinsi

(1,85) dan Nasional (1,71), Kabupaten Brebes memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 3,51 dan Kota Semarang terendah sebesar 0,58 sebagaimana gambar berikut



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

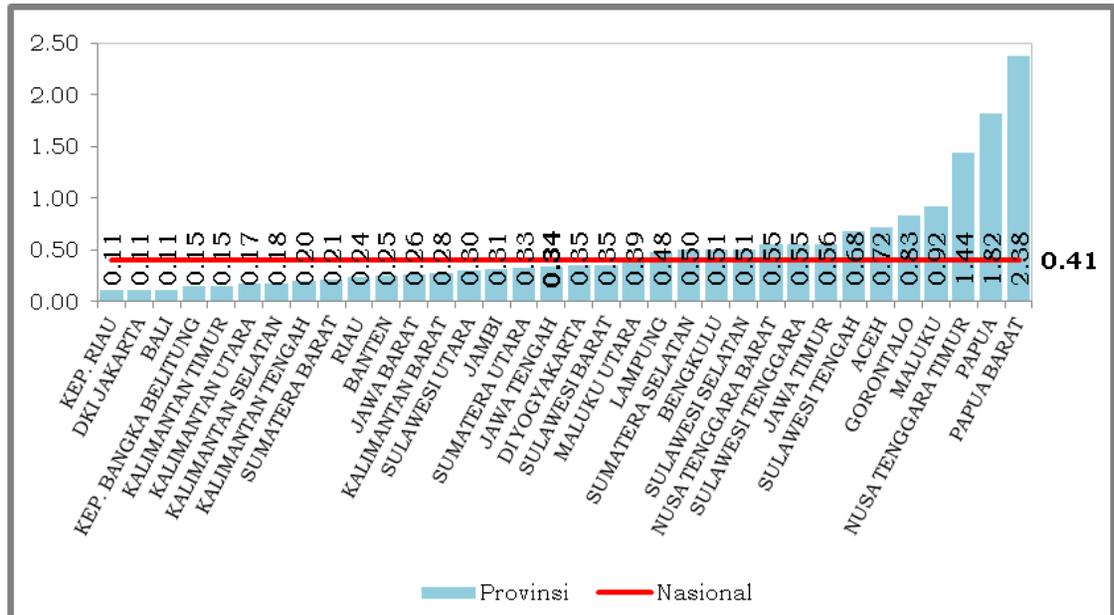
Gambar 3.12
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018

Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dikelompokkan sebagai berikut:

- Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 diatas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten meliputi Kabupaten Brebes, Wonosobo, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Banyumas, Kebumen, Sragen, Demak, Banjarnegara, dan Cilacap;
- Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 dibawah provinsi dan diatas nasional, sebanyak 3 kabupaten Kendal, Klaten, dan Wonogiri;
- Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 21 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Karanganyar, Purworejo, Grobogan, Blora, Magelang, Semarang, Kota Surakarta, Tegal, Pekalongan, Pati, Temanggung, Boyolali, Kota Tegal, Batang, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Sukoharjo, Kudus, Jepara, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar 0,34 berada di bawah rata-rata Nasional sebesar 0,41, sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018, diolah

Gambar 3.13
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia
menurut Provinsi Tahun 2018 (%)

Kondisi mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk miskin di Jawa Tengah masih menjadi perhatian meskipun kondisinya sudah lebih baik dibandingkan rata-rata capaian Nasional.

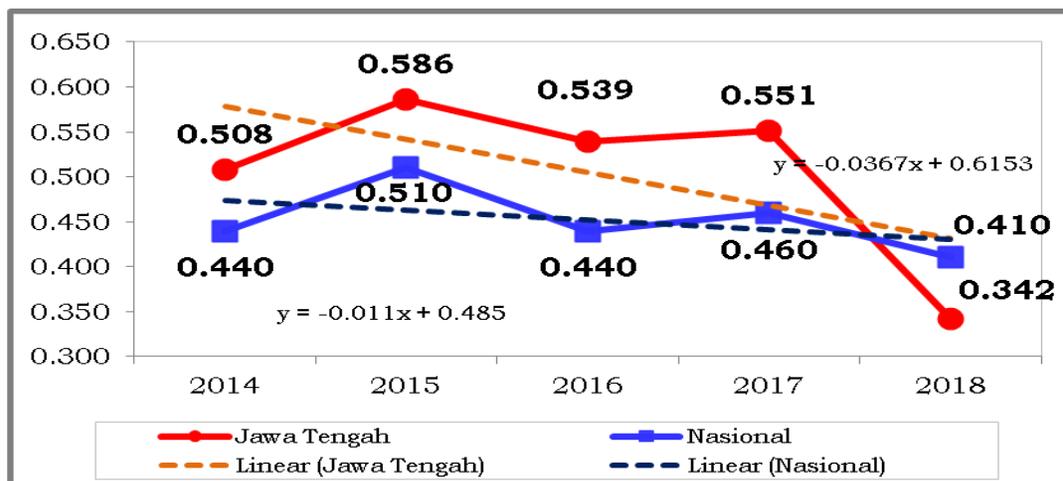
Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa-Bali, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Jawa Tengah berada pada urutan ke-3 (tiga) tertinggi setelah Jawa Timur dan DIY, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi
se Jawa - Bali Tahun 2016-2018 (%)

No	Provinsi/Nasional	2016	2017	2018
1.	Jawa Timur	0,47	0,56	0,56
2.	DIY	0,36	0,46	0,35
3.	Jawa Tengah	0,54	0,55	0,34
4.	Jawa Barat	0,28	0,35	0,26
5.	Banten	0,17	0,16	0,25
6.	DKI Jakarta	0,08	0,15	0,11
7.	Bali	0,11	0,12	0,11
	Nasional	0,44	0,46	0,41

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2016 - 2018, diolah

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 menunjukkan kondisi fluktuatif, yaitu naik pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,586 namun turun pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,539 hingga turun menjadi sebesar 0,342 di tahun 2018 sebagaimana gambar berikut:

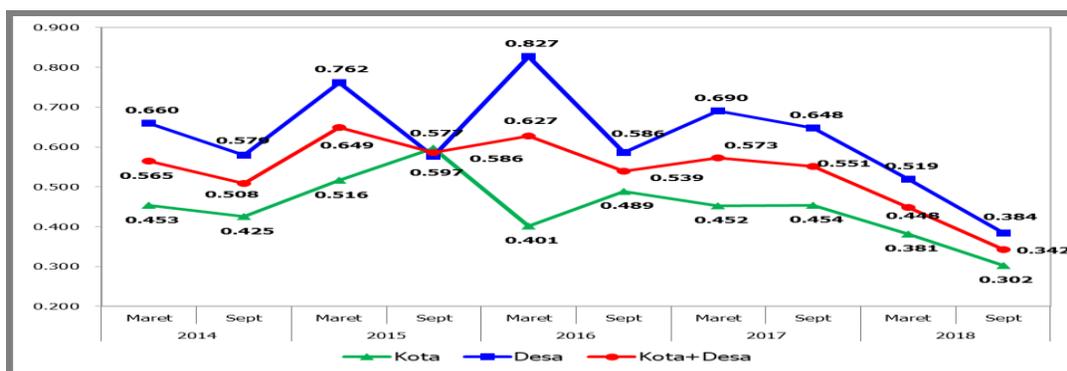


Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2014-2018, diolah

Gambar 3.14
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Jawa Tengah terhadap Nasional
Tahun 2014-2018 (%)

Gambar 3.12 tersebut menunjukkan bahwa perkembangan Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah sejalan terhadap perkembangan nasional.

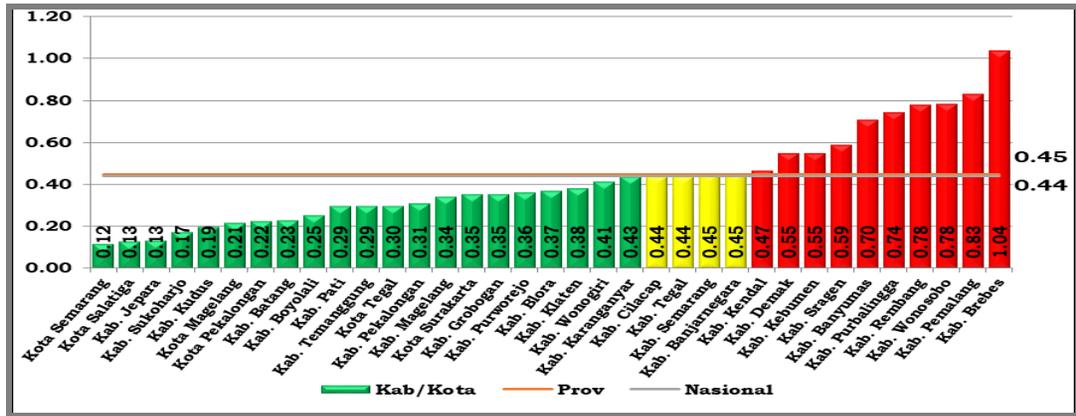
Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) periode September 2018 di daerah perdesaan sebesar 0,384 lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan (0,302). Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih lebar dibandingkan perkotaan, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

Gambar 3.15
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Wilayah Perdesaan
dan Perkotaan Periode Maret 2014-September 2018

Gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2018 menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes memiliki indeks tertinggi (1,04) dan Kota Semarang terendah (0,12) sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 3.16
Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota
Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 (Maret) sebagai berikut:

- Indeks Keparahan Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di atas provinsi dan nasional, sebanyak 10 kabupaten meliputi Kabupaten Brebes, Pemalang, Wonosobo, Rembang, Purbalingga, Banyumas, Sragen, Kebumen, Demak, dan Kendal;
- Indeks Keparahan Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan diatas nasional, sebanyak 4 kabupaten meliputi Banjarnegara, Semarang, Tegal, dan Cilacap;
- Indeks Keparahan Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 21 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Blora, Purworejo, Grobogan, Kota Surakarta, Magelang, Pekalongan, Kota Tegal, Temanggung, Pati, Boyolali, Batang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kudus, Sukoharjo, Jepara, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

4. Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan (P0, P1, P2)

Kemiskinan di Jawa Tengah selama periode 2014-2018 semakin menurun, ditandai dengan makin berkurangnya jumlah penduduk miskin, meskipun jumlahnya masih yang terbesar kedua setelah Jawa Timur. Di sisi lain indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) yang fluktuatif memberikan sinyal bahwa kerentanan penduduk miskin Jawa Tengah masih perlu diwaspadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan Jawa Tengah merupakan permasalahan penting yang perlu menjadi prioritas pembangunan di Jawa Tengah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

INDIKATOR	PERSPEKTIF				
	POSISI RELATIF	ANTAR WAKTU	EFEKTIVITAS	RELEVANSI	KETERKAITAN
Persentase Penduduk Miskin (PO)	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih tinggi dari Nasional Tahun 2018. • Terdapat 14 kabupaten yang capaiannya di atas provinsi 	Konsisten membaik dan capaian tahun 2018 lebih baik dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.	Menunjukkan perbaikan dengan kinerja penurunan mengalami percepatan.	Rata-rata penurunan kemiskinan lebih besar dari Nasional	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) fluktuatif, namun tidak berpengaruh langsung terhadap persentase penduduk miskin (tren PO konsisten menurun).
Jumlah Penduduk Miskin	Terbesar kedua secara nasional Tahun 2018.	Konsisten membaik dan capaian tahun 2018 lebih baik dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.	Menunjukkan perbaikan dengan kinerja penurunan mengalami percepatan.	N/A	
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	<ul style="list-style-type: none"> • Sama dengan rata-rata Nasional Tahun 2018. • Urutan ke-3 tertinggi di wilayah Jawa-Bali. • Terdapat 11 kabupaten yang capaiannya di atas provinsi 	Kondisinya fluktuatif, capaian tahun 2018 lebih baik dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.	Menunjukkan perbaikan dengan semakin besarnya penurunan indeks	Rata-rata penurunan lebih besar dari Nasional	
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	<ul style="list-style-type: none"> • Di bawah rata-rata Nasional Tahun 2018. • Urutan ke-3 tertinggi di wilayah Jawa-Bali. • Terdapat 10 kabupaten yang capaiannya di atas provinsi 	Kondisinya fluktuatif, capaian tahun 2018 lebih baik dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.	Menunjukkan perbaikan dengan semakin besarnya penurunan indeks	Rata-rata penurunan lebih besar dari Nasional	

C. GARIS KEMISKINAN JAWA TENGAH

Garis Kemiskinan di Jawa Tengah kondisi September 2018 sebesar Rp. 357.600,- per kapita per bulan, meningkat 5,54% dibandingkan dengan September 2017 yang mencapai Rp.338.815,- perkapita perbulan. Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan September 2018 sebesar Rp.359.526,- per kapita per bulan atau naik 5,84% dari kondisi September 2017 (Rp.339.692,- per kapita per bulan). Garis Kemiskinan di perdesaan September 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 5,23% menjadi sebesar Rp.355.306,- per kapita per bulan dibandingkan dengan September 2017 yaitu sebesar Rp.337.657,- per kapita per bulan.

Dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan, terlihat bahwa peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan adalah :

1. Komoditi Makanan

Pada Tahun 2016-2018 komoditi makanan yang memberi sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Tahun 2018 Beras memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 20,52% di daerah perdesaan dan 17,88% di daerah perkotaan. Rokok kretek filter memberi sumbangan sebesar 9,11% di daerah perdesaan dan 11,19% di daerah perkotaan. Untuk lebih lengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya di Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Komoditi Makanan	2016		2017		2018	
		Desa (%)	Kota (%)	Desa (%)	Kota (%)	Desa (%)	Kota (%)
1	Beras	21,55	17,87	20,18	17,33	20,52	17,88
2	Rokok kretek filter	8,44	10,72	11,32	11,07	9,11	11,19
3	Daging sapi	5,99	7,17	3,99	6,08	-	-
4	Telur ayam ras	3,04	2,96	3,17	3,18	4,38	3,46
5	Gula pasir	3,13	2,57	2,86	2,49	2,76	2,34
6	Tempe	3,07	2,56	2,65	2,13	3,39	2,75
7	Daging ayam ras	2,42	2,48	2,49	2,97	3,00	3,24
8	Mie instan	2,45	2,31	2,57	2,26	2,49	2,34
9	Tahu	2,59	2,09	2,24	1,87	2,56	-
10	Bawang merah	2,59	2,10	1,97	-	-	-
11	Kue basah	-	-	-	2,28	2,06	2,28
12	Roti	-	-	-	-	-	2,22
13	Komoditi makanan lainnya	19,49	18,80	21,40	20,25	24,54	24,51

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016-2018, diolah

2. Komoditi Bukan Makanan

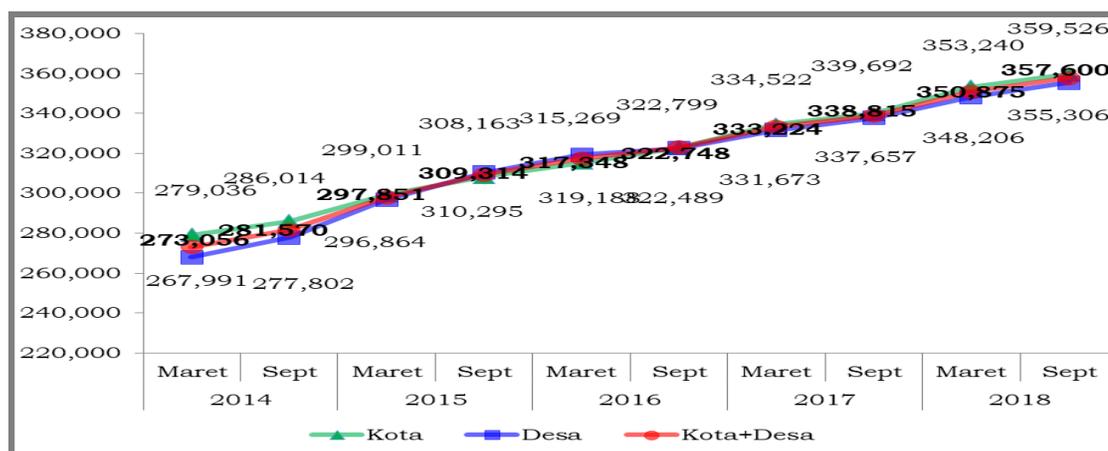
Pada Tahun 2016-2018 komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan di daerah perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Pada Tahun 2018 Perumahan memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 7,58% di daerah perdesaan dan 7,88% di daerah perkotaan. Bensin memberi sumbangan yakni sebesar 2,93% di daerah perdesaan dan 3,23% di daerah perkotaan. Komoditi berikutnya adalah Listrik memberi sumbangan yakni sebesar 1,84% di daerah perdesaan dan 2,89 di daerah perkotaan. Untuk lebih lengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya di Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Komoditi Bukan Makanan	2016		2017		2018	
		Desa (%)	Kota (%)	Desa (%)	Kota (%)	Desa (%)	Kota (%)
1	Perumahan	6,50	7,21	7,56	7,53	7,58	7,88
2	Bensin	2,70	3,07	2,92	3,00	2,93	3,23
3	Listrik	1,82	2,83	1,72	3,10	1,84	2,89
4	Pendidikan	1,76	2,91	1,56	2,62	1,49	2,48
5	Kesehatan	-	1,63	-	-	-	-
6	Perlengkapan mandi	1,29	-	1,34	1,52	1,29	1,41
7	Kayu bakar	-	-	-	-	1,00	-
8	Pakaian jadi perempuan dewasa	-	-	-	-	-	0,87
9	Komoditi bukan makanan lainnya	11,17	10,73	10,06	10,32	9,06	9,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016-2018, diolah

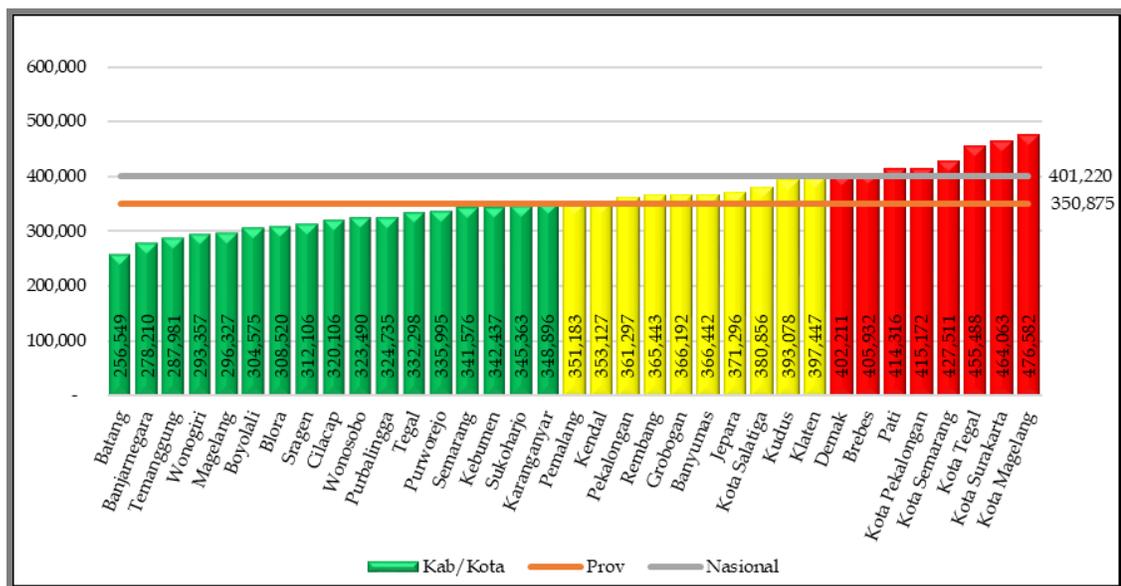
Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014-2018) terus meningkat, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014-2018, diolah

Gambar 3.17
Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2018, diolah

Gambar 3.18
Grafik Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Berdasarkan gambar 3.16 dapat diketahui bahwa garis kemiskinan paling rendah berada di Kabupaten Batang sebesar Rp. 256.549,- per kapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan paling tinggi berada di Kota Magelang sebesar Rp. 476.582,- per kapita per bulan.

Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2018 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- Garis Kemiskinan Rendah, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi, terdapat di 17 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Banjarnegara, Temanggung, Wonogiri, Magelang, Boyolali, Blora, Sragen, Cilacap, Wonosobo, Purbalingga, Tegal, Purworejo, Semarang, Kebumen, Sukoharjo dan Karanganyar;
- Garis Kemiskinan Sedang, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di atas garis kemiskinan provinsi dan di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pemalang, Kendal, Pekalongan, Rembang, Grobogan, Banyumas, Jepara, Kota Salatiga, Kabupaten Kudus, dan Klaten;
- Garis Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang berada di atas garis kemiskinan nasional, terdapat di 8 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Demak, Brebes, Pati, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta dan Kota Magelang.

Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada Tahun 2014–2018, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6
Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2014 – 2018

No.	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Cilacap	265.714	273.828	292.525	307.041	320.106
2	Kab. Banyumas	309.106	320.585	344.514	357.748	366.442
3	Kab. Purbalingga	275.022	283.366	301.862	313.343	324.735
4	Kab. Banjarnegara	229.718	236.399	252.328	264.387	278.210
5	Kab. Kebumen	277.280	292.177	313.881	325.819	342.437
6	Kab. Purworejo	284.409	294.158	313.931	325.871	335.995
7	Kab. Wonosobo	267.548	275.180	297.422	308.553	323.490
8	Kab. Magelang	246.292	253.866	271.800	281.237	296.327
9	Kab. Boyolali	255.391	263.734	283.921	293.405	304.575
10	Kab. Klaten	327.231	340.484	364.240	376.305	397.447
11	Kab. Sukoharjo	291.949	303.030	327.217	337.037	345.363
12	Kab. Wonogiri	244.761	252.903	275.507	284.710	293.357
13	Kab. Karanganyar	288.814	303.056	329.531	340.538	348.896
14	Kab. Sragen	255.550	263.199	283.649	292.544	312.106
15	Kab. Grobogan	290.827	303.455	333.009	345.379	366.192
16	Kab. Blora	248.903	257.581	279.972	291.114	308.520
17	Kab. Rembang	299.503	314.596	338.986	354.440	365.443
18	Kab. Pati	332.228	347.575	377.442	393.817	414.316
19	Kab. Kudus	314.211	328.404	356.951	373.224	393.078
20	Kab. Jepara	299.914	314.422	341.754	355.607	371.296
21	Kab. Demak	315.570	328.529	356.919	371.525	402.211
22	Kab. Semarang	275.612	286.918	307.505	317.935	341.576
23	Kab. Temanggung	240.845	248.866	268.730	277.707	287.981
24	Kab. Kendal	289.486	301.449	323.078	335.497	353.127
25	Kab. Batang	216.952	224.437	240.541	249.292	256.549
26	Kab. Pekalongan	306.281	317.796	341.648	354.435	361.297
27	Kab. Pemalang	287.358	298.622	319.434	331.584	351.183
28	Kab. Tegal	271.875	282.861	308.270	319.758	332.298
29	Kab. Brebes	327.452	340.538	364.059	382.125	405.932
30	Kota Magelang	376.143	405.228	425.191	450.908	476.582
31	Kota Surakarta	417.807	406.840	430.293	448.062	464.063
32	Kota Salatiga	320.204	337.511	345.146	359.944	380.856
33	Kota Semarang	348.824	368.477	382.160	402.297	427.511
34	Kota Pekalongan	338.398	352.717	375.600	390.555	415.172
35	Kota Tegal	353.301	371.528	395.631	418.845	455.063
	Jawa Tengah	281.570	297.851	317.348	333.224	350.875
	Indonesia	312.328	344.809	361.990	374.478	401.220

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014-2018, diolah

BAB IV

DETERMINAN KEMISKINAN DAERAH

Determinan kemiskinan menjelaskan akar masalah yang dihadapi pada masing-masing dimensi kemiskinan non konsumsi (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan dan infrastruktur dasar), yang diketahui berdasarkan analisis dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan. Determinan kemiskinan juga menjelaskan daerah prioritas intervensi wilayah sebagai bahan intervensi kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

A. DIMENSI PENDIDIKAN

1. Masalah Utama Dimensi Pendidikan

Kemiskinan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Untuk itu menjadi penting pendidikan yang baik yang diperuntukkan bagi setiap orang sehingga diharapkan setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dan menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

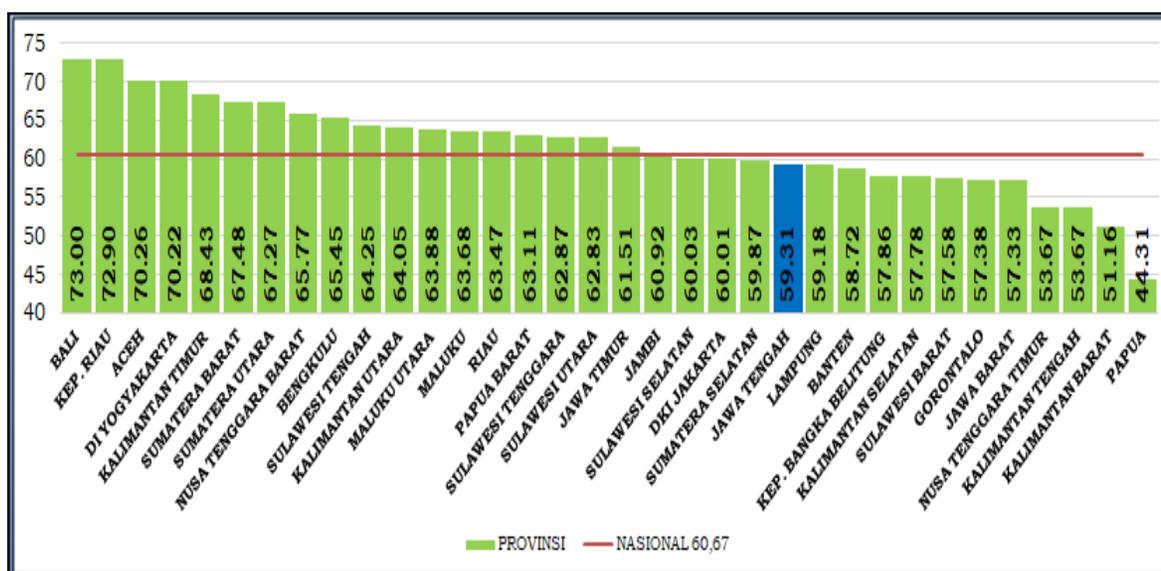
Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas, menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dimasuki, serta membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

Pemenuhan pendidikan sebagai hak warga negara harus segera dilakukan oleh pemberi layanan (negara), hal ini merupakan sasaran jangka pendek, yaitu agar setiap warga negara dipastikan mendapatkan pendidikan yang layak. Sejalan dengan itu, perbaikan akses pendidikan juga perlu dibarengi dengan perbaikan kualitas pendidikan, sehingga pada akhirnya dalam jangka panjang pendidikan menjadi salah satu pilar perbaikan sumber daya manusia dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keterkaitan kemiskinan dan pendidikan di Jawa Tengah, yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta angka partisipasi baik angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar.

Akses terhadap layanan pendidikan, terutama pendidikan menengah masih menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pentingnya akses pendidikan menengah di Jawa Tengah menjadi prioritas dapat dilihat dari capaian Indikator Utama yang menunjukkan akses pendidikan tersebut, di Jawa Tengah pada tahun 2018. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat merupakan Indikator Utama yang angkanya masih rendah dan berada di bawah nasional, sedangkan

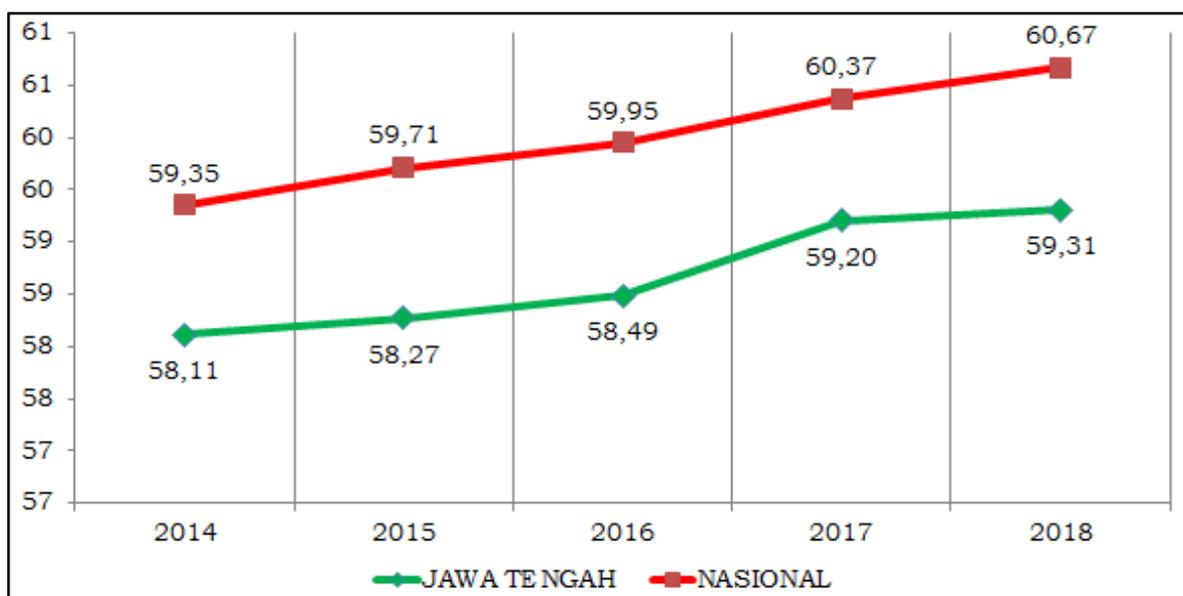
indikator APM pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat) angkanya sudah di atas nasional, sebagaimana gambar 4.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2019, diolah

Gambar 4.1
Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat (%) Antar Provinsi Tahun 2018

Laju peningkatan APM SMA/MA/Sederajat di Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir (2014-2018) sebesar 0,33 persen, namun jika dilihat dalam satu tahun terakhir (2017 – 2018) laju peningkatannya paling lambat dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu hanya 0,11 persen, sebagaimana gambar 4.2.



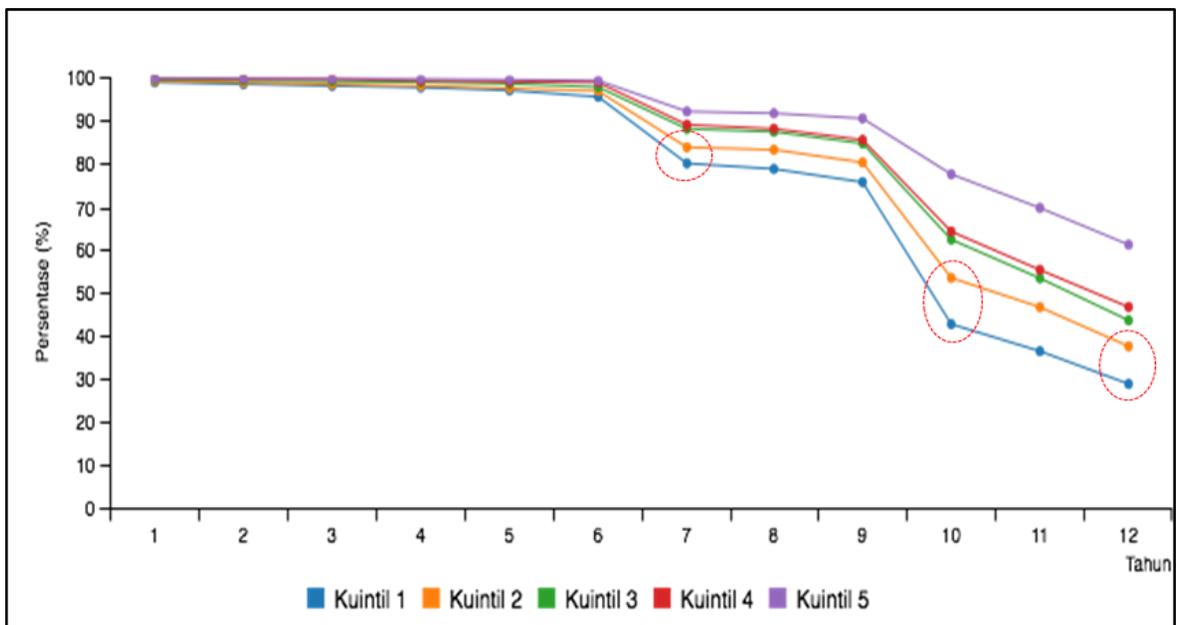
Sumber: Badan Pusat Statistik 2018, diolah

Gambar 4.2
Perkembangan APM SMA/MA/Sederajat (%) Provinsi Jawa Tengah dengan APM SMA/MA/Sederajat (%) Nasional Tahun 2014-2018

Dengan demikian, indikator utama dimensi pendidikan dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah diprioritaskan pada indikator

akses layanan pendidikan menengah, yaitu: Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat. Analisis terhadap APM dari masing-masing jenjang menunjukkan APM SMA/MA/Sederajat merupakan yang terendah, namun demikian pada jenjang pendidikan dasar SMP/MTs angkanya juga masih jauh dari target nasional dan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan, yaitu pendidikan dasar untuk semua (100%).

Rendahnya akses terhadap pendidikan terutama pendidikan menengah di Jawa Tengah dialami oleh seluruh anak usia sekolah terutama di perdesaan, namun demikian yang paling rendah aksesnya adalah anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar angka putus sekolah dan angka melanjutkan sekolahnya, pada kelompok miskin dan rentan (kuintil 1 dan 2 atau 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah). Dari seluruh anak yang masuk sekolah dasar (SD/MI) yang melanjutkan ke SMP/MTs hanya sekitar 80 persen, kemudian saat melanjutkan ke SMA/MA hanya tinggal sekitar 45 persen, dan yang berhasil sampai kelas 12 (kelas 3 pada jenjang SMA/MA) hanya tinggal sekitar 30 persen, sementara untuk kuintil tertinggi (kuintil 5) masih sekitar 60 persen, sebagaimana gambar 4.3.



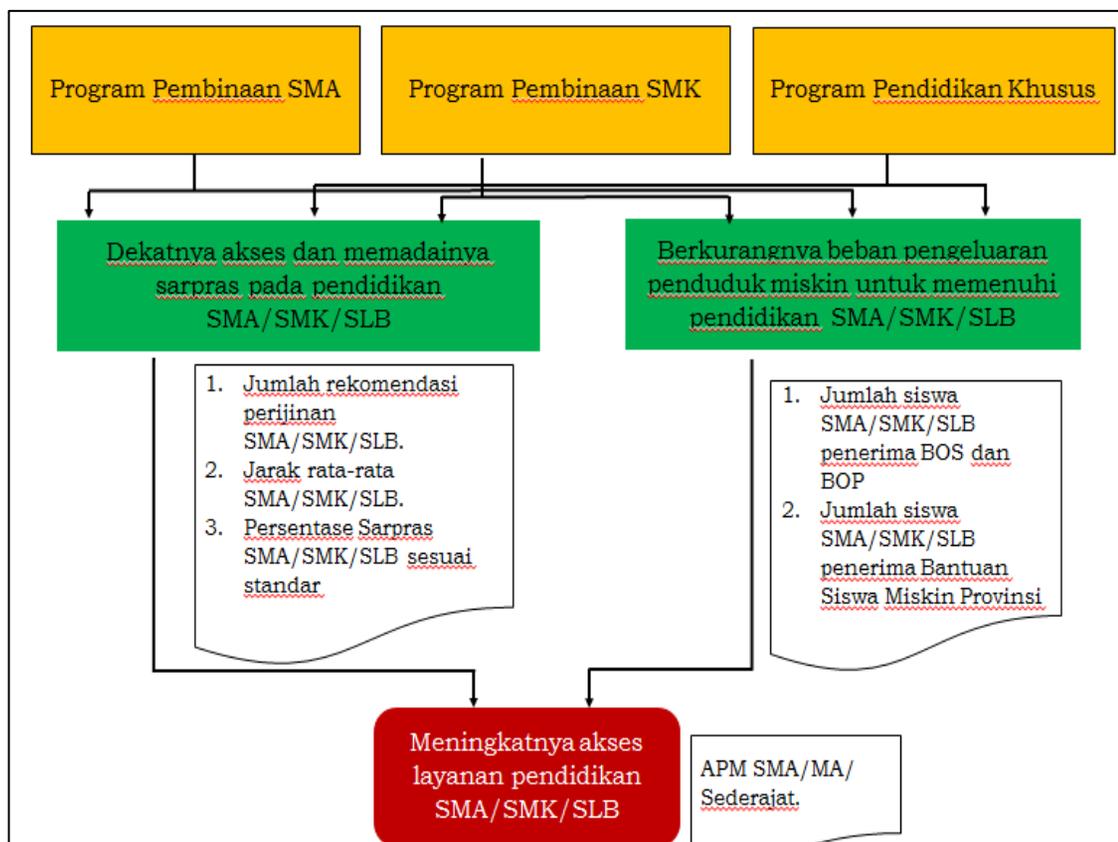
Sumber: BPS (Susenas) 2018

Gambar 4.3
Tingkat Melanjutkan Sekolah Provinsi Jawa Tengah
menurut Kuintil Tahun 2018

2. Prioritas Intervensi Dimensi Pendidikan

Penanganan masalah utama kemiskinan pada dimensi pendidikan di Jawa Tengah difokuskan pada perbaikan akses pendidikan SMA/MA/Sederajat. Intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memperbaiki indikator utama akses pendidikan menengah menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah penyelenggara layanan dalam bidang pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Logika program (*theory of change*) yang disusun menjelaskan bahwa peningkatan akses layanan pendidikan SMA/MA/Sederajat didukung dengan : 1) dekatnya akses dan memadainya sarpras pendidikan; 2) tercukupinya jumlah distribusi dan kualitas guru; serta 3) berkurangnya beban pengeluaran penduduk miskin untuk mengikuti pendidikan sebagaimana gambar 4.4.



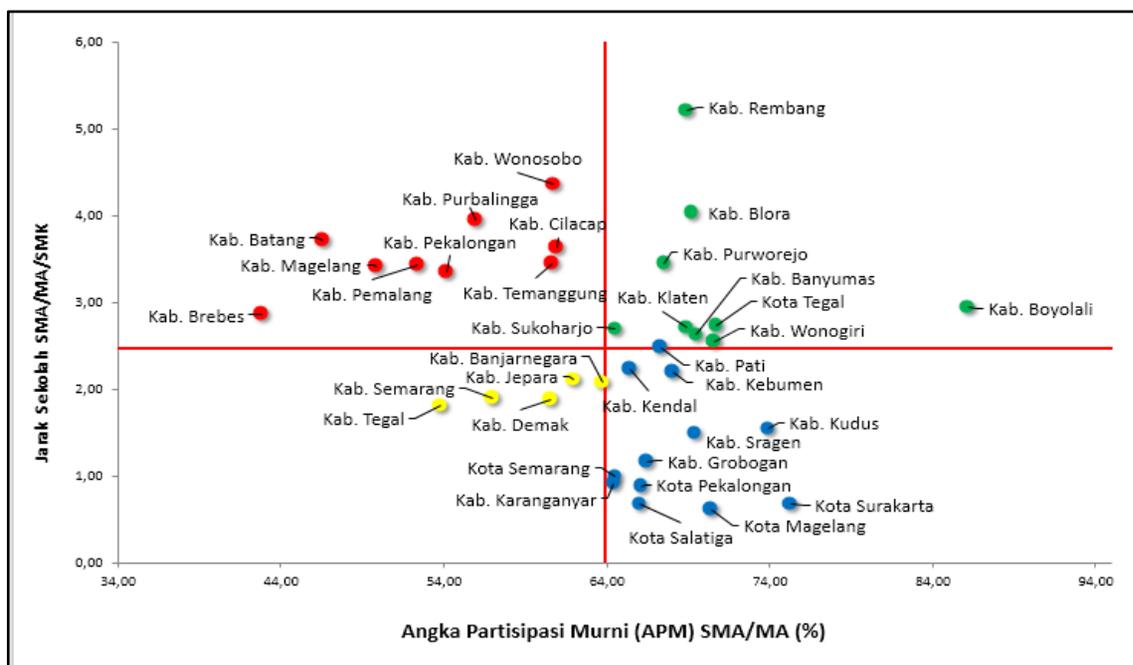
Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 4.4
Theory of Change untuk Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Jawa Tengah

3. Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Pendidikan

a. Prioritas Wilayah untuk mendekatkan akses dan memadainya sarpras pendidikan

Pemetaan wilayah prioritas untuk mendekatkan akses dan memadainya sarpras pada pendidikan SMA/MA/Sederajat dilakukan dengan menyandingkan variabel jarak SMA/MA/SMK terhadap Angka Partisipasi Murni di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar 4.5.



Sumber: Podes TNP2K 2018, diolah

Gambar 4.5
Pemetaan Wilayah untuk Mendekatkan Akses dan Memadainya Sarpras Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

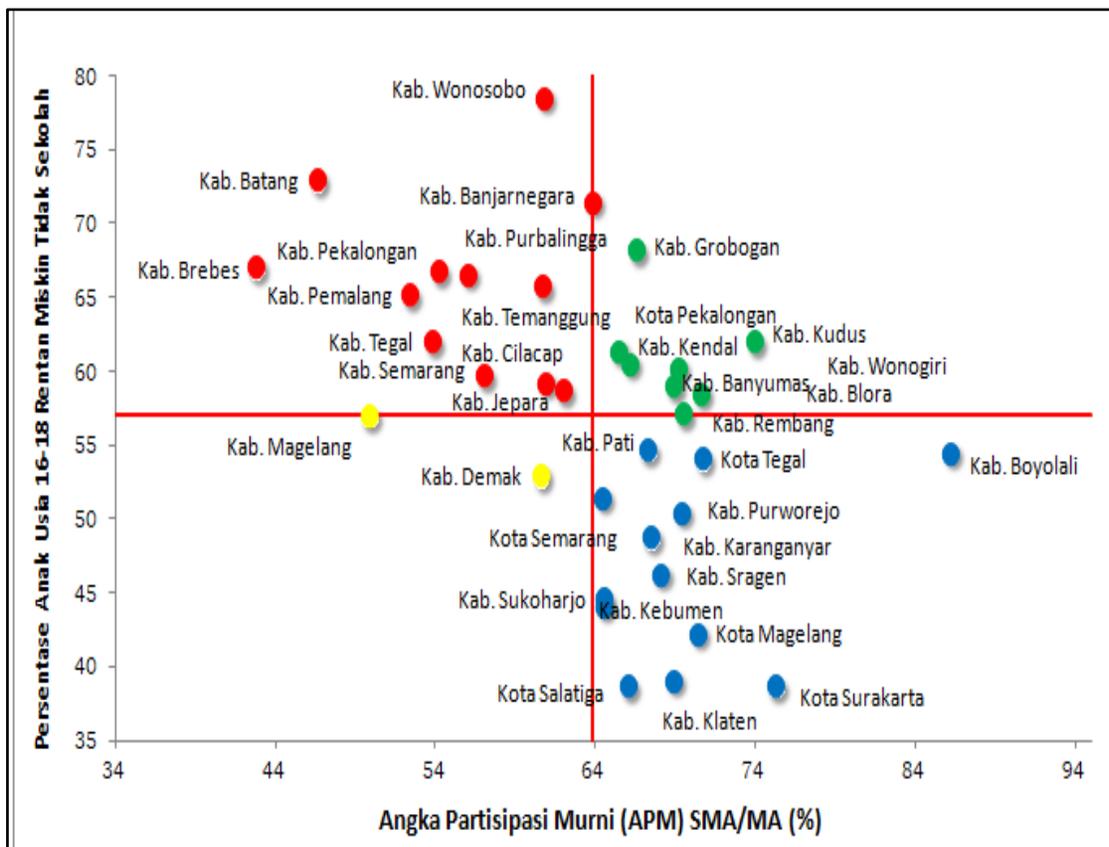
Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk mendekatkan akses dan memadainya sarpras pada pendidikan SMA/MA/Sederajat di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.1

Tabel 4.1
Prioritas Wilayah untuk Mendekatkan Akses dan Memadainya Sarpras Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Prioritas 1 (9 kab)	: Kabupaten Wonosobo, Purbalingga, Cilacap, Temanggung, Pekalongan, Pemalang, Magelang, Batang dan Brebes
Prioritas 2 (5 kab)	: Kabupaten Banjarnegara, Jepara, Demak, Semarang dan Tegal
Prioritas 3 (9 kab/kota)	: Kabupaten Blora, Purworejo, Banyumas, Boyolali, Wonogiri, Klaten, Sukoharjo dan Kota Tegal
Prioritas 4 (12 kab/kota)	: Kabupaten Pati, Kebumen, Kendal, Kudus, Grobogan, Karanganyar, Sragen, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Magelang dan Kota Salatiga

b. Prioritas Wilayah untuk Mengurangi Beban Pengeluaran Penduduk Miskin Untuk Mengikuti Pendidikan

Pemetaan wilayah prioritas untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin untuk mengikuti pendidikan dilakukan dengan menyandingkan variabel persentase anak usia 16-18 tahun rentan miskin tidak sekolah terhadap Angka Partisipasi Murni di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar 4.6.



Sumber: BDT PPFM & OTM 2018, diolah

Gambar 4.6
Pemetaan Wilayah untuk Mengurangi Beban Pengeluaran
Penduduk Miskin untuk Mengikuti Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin untuk mengikuti pendidikan di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.2.

Tabel 4.2
Prioritas Wilayah untuk Mengurangi Beban Pengeluaran
Penduduk Miskin untuk Mengikuti Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Prioritas 1 (12 kab)	: Kabupaten Batang, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, Temanggung, Cilacap, Jepara, Semarang, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Brebes.
Prioritas 2 (2 kab)	: Kabupaten Magelang dan Demak
Prioritas 3 (8 kab/kota)	: Kabupaten Grobogan, Kudus, Wonogiri, Banyumas, Blora, Rembang, Kendal dan Kota Pekalongan
Prioritas 4 (13 kab/kota)	: Kabupaten Boyolali, Purworejo, Pati, Karanganyar, Sragen, Kebumen, Klaten, Sukoharjo, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Surakarta dan Kota Salatiga.

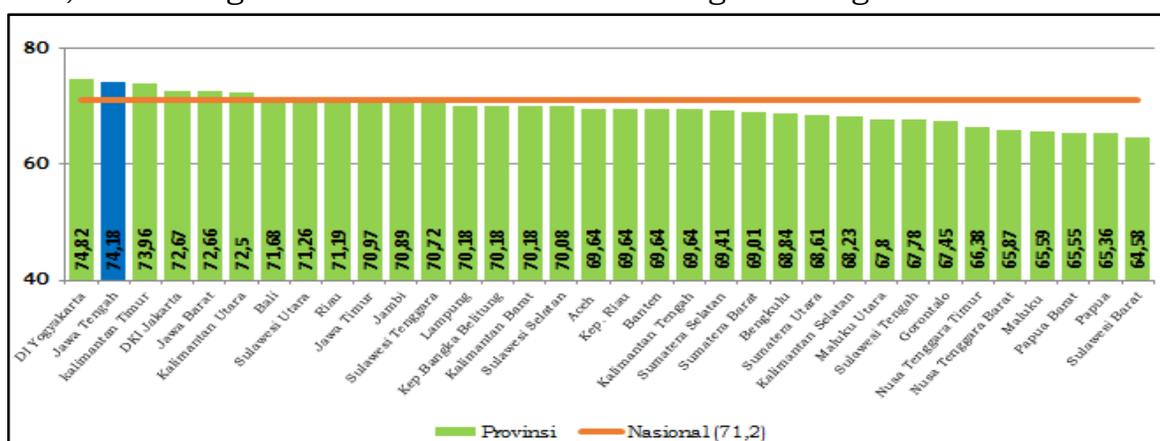
B. DIMENSI KESEHATAN

1. Masalah Utama Dimensi Kesehatan

Kemiskinan merupakan akar dari setiap persoalan kesehatan. Masyarakat miskin identik dengan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, perilaku dan kesadaran hidup sehat yang rendah, serta terbatasnya akses ke layanan kesehatan yang manusiawi. Semakin miskin dan kumuh sebuah komunitas masyarakat, bisa dipastikan derajat kesehatan mereka pun rendah, tak peduli mereka memiliki kartu berobat gratis atau tidak. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran dan inisiatif hidup sehat mereka akibat kualitas sumber daya manusia rendah.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin adalah dengan memperbaiki tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, akan semakin baik pula derajat kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat dapat diketahui dari capaian Umur Harapan Hidup (UHH). UHH mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk, dari sisi dimensi kesehatan masyarakat.

UHH di Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 74,18 tahun, lebih tinggi dari nasional (71,20 tahun). Jika dibandingkan dengan provinsi lain, Jawa Tengah berada di urutan ke-2 sebagaimana gambar 4.7.

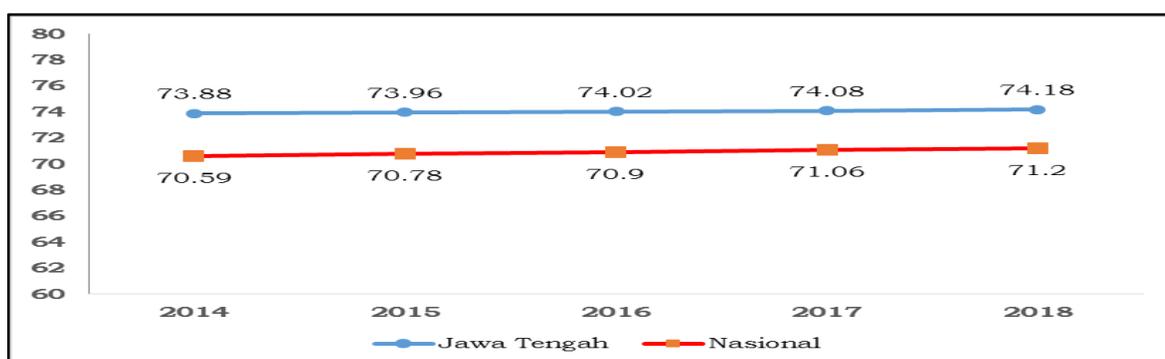


Sumber: BPS (data diolah), 2019

Gambar 4.7

Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Antar Provinsi Tahun 2018

Dalam perkembangannya Umur Harapan Hidup di Jawa Tengah konsisten meningkat dari 73,88 di tahun 2014 menjadi 74,18% di tahun 2018 sebagaimana gambar 4.8.



Sumber: BPS (data diolah), 2019

Gambar 4.8

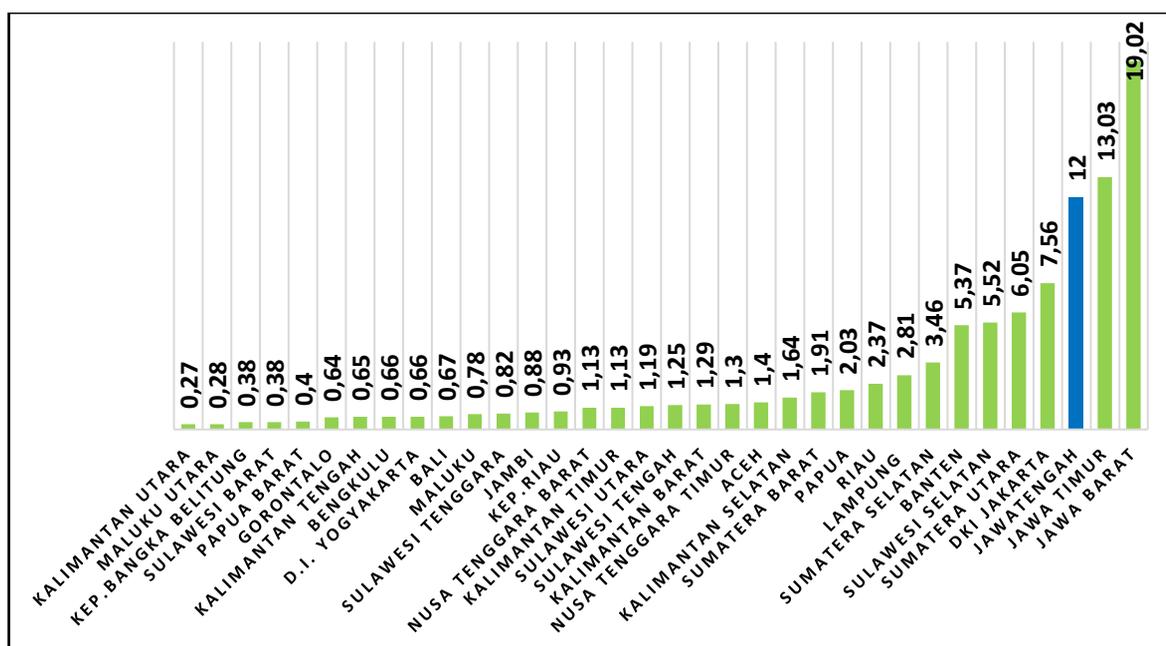
Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Di Jawa Tengah dan nasional Tahun 2014-2018

Gambar 4.8 menjelaskan bahwa meskipun angka UHH Jawa Tengah semakin meningkat, namun lajunya tidak signifikan hanya 0,07 poin lebih rendah dari nasional (0,15 poin).

Umur Harapan Hidup dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kondisi kesehatan seseorang, riwayat medis keluarga, faktor lingkungan, keadaan ekonomi, sosial, psikis, jenis kelamin, dan ras. Dalam rangka meningkatkan usia harapan hidup perlu difokuskan pada kondisi kesehatan masyarakat, faktor lingkungan dan kondisi sosial ekonomi.

Kesehatan masyarakat yang buruk seperti penderita penyakit menular (Tuberculosis dan HIV) dalam jangka panjang berdampak pada kondisi ekonomi penderita karena membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Keterbatasan sosial ekonomi juga mempengaruhi terhadap pengendalian penyakit karena tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan baik, kondisi tersebut juga berdampak pada tumbuh kembang anak. Di sisi lain pola hidup yang tidak bersih/sehat seperti tidak tersedianya jamban yang layak juga berpengaruh terhadap lemahnya pencegahan penyakit.

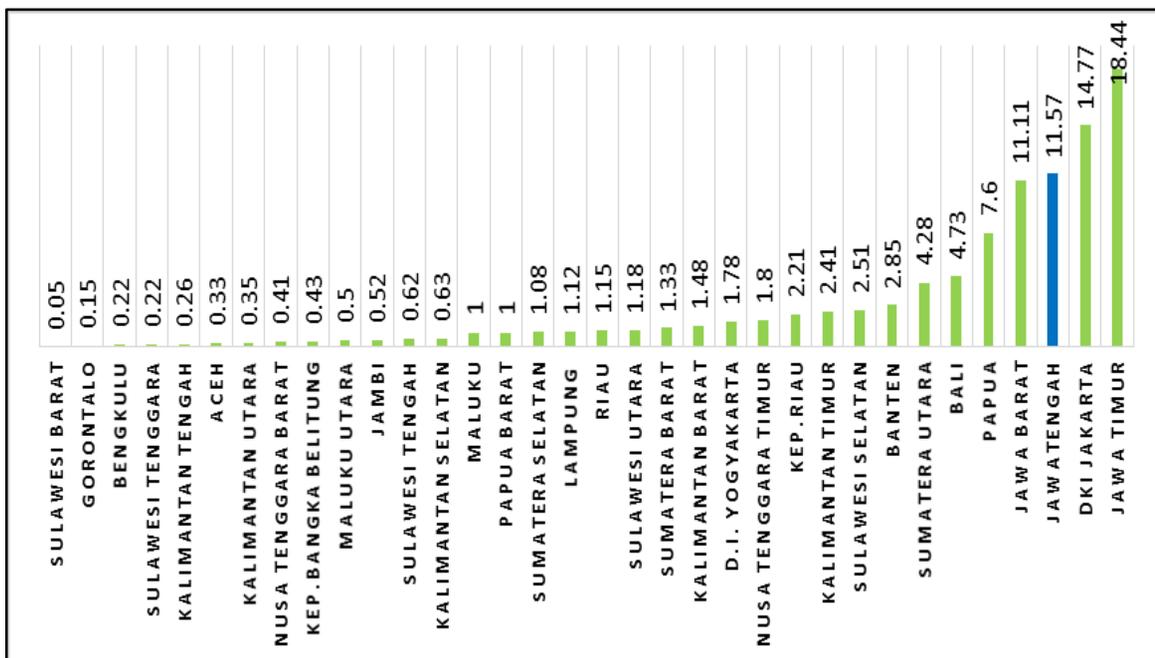
Penderita Tuberculosis di Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 67.941 orang atau 12 % dari total penderita di Indonesia (566.623 orang). Jika dibandingkan dengan provinsi lain, Jawa Tengah menjadi provinsi terbesar ke-3 penderita Tuberculosis di Indonesia, sebagaimana gambar 4.9.



Sumber: BPS (data diolah), 2018.

Gambar 4.9
Perbandingan Penderita Tuberculosis Antar Provinsi, Tahun 2018

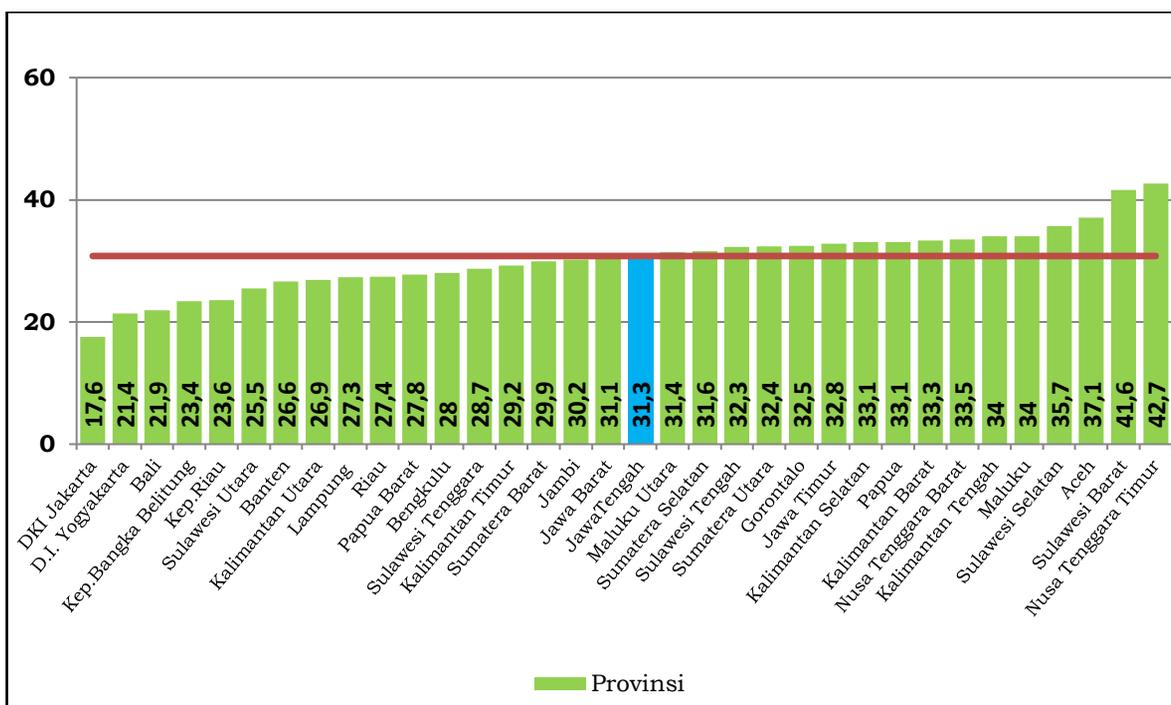
Penderita HIV pada tahun 2018 juga perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat karena pada tahun 2018 jumlahnya mencapai 5.400 orang atau 11,57 % dari total penderita di Indonesia (46.659 orang). Jika dibandingkan dengan provinsi lain, Jawa Tengah menjadi provinsi terbesar ke-3 dengan jumlah penderita HIV, sebagaimana gambar 4.10.



Sumber: BPS (data diolah), 2018.

Gambar 4.10
Perbandingan Penderita HIV Antar Provinsi, Tahun 2018

Faktor lain yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan pencegahan kondisi stunting. Penderita Stunting pada anak usia 0-59 bulan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 31,30% lebih tinggi dibandingkan Nasional (30,8%) sebagaimana gambar 4.11.



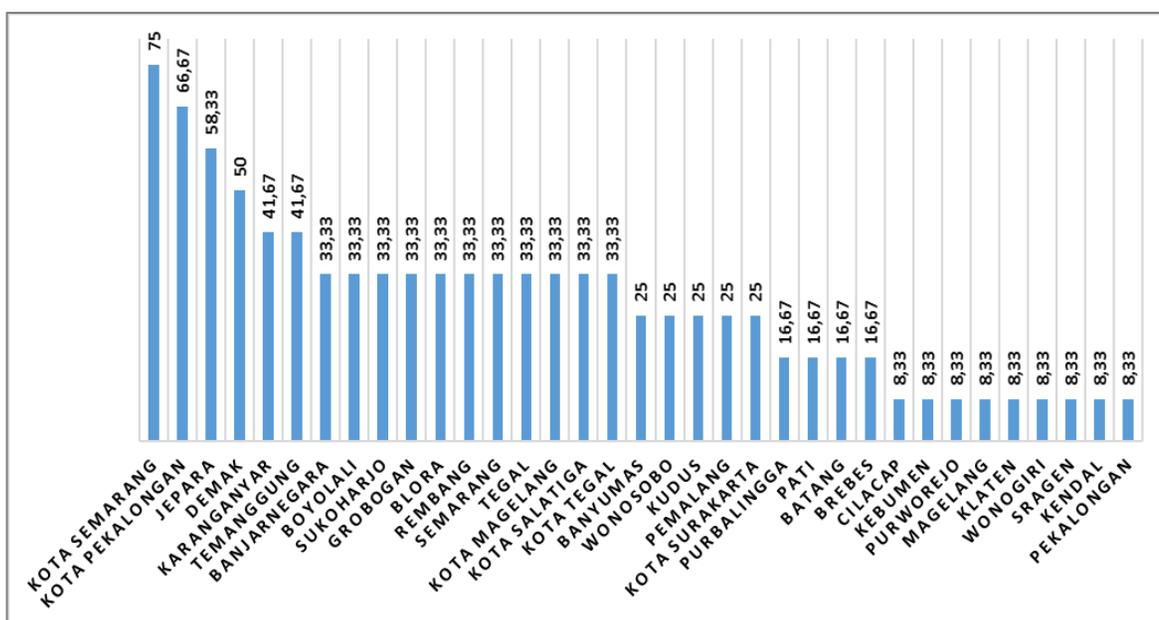
Sumber: BPS (data diolah), 2018.

Gambar 4.11
Perbandingan Penderita Stunting (TB/U) antar Provinsi pada Anak Usia 0-59 Bulan, Tahun 2018

Berdasarkan gambaran kondisi tersebut, masalah tingginya penderita Tuberculosis dan HIV serta tingginya prosentase stunting anak usia 0-59 bulan menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat yang diindikasikan dengan meningkatnya umur harapan hidup.

Selain itu, pelaksanaan SPM juga menjadi prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Indikator SPM bidang kesehatan sebanyak 14 indikator, terdiri dari 2 indikator yang menjadi kewenangan provinsi dan 12 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Capaian SPM kesehatan untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 masih cukup rendah, sebagaimana gambar 4.12



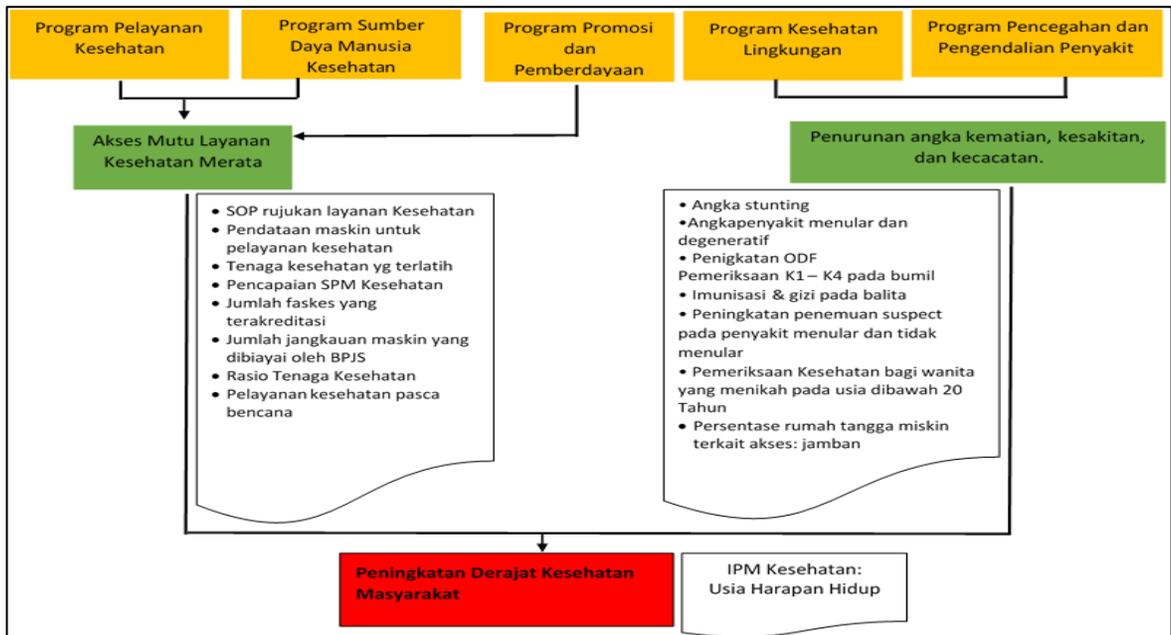
Sumber: Dinkes Prov. Jateng (data diolah), 2018.

Gambar 4.12
Capaian SPM Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2018

2. Prioritas Intervensi Dimensi Kesehatan

Penanganan masalah kemiskinan pada dimensi kesehatan difokuskan pada masalah tingginya penderita Tuberculosis dan HIV, tingginya prosentase stunting anak usia 0-59 bulan dan rendahnya capaian SPM kesehatan di kabupaten/kota. Intervensi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan diharapkan dapat memperbaiki indikator tersebut, menjadikannya prioritas dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah penyelenggara layanan dalam bidang kesehatan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Logika program (*theory of change*) yang disusun menjelaskan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, didukung dengan : 1) meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan yang merata; 2) menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan, sebagaimana gambar 4.13.



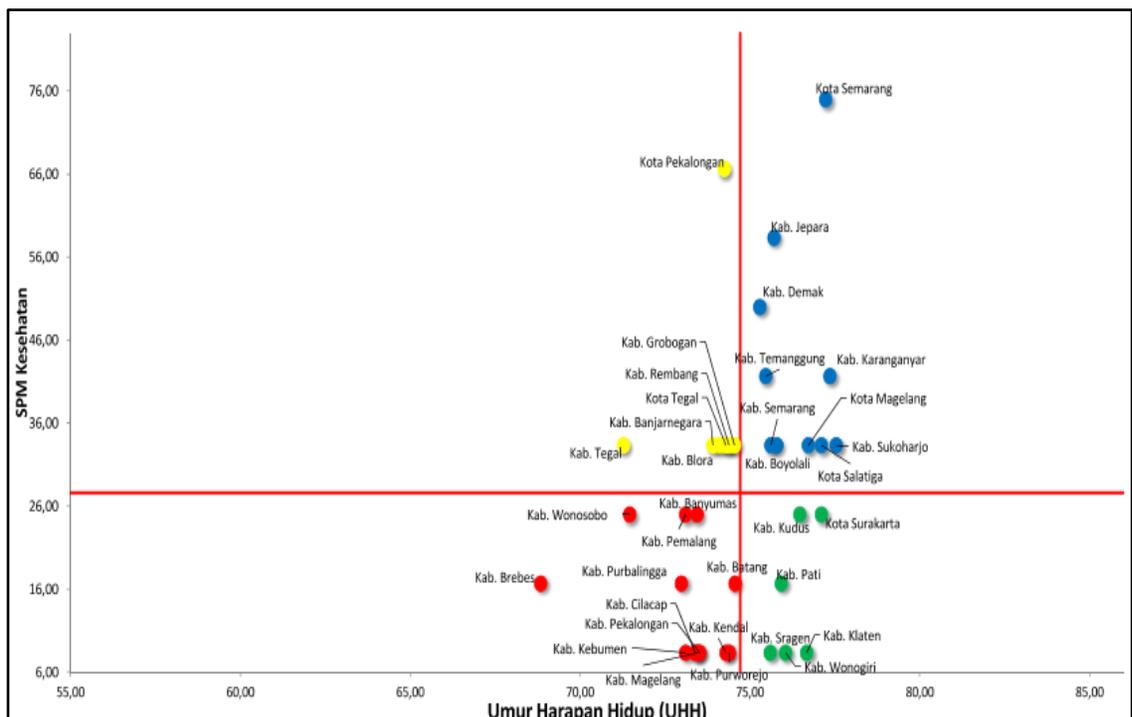
Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 4.13
Theory Of Change untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah

3. Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Kesehatan.

a. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Akses Mutu Pelayanan Kesehatan yang Merata

Pemetaan wilayah prioritas untuk meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan yang merata dilakukan dengan menyandingkan usia harapan hidup terhadap SPM di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar 4.14.



Sumber: Dinkes Prov. Jateng & BPS, diolah

Gambar 4.14
Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Akses Mutu Pelayanan Kesehatan yang Merata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

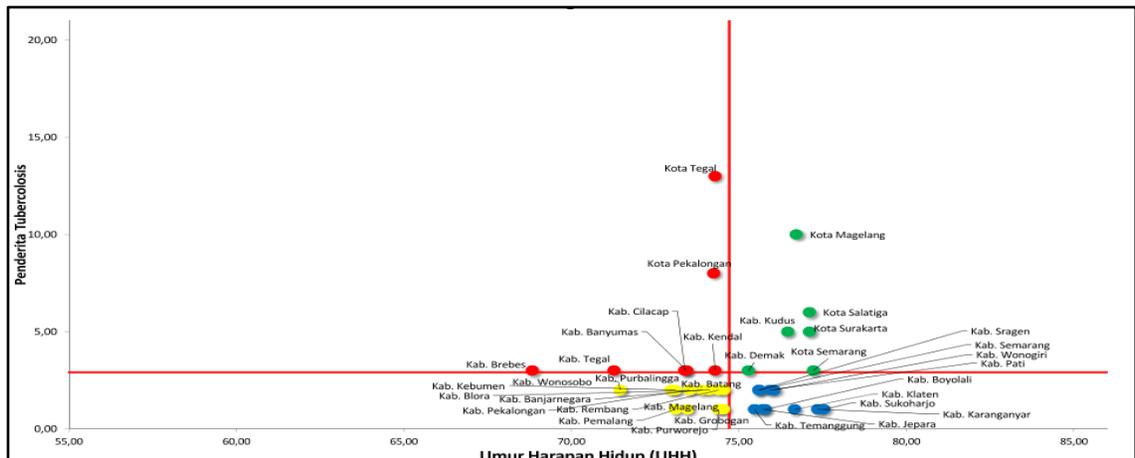
Berdasarkan gambar 4.14 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan yang merata di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.3.

Tabel 4.3
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Akses Mutu Pelayanan Kesehatan yang Merata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Prioritas 1 (12 kab)	: Kabupaten Banyumas, Pemalang, Wonosobo, Brebes, Purbalingga, Batang, Cilacap, Pekalongan, Kebumen, Magelang, Kendal, dan Purworejo.
Prioritas 2 (7 kab)	: Kabupaten Grobogan, Rembang, Banjarnegara, Tegal, Blora, Kota Pekalongan, dan Tegal..
Prioritas 3 (6 kab)	: Kabupaten Kudus, Pati, Sragen, Wonogiri, Klaten, dan Kota Surakarta.
Prioritas 4 (10 Kab/Kota)	: Kabupaten Jepara, Demak, Temanggung, Karanganyar, Semarang, Sukoharjo, Boyolali, dan Kota Semarang, Salatiga, Magelang.

b. Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kematian, Kesakitan dan Kecacatan (terutama untuk mengendalikan penyebaran TB, HIV dan mengurangi stunting)

Pemetaan wilayah prioritas untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan melalui pengendalian penyebaran TB dilakukan dengan menyandingkan jumlah penderita tuberculosis dengan Umur Harapan Hidup (UHH) di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut.



Sumber: Dinkes Prov. Jateng & BPS, diolah

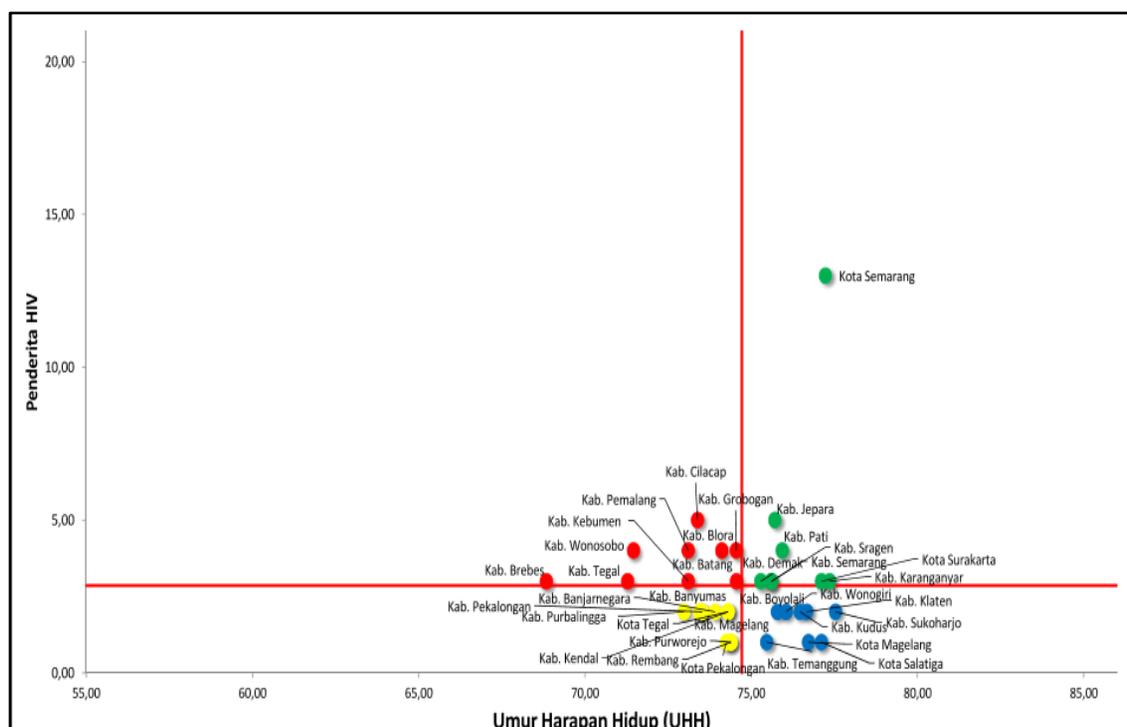
Gambar 4.15
Pemetaan Wilayah untuk Menurunkan Angka Kematian dan Kesakitan Penderita Tuberculosis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan gambar 4.15 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan penderita Tuberculosis di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.4.

Tabel 4.4
Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kematian dan Kesakitan Penderita Tuberculosis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Prioritas 1 (7 kab/ kota)	: Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kendal, Brebes, Tegal, Kota Tegal, dan Pekalongan.
Prioritas 2 (6 Kab/Kota)	: Kabupaten Wonosobo, Purbalingga, Batang, Blora, Banjarnegara, Pekalongan, Rembang, Pemalang, Magelang, Grobogan dan Purworejo.
Prioritas 3 (6 Kab/ Kota)	: Kabupaten Kudus, Demak, Kota Magelang, Salatiga, Surakarta, dan Semarang
Prioritas 4 (10 kab)	: Kabupaten Sragen, Semarang, Wonogiri, Pati, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Temanggung, dan Jepara.

Pemetaan wilayah prioritas untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan melalui pengendalian penyebaran HIV dilakukan dengan menyandingkan jumlah penderita HIV dengan umur harapan hidup (UHH) di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut.



Sumber: Dinkes Prov. Jateng & BPS, diolah

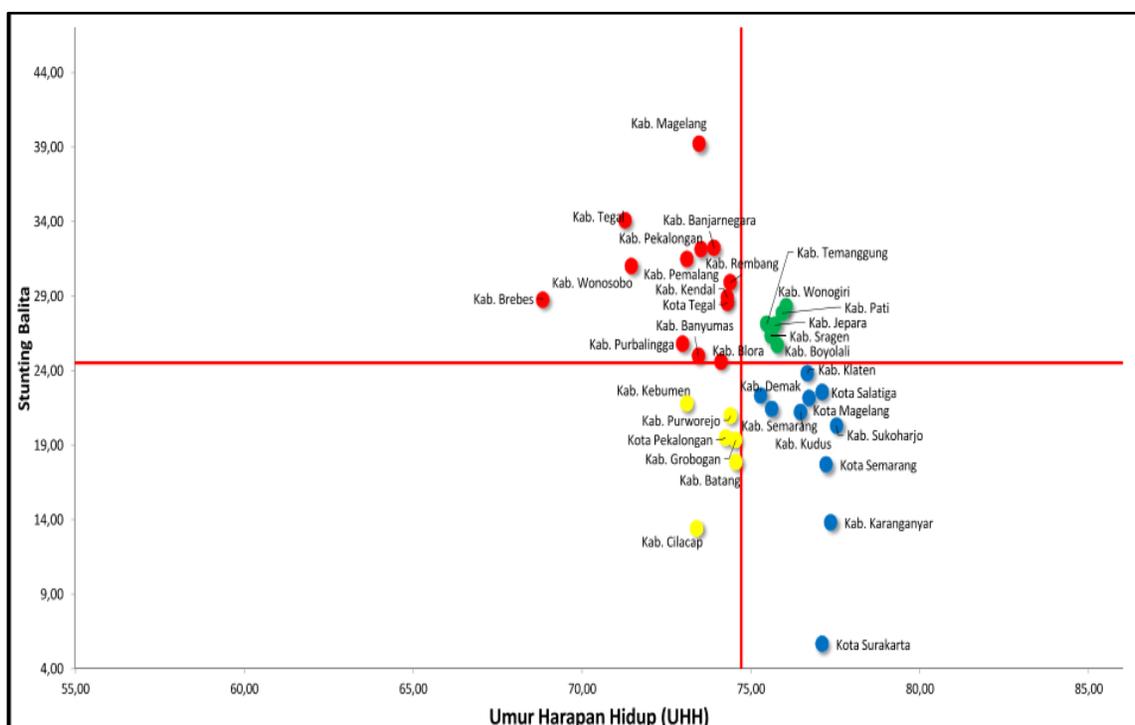
Gambar 4.16
Pemetaan Wilayah untuk Menurunkan Angka Kematian dan Kesakitan Penderita HIV di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan gambar 4.16 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi angka kematian dan kesakitan pada penderita HIV di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.5.

Tabel 4.5
Prioritas Wilayah Untuk Menurunkan Angka Kematian dan Kesakitan Penderita HIV di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Prioritas 1 (9 Kab)	: Kabupaten Cilacap, Grobogan, Pemalang, Kebumen, Wonosobo, Brebes, Tegal, Blora, dan Batang.
Prioritas 2 (10 Kab/Kota)	: Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Pekalongan, Purbalingga, Magelang, Purworejo, Kendal, Rembang, Kota Tegal, dan Pekalongan.
Prioritas 3 (8 kab)	: Kabupaten Jepara, Pati, Demak, Sragen, Semarang, Karanganyar, Kota Semarang, dan Surakarta.
Prioritas 4 (8 Kab/ Kota)	: Kabupaten Boyolali, Wonogiri, Kudus, Klaten, Sukoharjo, Temanggung, Kota Magelang dan Salatiga.

Pemetaan wilayah prioritas untuk menurunkan angka kesakitan dan kecacatan melalui penanganan stunting dilakukan dengan menyandingkan jumlah penderita balita stunting dengan umur harapan hidup (UHH) di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut.



Sumber: Dinkes Prov. Jateng & BPS, diolah

Gambar 4.17
Pemetaan Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan dan Kecacatan Penderita Balita Stunting di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan gambar 4.17 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi angka kesakitan dan kecacatan pada penderita Balita Stunting di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.6.

Tabel 4.6
Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan dan Kecacatan Penderita Balita Stunting di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Prioritas 1 (13 Kab/Kota)	: Kabupaten Magelang, Tegal, Banjarnegara, Pekalongan, Rembang, Pemalang, Wonosobo, Brebes, Kendal, Banyumas, Purbalingga, Blora, dan Kota Tegal.
Prioritas 2 (6 Kab)	: Kabupaten Kebumen, Purworejo, Pekalongan, Grobogan, Batang, dan Cilacap.
Prioritas 3 (6 Kab)	: Kabupaten Temanggung, Wonogiri, Pati, Jepara, Sragen, dan Boyolali.
Prioritas 4 (10 Kab/ Kota)	: Kabupaten Klaten, Demak, Semarang, Kudus, Sukoharjo, Karanganyar, Kota Magelang, Salatiga, Semarang, dan Surakarta.

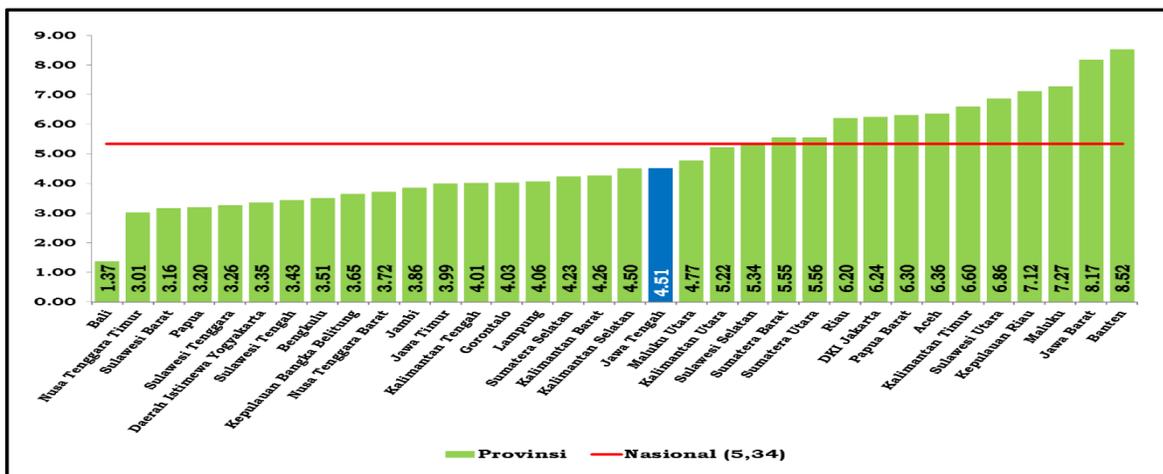
C. DIMENSI KETENAGAKERJAAN

1. Masalah Utama Dimensi Ketenagakerjaan

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua permasalahan yang berkaitan. Pengangguran dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Tingkat pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan (namun ingin bekerja), yang diperoleh melalui survei angkatan kerja nasional (Sakernas). Indikator tingkat pengangguran yang paling sering digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang diartikan sebagai tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran umumnya terjadi karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, lapangan kerja yang ada tidak mampu untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Akses terhadap pekerjaan yang layak masih menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pemenuhan pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja khususnya pengangguran di Jawa Tengah.

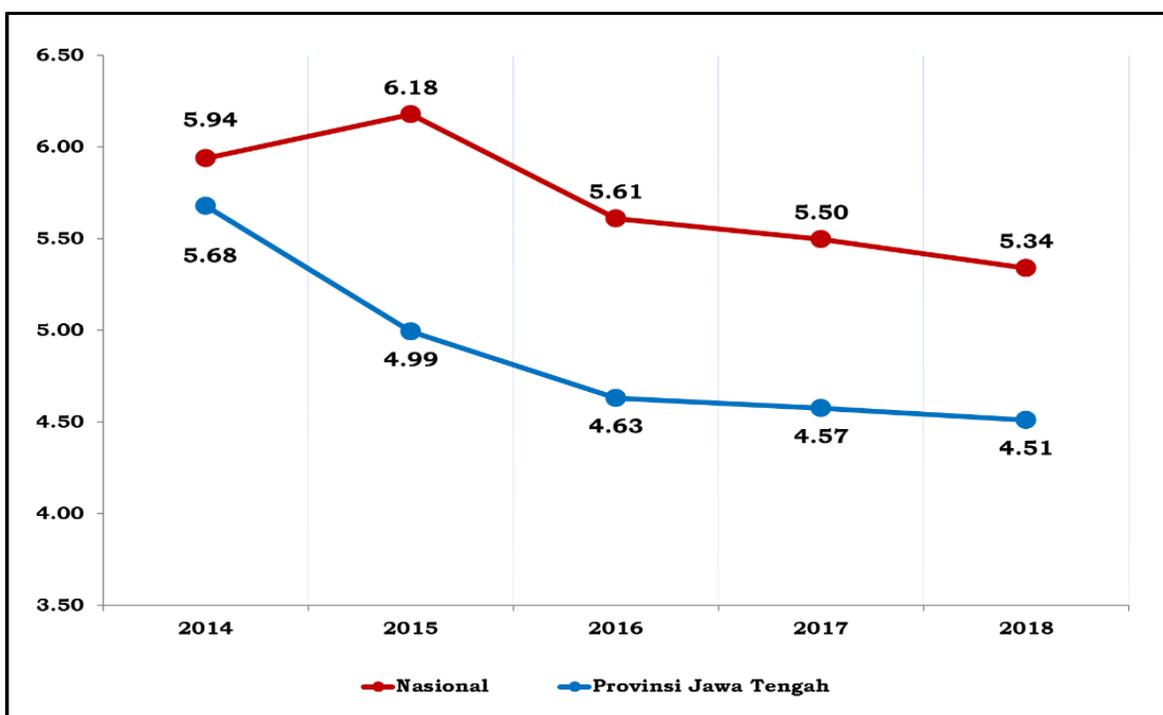
Pentingnya akses terhadap pekerjaan yang layak di Jawa Tengah dapat dilihat dari capaian indikator utama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018 sebesar 4,51%, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,34%, berada di urutan nomor 19 secara nasional sebagaimana gambar 4.18.



Sumber: BPS, Tahun 2018, diolah

Gambar 4.18
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antar Provinsi Tahun 2018 (%)

Perkembangan TPT Jawa Tengah pada tahun 2014-2018 konsisten membaik, lebih rendah dibandingkan nasional. TPT turun dari sebesar 5,68% pada tahun 2014 menjadi sebesar 4,51% pada tahun 2018. Laju penurunan TPT Jawa Tengah tertinggi terjadi pada Tahun 2015 sebesar 0,69 persen poin sebagaimana gambar 4.19.

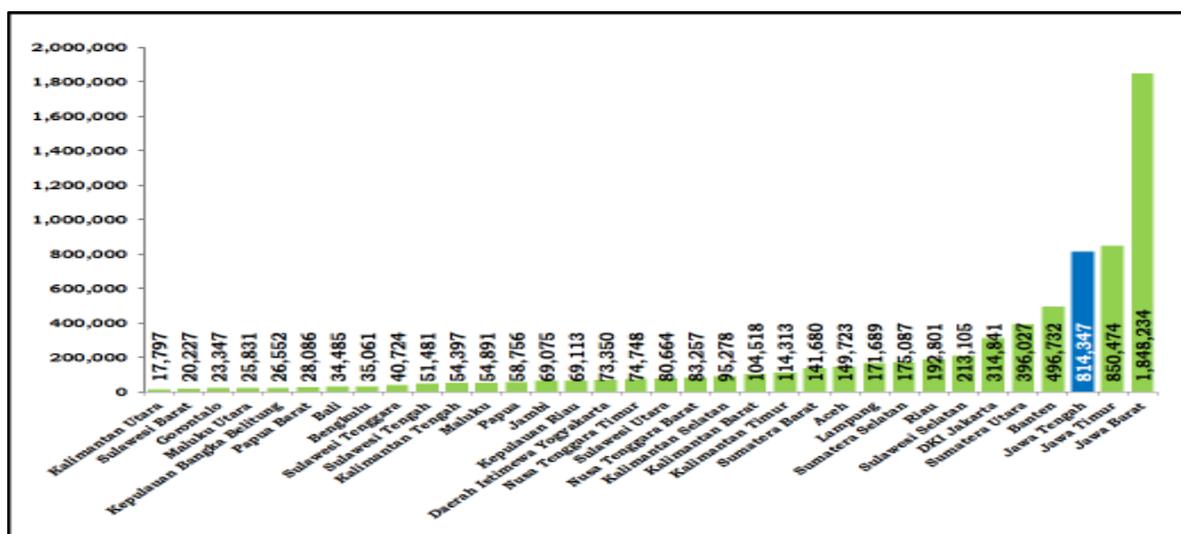


Sumber: BPS, Tahun 2014 - 2018, diolah

Gambar 4.19
Perkembangan TPT Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2014 - 2018

Berdasarkan gambar 4.19 diketahui bahwa rata-rata penurunan TPT selama kurun waktu tahun 2014–2018 sebesar 0,28 persen. Namun demikian lajunya semakin melambat khususnya pada 2 tahun terakhir, dengan laju hanya 0,06 persen.

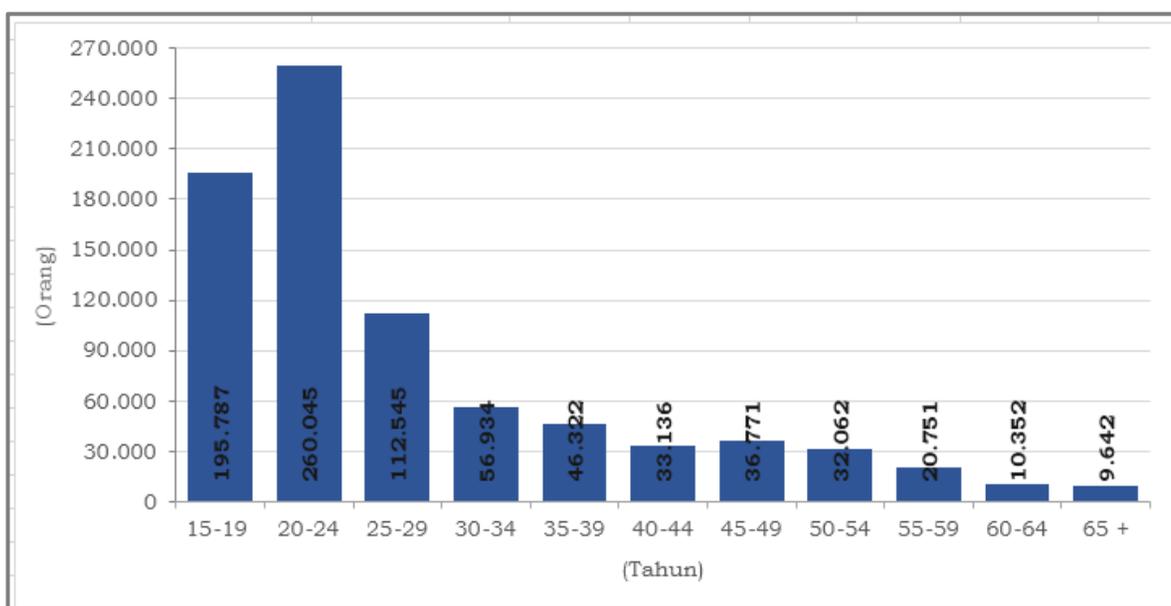
Walaupun TPT Jawa Tengah menurun, namun secara absolut terbesar ke-3 setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Hal ini memerlukan upaya penanganan yang lebih optimal. Perbandingan jumlah pengangguran terbuka antar provinsi, sebagaimana gambar 4.20.



Sumber: BPS, Tahun 2018, diolah

Gambar 4.20
Perbandingan Jumlah Pengangguran Terbuka
Antar Provinsi Tahun 2018

Berdasarkan jumlah tersebut pada gambar 4.20 pengangguran terbuka di Jawa Tengah, Apabila dilihat dari kelompok umur jumlah pengangguran terbuka paling banyak berada pada kelompok umur 20-24 tahun sebagaimana gambar 4.21.

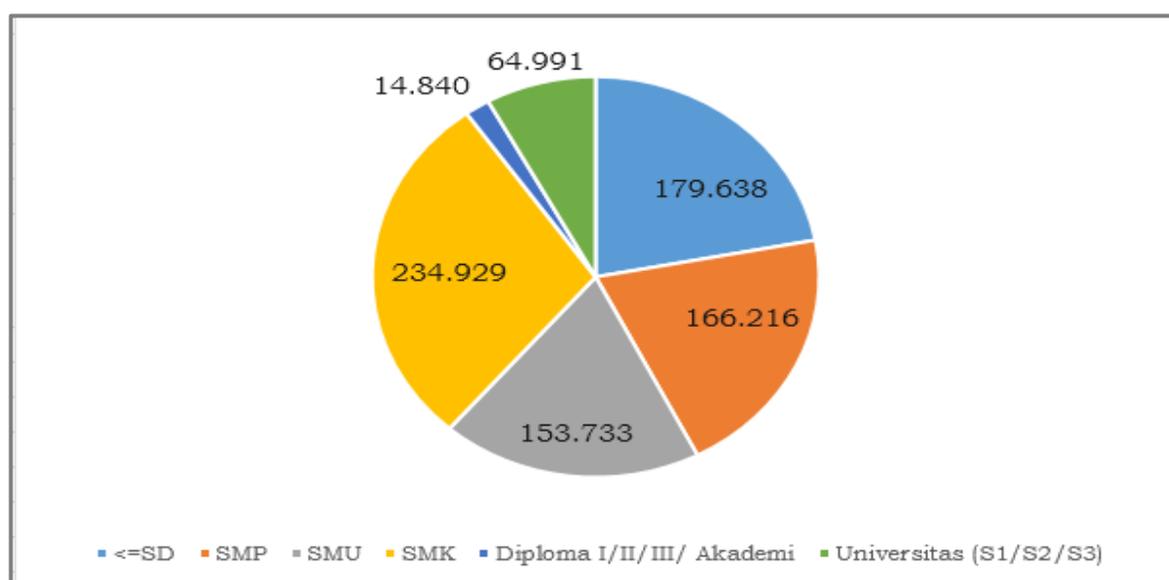


Sumber: BPS Sakernas Tahun 2018, diolah

Gambar 4.21
Pengangguran Terbuka menurut Kelompok Umur
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran terbuka paling banyak dari lulusan SMK (234.929 orang)

dibandingkan dengan lulusan pendidikan lainnya, sebagaimana gambar 4.22



Sumber: BPS Sakernas Tahun 2018, diolah

Gambar 4.22
Perbandingan Jumlah Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jawa Tengah Tahun 2018

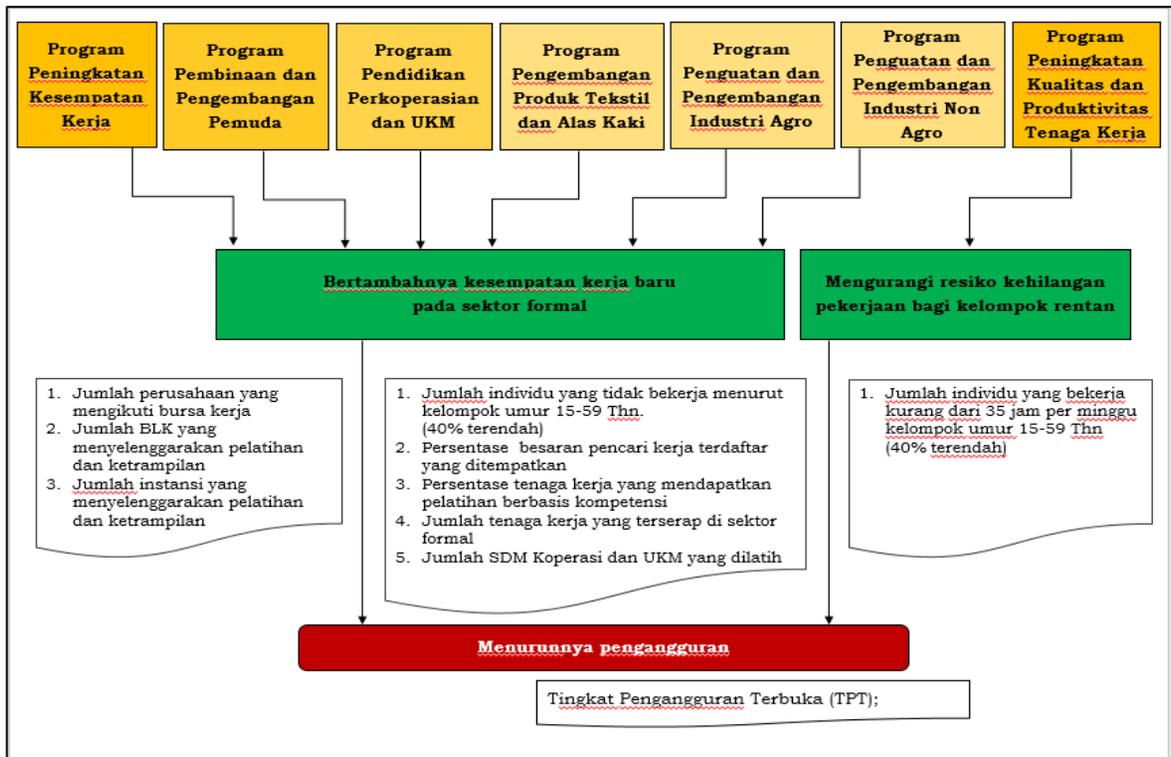
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian Pemerintah, lulusan SMK yang dipersiapkan sebagai tenaga kerja siap pakai namun belum sepenuhnya terserap di dunia kerja, sehingga diperlukan *link and match* antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Berdasarkan gambaran diatas, masalah utama kemiskinan pada dimensi ketenagakerjaan adalah tingginya jumlah pengangguran terbuka di Jawa Tengah, sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu menurunnya pengangguran.

2. Prioritas Intervensi Dimensi Ketenagakerjaan

Penanganan masalah utama bidang ketenagakerjaan di Jawa Tengah dalam rangka penanggulangan kemiskinan difokuskan pada penurunan pengangguran. Intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memperbaiki indikator utama tingkat pengangguran terbuka menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah penyelenggara layanan dalam bidang ketenagakerjaan dan perangkat daerah yang terkait, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Logika program (*theory of change*) yang disusun menjelaskan bahwa menurunkan pengangguran didukung dengan : 1) bertambahnya kesempatan kerja baru pada sektor formal; dan 2) mengurangi resiko kehilangan pekerjaan bagi kelompok rentan, sebagaimana gambar 4.23.



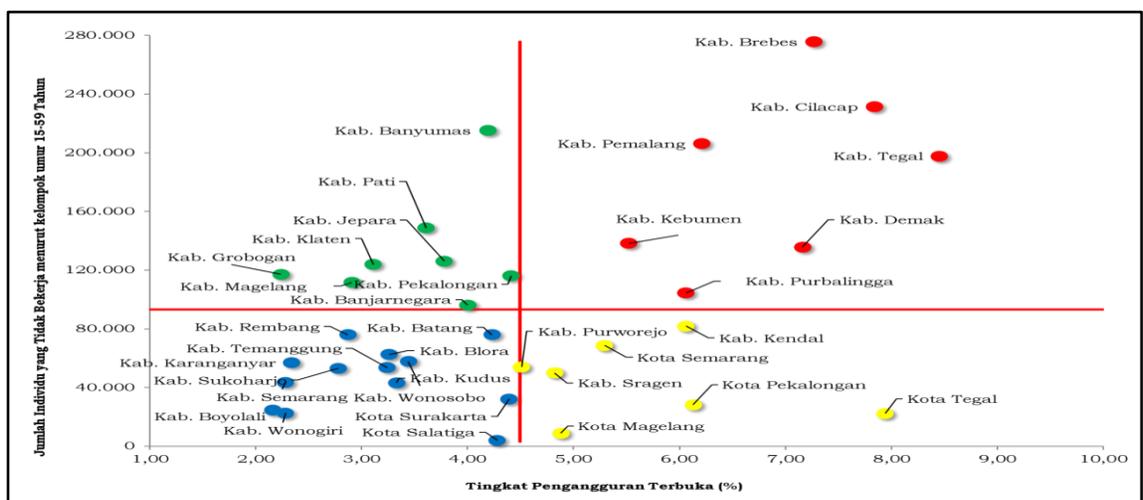
Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 4.23
Theory of Change (ToC) untuk Menurunnya Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah

3. Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Ketenagakerjaan

a. Prioritas Wilayah untuk Menambah Kesempatan Kerja Baru pada Sektor Formal (melalui Bursa Kerja dan Wirausaha Baru)

Pemetaan wilayah prioritas untuk menambah kesempatan kerja baru pada sektor formal melalui bursa kerja dilakukan dengan menyandingkan variabel jumlah individu yang tidak bekerja menurut kelompok umur 15-59 tahun terhadap TPT di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran sebagaimana gambar 4.24



Sumber: BPS Prov. Jateng dan Data Terpadu PPFM & OTM, 2019, diolah

Gambar 4.24
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Menambah Kesempatan Kerja Baru pada Sektor Formal melalui Bursa Kerja di Jawa Tengah Tahun 2018

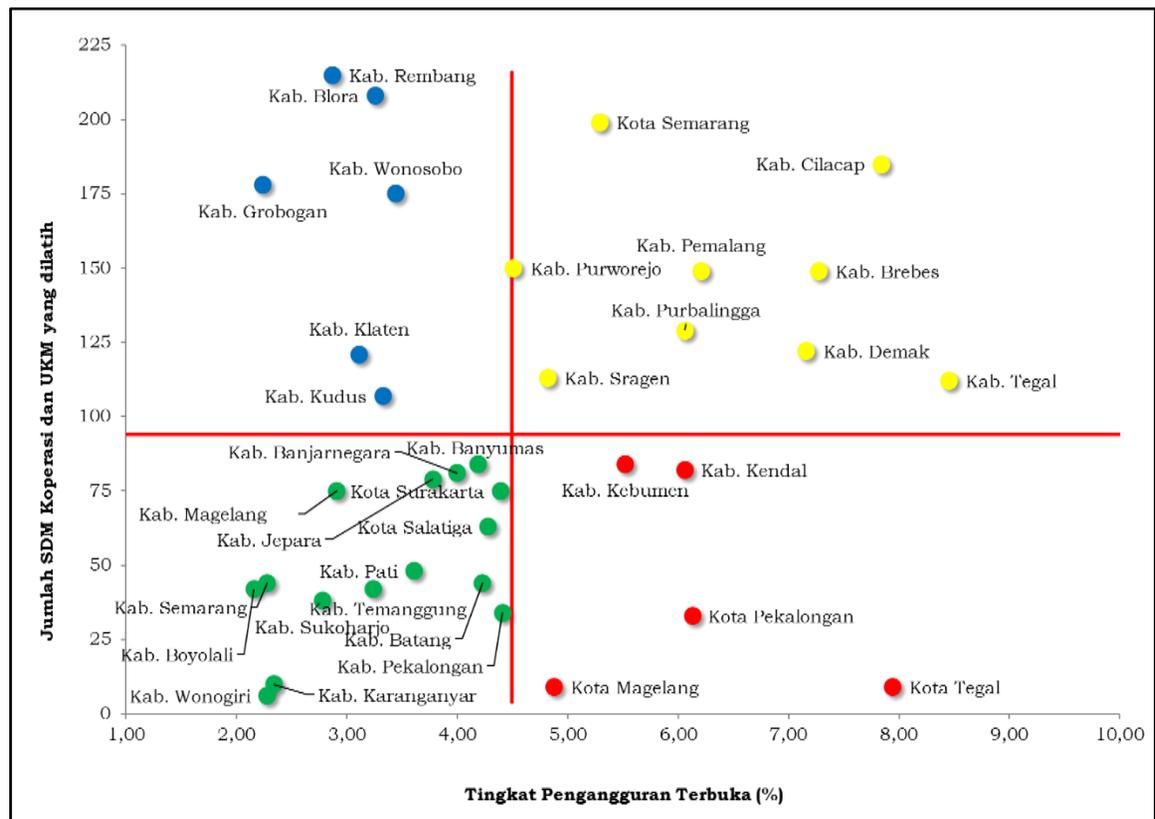
Berdasarkan Gambar 4.24 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk menambah kesempatan kerja baru pada sektor formal melalui bursa kerja di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.7.

Tabel 4.7

Prioritas Wilayah Intervensi untuk Menambah Kesempatan Kerja Baru melalui Bursa Kerja pada Sektor Formal di Jawa Tengah Tahun 2018

Prioritas 1 (7 kab)	: Kabupaten Tegal, Cilacap, Demak, Brebes, Pemalang, Purbalingga, dan Kebumen.
Prioritas 2 (7 kab/kota)	: Kabupaten Kendal, Sragen, Purworejo, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Semarang.
Prioritas 3 (8 kab)	: Kabupaten Pekalongan, Banyumas, Banjarnegara, Jepara, Pati, Klaten, Magelang, dan Grobogan.
Prioritas 4 (13 kab/kota)	: Kabupaten Batang, Blora, Kudus, Wonosobo, Rembang, Temanggung, Karanganyar, Sukoharjo, Semarang, Boyolali, Wonogiri, Kota Surakarta, dan Kota Salatiga.

Pemetaan wilayah prioritas untuk menambah kesempatan kerja baru pada sektor formal melalui wirausaha baru dilakukan dengan menyandingkan variabel jumlah SDM koperasi dan UKM yang dilatih terhadap TPT di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran sebagaimana gambar 4.25.



Sumber: BPS Prov. Jateng dan Dinkop & UKM Prov. Jateng, diolah

Gambar 4.25

Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Menambah Kesempatan Kerja Baru pada Sektor Formal melalui Wirausaha Baru di Jawa Tengah Tahun 2018

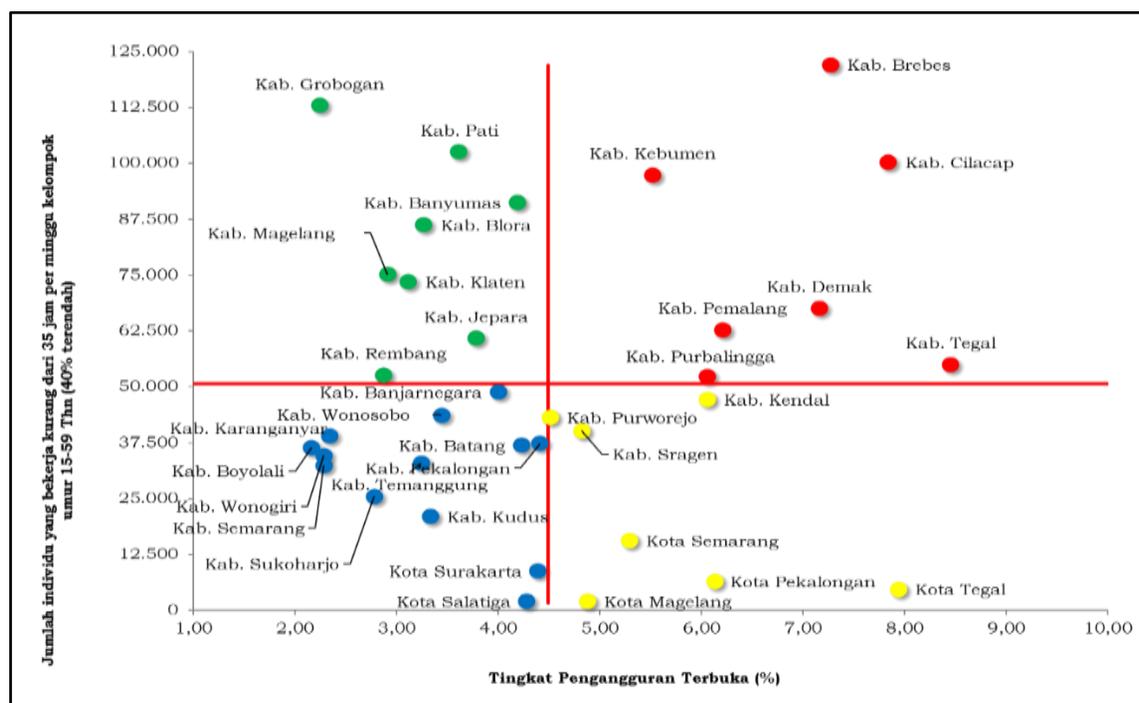
Berdasarkan Gambar 4.25 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk bertambahnya kesempatan kerja baru pada sektor formal melalui wirausaha baru di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.8

Tabel 4.8
Prioritas Wilayah Intervensi untuk Menambah Kesempatan Kerja Baru pada Sektor Formal melalui wirausaha baru di Jawa Tengah Tahun 2018

Prioritas 1 (5 kab/kota)	: Kabupaten Kendal, Kebumen, Kota Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Magelang.
Prioritas 2 (9 kab/kota)	: Kabupaten Tegal, Demak, Brebes, Cilacap, Pemalang, Purbalingga, Sragen, Purworejo, dan Kota Semarang.
Prioritas 3 (15 kab/kota)	: Kabupaten Banyumas, Temanggung, Batang, Pati, Pekalongan, Karanganyar, Sukoharjo, Banjarnegara, Jepara, Magelang, Semarang, Boyolali, Wonogiri, Kota Surakarta, dan Kota Salatiga.
Prioritas 4 (6 kab)	: Kabupaten Wonosobo, Rembang, Blora, Klaten, Kudus, Grobogan.

b. Prioritas Wilayah untuk Mengurangi Resiko Kehilangan Pekerjaan bagi Kelompok Rentan

Pemetaan wilayah prioritas untuk mengurangi resiko kehilangan pekerjaan bagi kelompok rentan melalui peningkatan keterampilan, dilakukan dengan menyandingkan variabel jumlah individu yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu kelompok umur 15-59 tahun terhadap TPT di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran sebagaimana gambar 4.26



Sumber: BPS Prov. Jateng dan Data Terpadu PPFM &OTM, diolah

Gambar 4.26
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Mengurangi Resiko Kehilangan Pekerjaan Bagi Kelompok Rentan melalui Peningkatan Keterampilan di Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 4.26 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk mengurangi resiko kehilangan pekerjaan bagi kelompok rentan melalui peningkatan keterampilan, di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.9.

Tabel 4.9

Prioritas Wilayah Intervensi untuk Mengurangi Resiko Kehilangan Pekerjaan Bagi Kelompok Rentan melalui Peningkatan Keterampilan di Jawa Tengah Tahun 2018

Prioritas 1 (7 kab)	: Kabupaten Tegal, Cilacap, Brebes, Demak, Pemalang, Purbalingga, dan Kebumen.
Prioritas 2 (7 kab/kota)	: Kabupaten Kendal, Sragen, Purworejo, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Magelang.
Prioritas 3 (8 kab)	: Kabupaten Banyumas, Blora, Jepara, Klaten, Pati, Rembang, Magelang, Grobogan.
Prioritas 4 (13 kab/kota)	: Kabupaten Batang, Pekalongan, Banjarnegara, Wonosobo, Karanganyar, Boyolali, Wonogiri, Semarang, Sukoharjo, Kudus, Temanggung, Kota Surakarta, dan Kota Salatiga

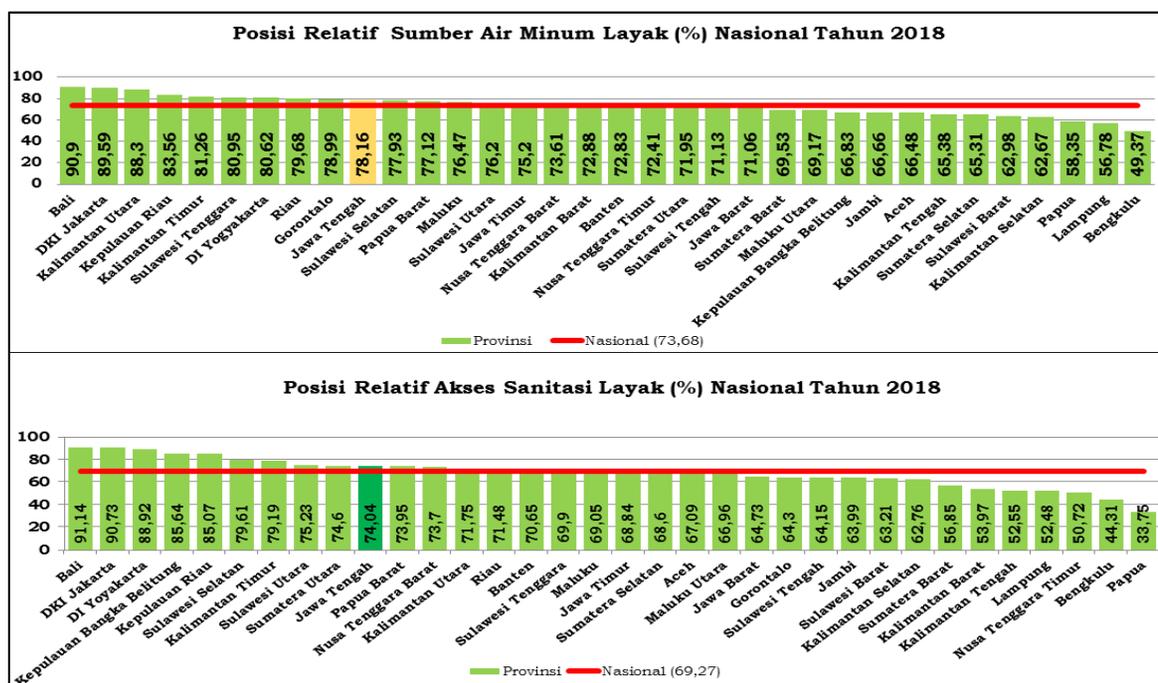
D. DIMENSI INFRASTRUKTUR DASAR

1. Masalah Utama Dimensi Infrastruktur Dasar

Peningkatan akses layanan infrastruktur dasar (air minum layak, sanitasi layak dan elektrifikasi) masih menjadi perhatian Pemerintah sejalan dengan upaya pemenuhan akses untuk semua lapisan masyarakat. Peningkatan akses layanan infrastruktur dasar menunjukkan masyarakat yang semakin sejahtera.

Secara umum dalam jangka panjang, tantangan utama pemenuhan akses infrastruktur dasar di Jawa Tengah berada pada akses air minum dan sanitasi layak karena berkaitan langsung dengan pola hidup bersih dan sehat. Hal ini didasarkan kondisi bahwa pada tahun 2018 rasio elektrifikasi telah mencapai 99%, sedangkan akses terhadap air minum dan sanitasi layak khususnya bagi rumah tangga miskin masih rendah.

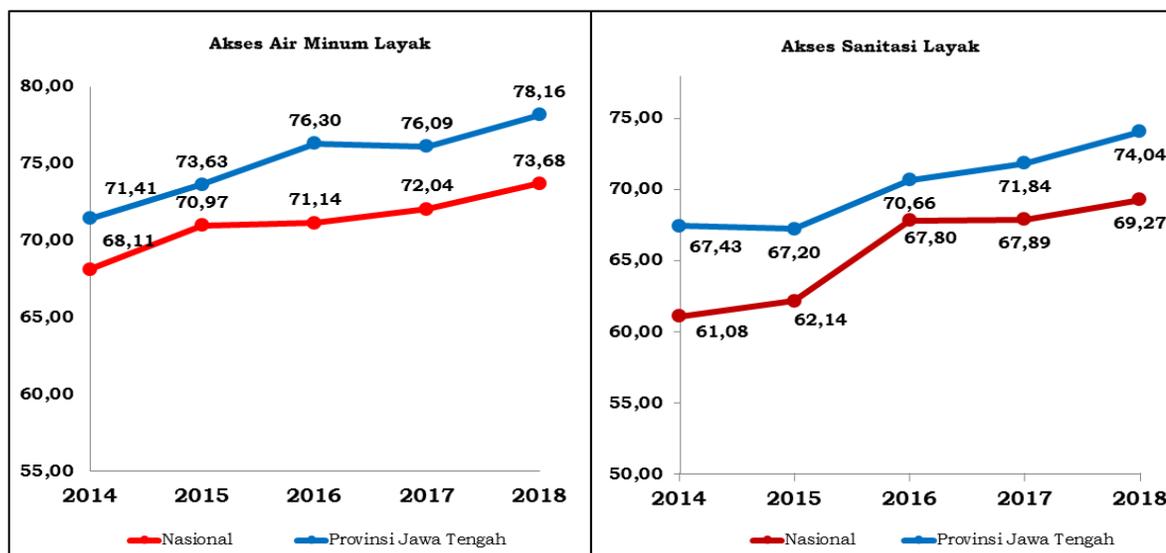
Pentingnya akses terhadap air minum dan sanitasi layak menjadi prioritas di Jawa Tengah didasarkan pada capaian tahun 2018 yang mencapai 78,16% (air minum layak) dan 74,04% (sanitasi layak). Di sisi lain, meskipun capaian tersebut lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 73,68% (air minum layak) dan 69,27% (sanitasi layak), namun jika dibandingkan dengan provinsi lain, air minum dan sanitasi layak Jawa Tengah berada pada urutan ke-10 sebagaimana gambar 4.27.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2018, diolah

Gambar 4.27
Perbandingan Akses Sumber Air Minum dan Sanitasi Layak Antar Provinsi Tahun 2018

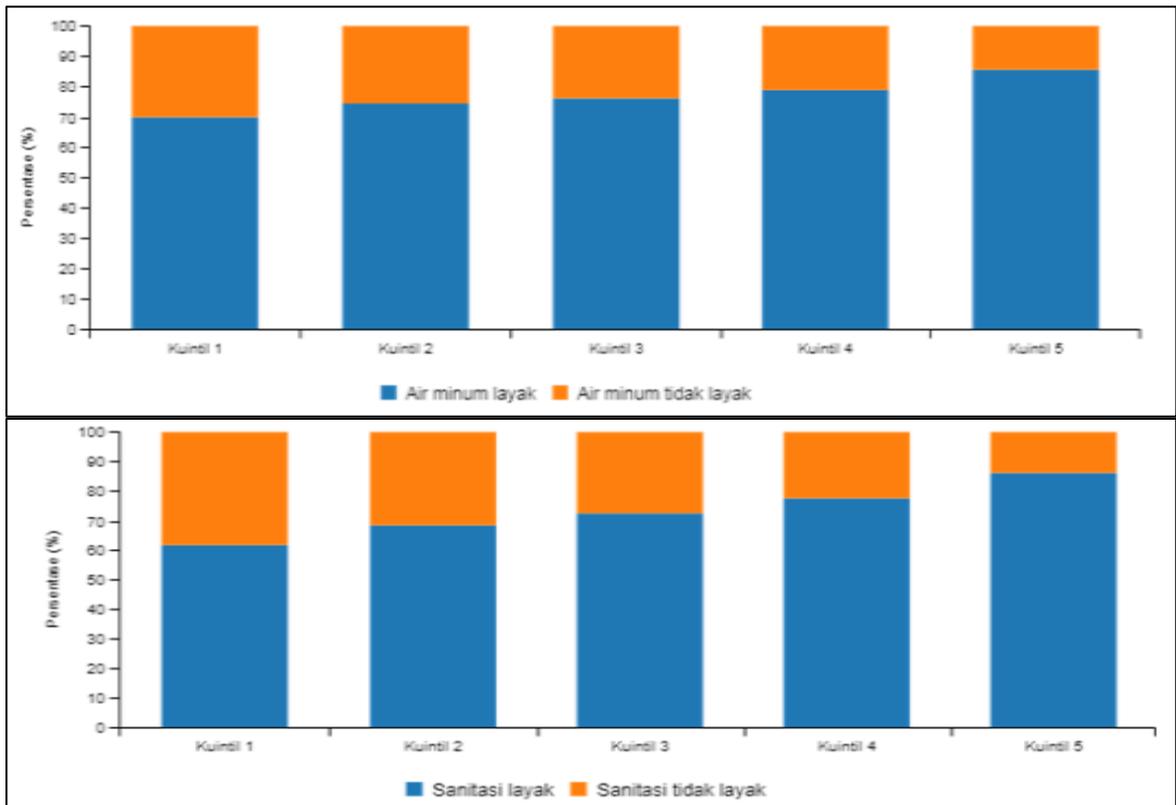
Akses air minum dan sanitasi layak Jawa Tengah pada tahun 2014-2018 semakin membaik dari 71,41% menjadi 78,16% (air minum layak) dan 67,43% menjadi 74,04% (sanitasi layak) sebagaimana gambar 4.28



Sumber: BPS, Tahun 2014 - 2018, diolah

Gambar 4.28
Perkembangan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 - 2018

Berdasarkan pengelompokan rumah tangga terhadap akses air minum dan sanitasi layak, diketahui bahwa persentase terbesar yang tidak memiliki akses air minum dan sanitasi layak berada pada kelompok rumah tangga miskin dan rentan, yang berada pada kuintil 1 dan 2 sebagaimana gambar 4.29



Sumber: BPS (Susenas) 2018, diolah

Gambar 4.29
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Tidak Layak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

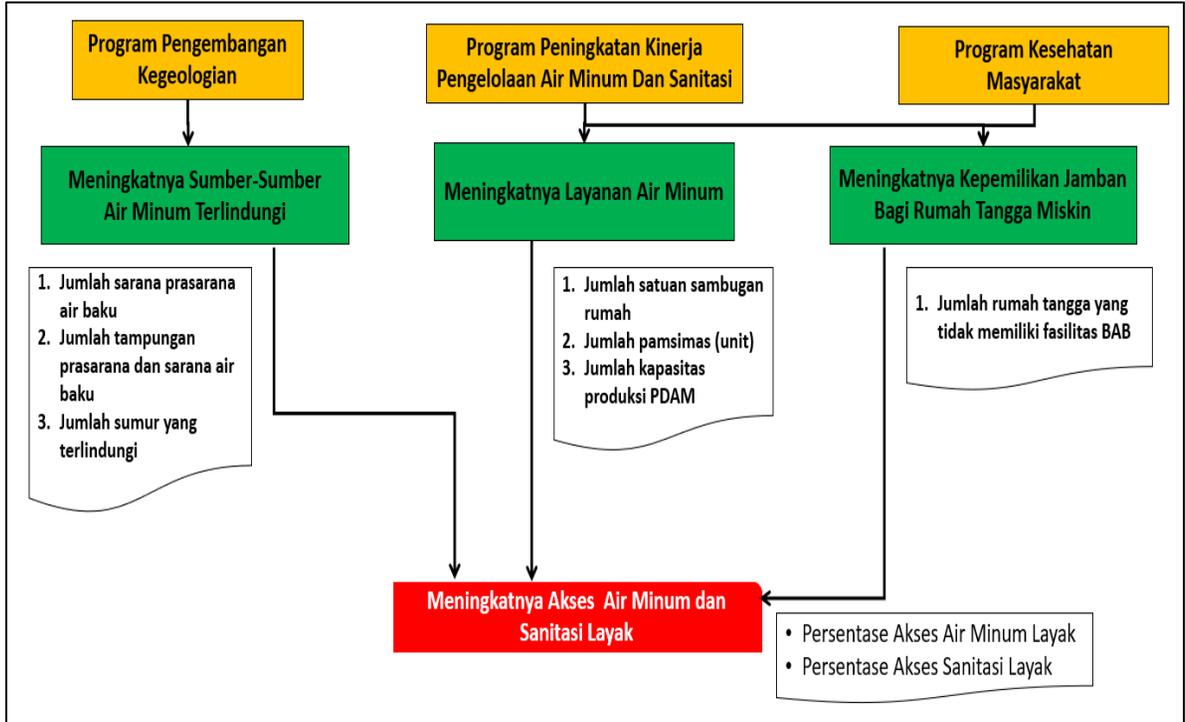
Berdasarkan gambaran diatas, masalah utama kemiskinan pada dimensi infrastruktur dasar adalah belum terpenuhinya akses air minum dan sanitasi layak, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penanggulangan kemiskinan pada dimensi infrastruktur dasar yaitu meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak untuk masyarakat.

2. Prioritas Intervensi Dimensi Infrastruktur Dasar

Penanganan masalah utama dimensi infrastruktur dasar di Jawa Tengah dalam rangka penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada perbaikan akses air minum dan sanitasi layak. Intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memperbaiki indikator utama akses air minum dan sanitasi layak menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pada perangkat daerah penyelenggara layanan dalam dimensi infrastruktur dasar dan perangkat daerah lainnya yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Logika program (*theory of change*) yang disusun menjelaskan bahwa untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak didukung dengan : 1) Meningkatkan layanan air minum, 2) Mengembangkan

sumber-sumber air minum, 3) Meningkatkan kepemilikan jamban bagi rumah tangga miskin sebagaimana gambar berikut :



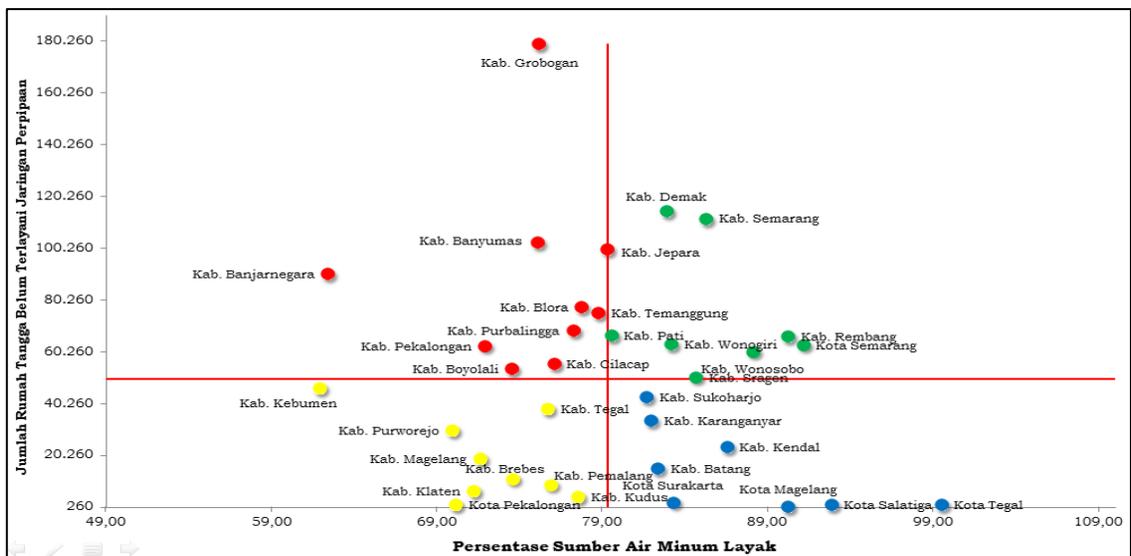
Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 4.30
Theory of Change (ToC) untuk Meningkatkan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak di Provinsi Jawa Tengah

3. Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Infrastruktur Dasar

a. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Layanan Air Minum

Pemetaan wilayah prioritas dilakukan dengan menyandingkan persentase akses sumber air minum layak terhadap jumlah rumah tangga yang belum terlayani jaringan perpipaan di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut :



Sumber: BPS Prov. Jateng, diolah

Gambar 4.31
Pemetaan Wilayah Prioritas Peningkatan Layanan Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan di Provinsi Jawa Tengah 2018

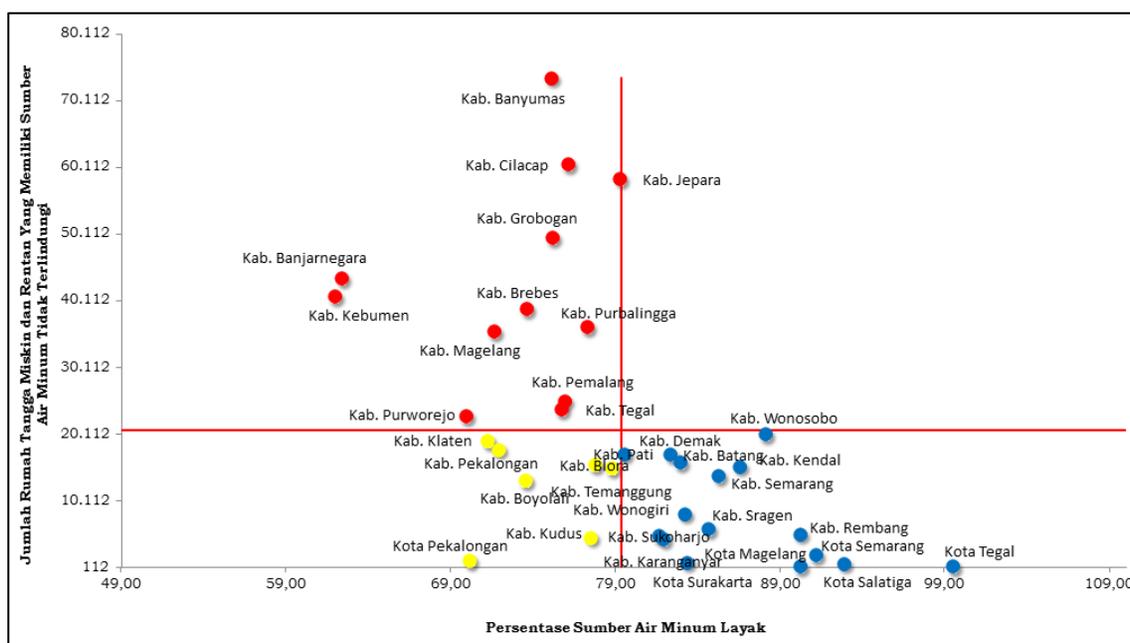
Berdasarkan gambar 4.31 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi peningkatan layanan air minum melalui jaringan perpipaan di Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.10

Tabel 4.10
Prioritas Wilayah Peningkatan Layanan Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan di Provinsi Jawa Tengah 2018

Prioritas 1 (10 kab)	: Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Boyolali, Grobogan, Blora, Jepara, Temanggung, dan Pekalongan
Prioritas 2 (9 kab/kota)	: Kabupaten Kebumen, Purworejo, Magelang, Klaten, Kudus, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota Pekalongan
Prioritas 3 (8 kab/kota)	: Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Sragen, Rembang, Pati, Demak, Semarang, dan Kota Semarang
Prioritas 4 (8 kab kota)	: Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Kendal, Batang, Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, dan Kendal

b. Prioritas Wilayah Untuk Pengembangan Sumber-Sumber Air Minum

Pemetaan wilayah prioritas dilakukan dengan menyandingkan akses sumber air minum layak terhadap jumlah rumah tangga dengan sumber air minum tidak terlindungi di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar 4.32



Gambar 4.32
Pemetaan Wilayah Prioritas Pengembangan Sumber-Sumber Air Minum di Provinsi Jawa Tengah 2018

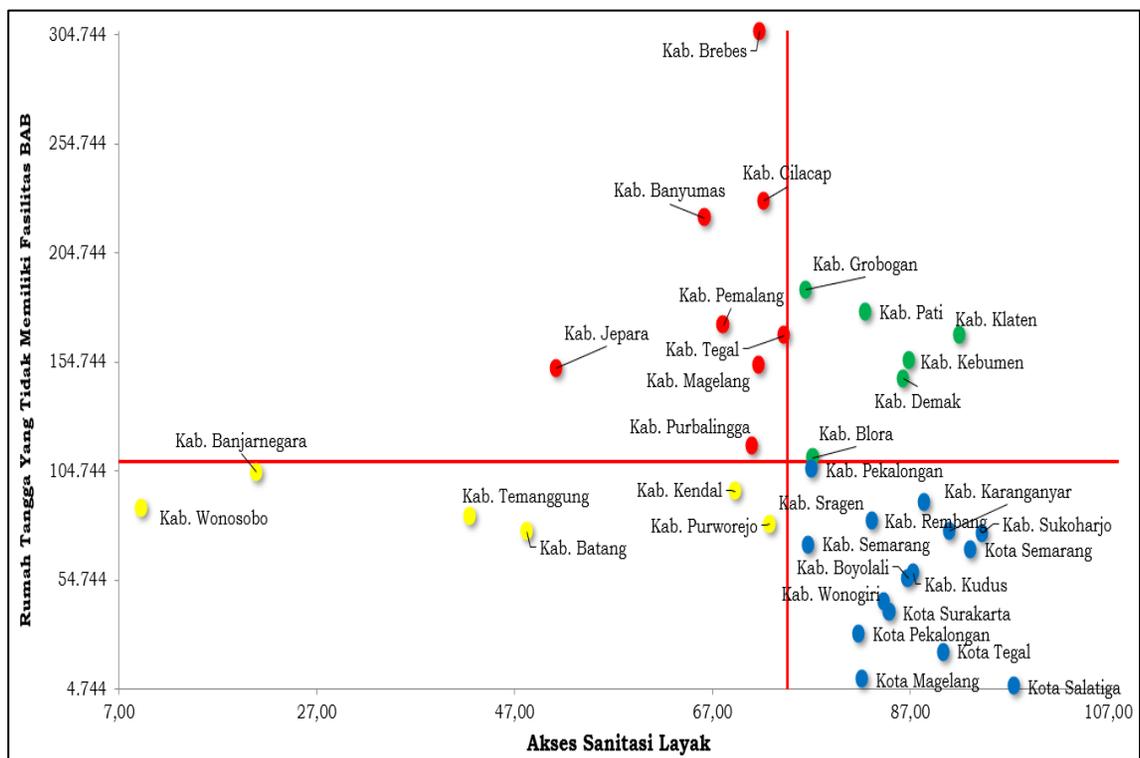
Berdasarkan gambar 4.32 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi pengembangan sumber-sumber air minum di Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.11

Tabel 4.11
Pemetaan Wilayah Prioritas Pengembangan Sumber-Sumber Air Minum di Provinsi Jawa Tengah 2018

Prioritas 1 (12 kab)	: Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Magelang, Grobogan, Jepara, Pemalang, Tegal, dan Brebes
Prioritas 2 (7 kab/kota)	: Kabupaten Boyolali, Klaten, Blora, Kudus, Temanggung, Pekalongan, dan Kota Pekalongan
Prioritas 3 (0 kab/kota)	: Tidak Ada
Prioritas 4 (16 kab kota)	: Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, Semarang, dan Tegal.

c. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Kepemilikan Jamban

Pemetaan wilayah prioritas dilakukan dengan menyandingkan akses sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar (BAB) di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar 4.33



Gambar 4.33
Pemetaan Wilayah Prioritas Peningkatan Kepemilikan Jamban di Provinsi Jawa Tengah 2018

Berdasarkan gambar 4.33 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi meningkatkan kepemilikan jamban bagi rumah tangga miskin di Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.12

Tabel 4.12
Pemetaan Wilayah Prioritas Peningkatan Kepemilikan Jamban di Provinsi Jawa Tengah 2018

Prioritas 1 (8 kab)	: Kabupaten Brebes, Cilacap, Banyumas, Pemalang, Tegal, Magelang, Purbalingga, dan Jepara
Prioritas 2 (6 kab)	: Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Batang, Kendal, Purworejo
Prioritas 3 (6 kab/kota)	: Kabupaten Grobogan, Pati, Klaten, Kebumen, Demak, dan Blora
Prioritas 4 (15 kab kota)	: Kabupaten Pekalongan, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Rembang, Semarang, Boyolali, Kudus, Kota Tegal, Surakarta, Pekalongan, Magelang, Salatiga, dan Semarang

E. DIMENSI KETAHANAN PANGAN

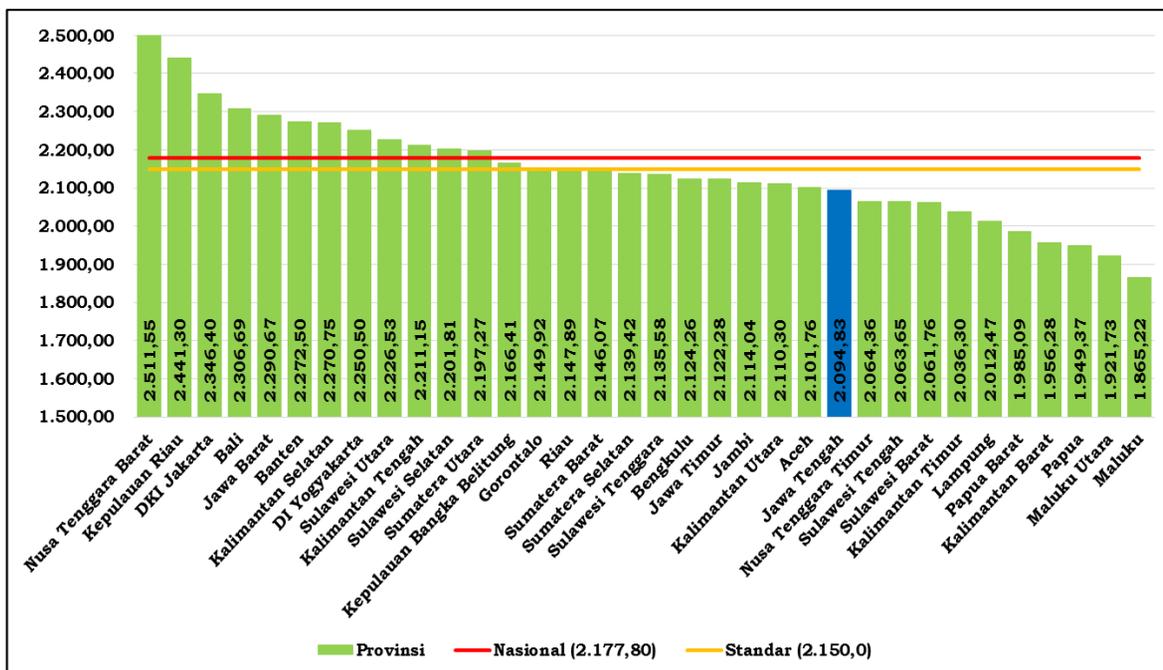
1. Masalah Utama Bidang Ketahanan Pangan

Kemiskinan erat kaitannya dengan ketahanan pangan karena kemiskinan menyebabkan keterbatasan untuk mengonsumsi pangan. Komoditas pangan utama di Jawa Tengah yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah beras karena merupakan komponen terbesar dalam penentuan garis kemiskinan.

Akses rumah tangga terhadap pangan (beras) secara umum dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, institusi, jaringan distribusi dan kapasitas produksi antar wilayah dan musim, yang berdampak pada pasokan dan stabilitas harga. Tantangan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Tengah adalah masih terdapat kesenjangan rumah tangga dalam mengakses pangan (beras) meskipun Jawa Tengah merupakan daerah surplus beras. Perlu ada upaya untuk menjaga ketersediaan stok pangan (beras) melalui Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) untuk menjamin stok dan harga yang stabil.

Akses pangan rumah tangga dapat diketahui dari rata-rata konsumsi kalori per kapita. Standar kecukupan kalori sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 adalah 2.150 kkal/hari.

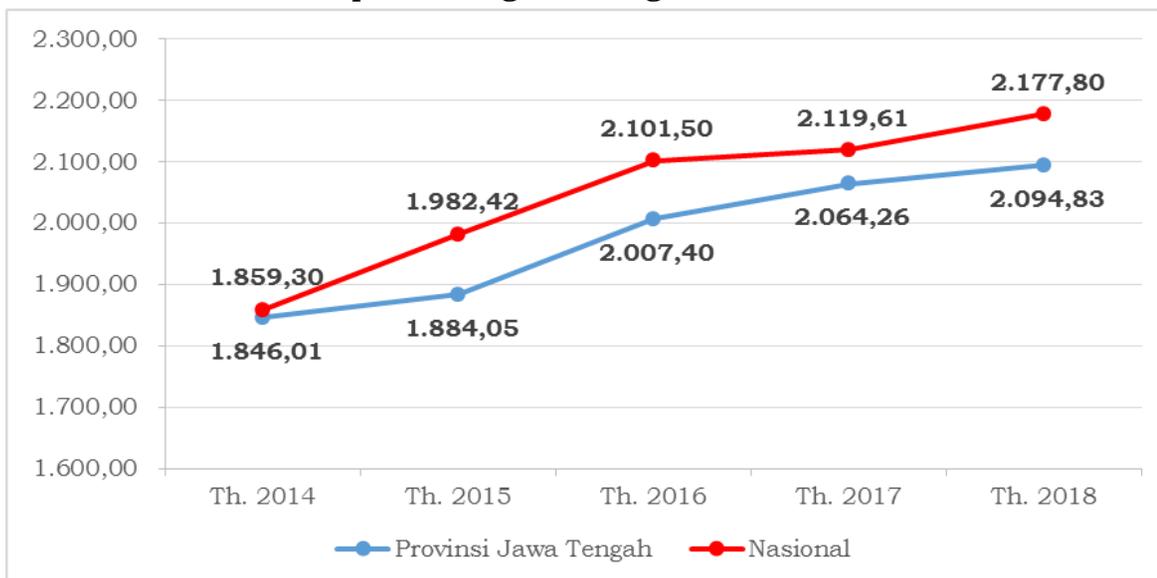
Rata-rata konsumsi kalori per kapita di Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 2.094,83 kkal, di bawah angka nasional (2.177,80 kkal) dan di bawah standar kecukupan kalori. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, Jawa Tengah berada pada urutan ke-24 sebagaimana gambar 4.34



Sumber: BPS, Tahun 2018, diolah

Gambar 4.34
Perbandingan Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita
Antar Provinsi Tahun 2018

Rata-rata konsumsi kalori per kapita dalam kurun waktu 2014-2018 konsisten meningkat, dari 1.846,01 kkal di tahun 2014 menjadi 2.094,83 kkal di tahun 2018. Laju peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun 2016 sebesar 123,35 poin sebagaimana gambar berikut:



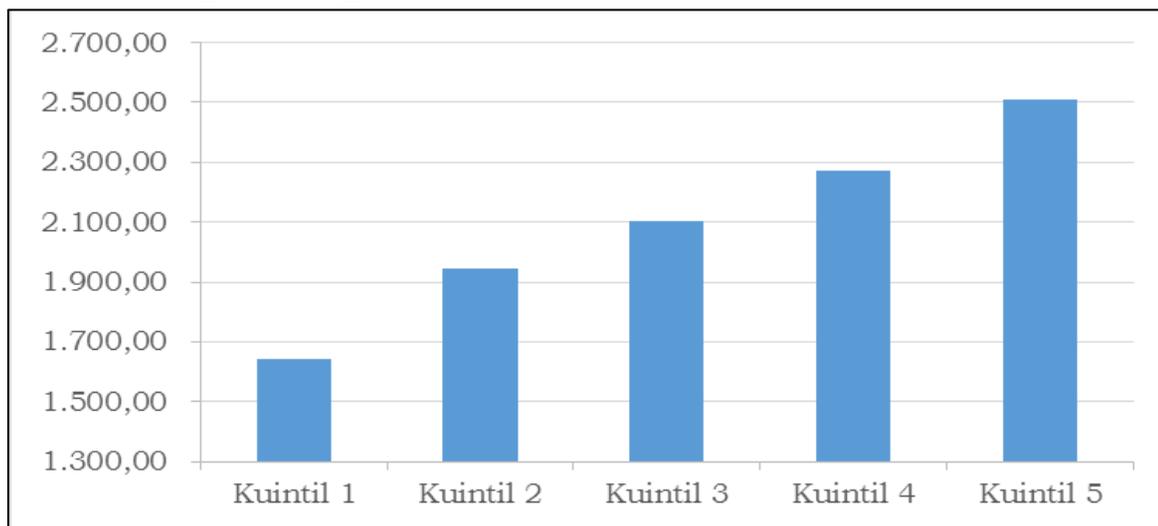
Sumber: BPS, Tahun 2014 - 2018, diolah

Gambar 4.35
Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita di Jawa Tengah
dan Nasional Tahun 2014 - 2018

Gambar 4.35 menjelaskan bahwa rata-rata peningkatannya dalam waktu tahun 2014-2018 sebesar 62,21 poin. Namun demikian lajunya mulai melambat khususnya pada tahun terakhir yang hanya 30,57 poin.

Berdasarkan pengelompokan rumah tangga, diketahui bahwa pada tahun 2018 rata-rata konsumsi kalori per kapita terendah berada pada

kuantil 1 dan 2 yang merupakan kelompok rumah tangga miskin dan rentan sebagaimana gambar 4.36



Sumber: BPS, Tahun 2018, diolah

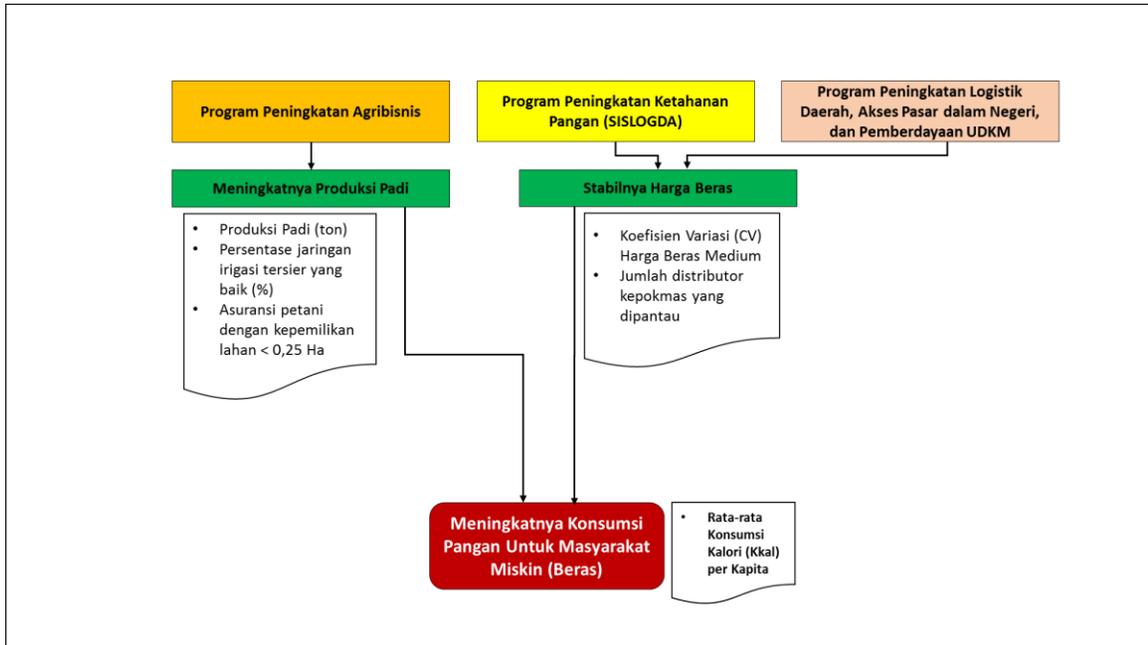
Gambar 4.36
Perbandingan Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita
Berdasarkan Kuintil di Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa masalah utama kemiskinan pada dimensi ketahanan pangan adalah rendahnya akses masyarakat miskin terhadap komoditas pangan utama yaitu beras, yang diindikasikan dari rendahnya rata-rata konsumsi kalori rumah tangga miskin dan rentan, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penanggulangan kemiskinan pada dimensi ketahanan pangan yaitu meningkatnya konsumsi pangan masyarakat, khususnya pada rumah tangga miskin.

2. Prioritas Intervensi Dimensi Ketahanan Pangan

Penanganan masalah utama kemiskinan pada dimensi ketahanan pangan di Jawa Tengah difokuskan pada upaya - upaya untuk meningkatkan konsumsi pangan masyarakat, khususnya pada rumah tangga miskin. Intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memperbaiki indikator utama akses pangan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah penyelenggara layanan dalam bidang ketahanan pangan, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Logika program (*theory of change*) yang disusun menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi pangan masyarakat dipengaruhi oleh: 1) meningkatnya produksi padi dengan bertambahnya jumlah produksi padi setiap tahunnya; serta 2) stabilnya harga beras dengan memantau koefisien variasi (CV) harga beras medium di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

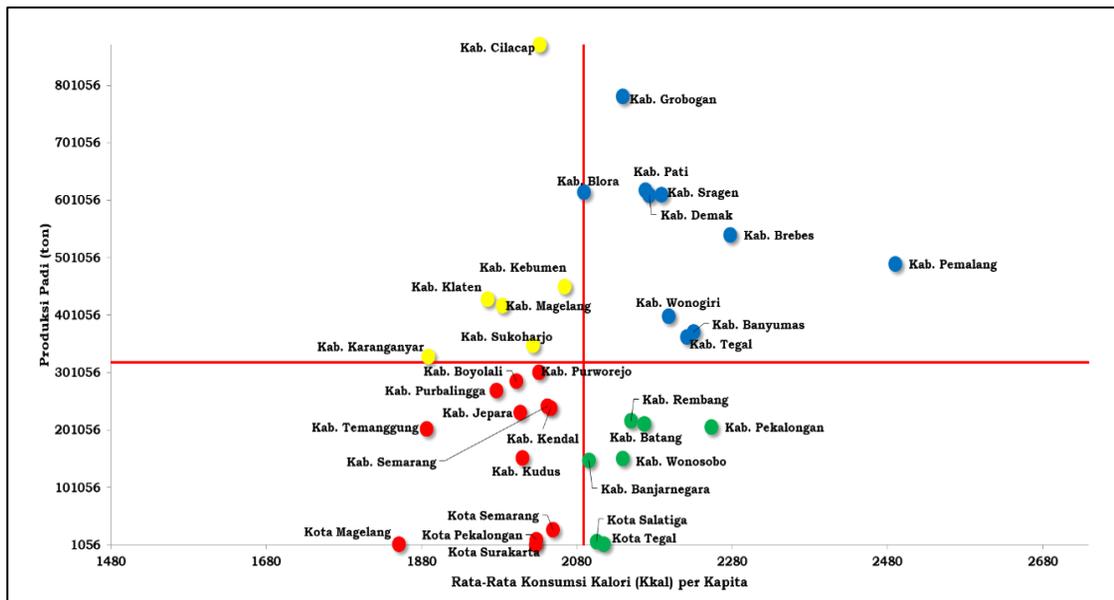


Gambar 4.37
Theory of Change (ToC) untuk Meningkatkan Konsumsi Pangan (Beras) Jawa Tengah

3. Prioritas Wilayah Intervensi Ketahanan Pangan

a. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Padi

Pemetaan wilayah prioritas dilakukan dengan menyandingkan variabel rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari di wilayah kabupaten/kota terhadap produksi padi dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar 4.38



Gambar 4.38
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Produksi Padi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

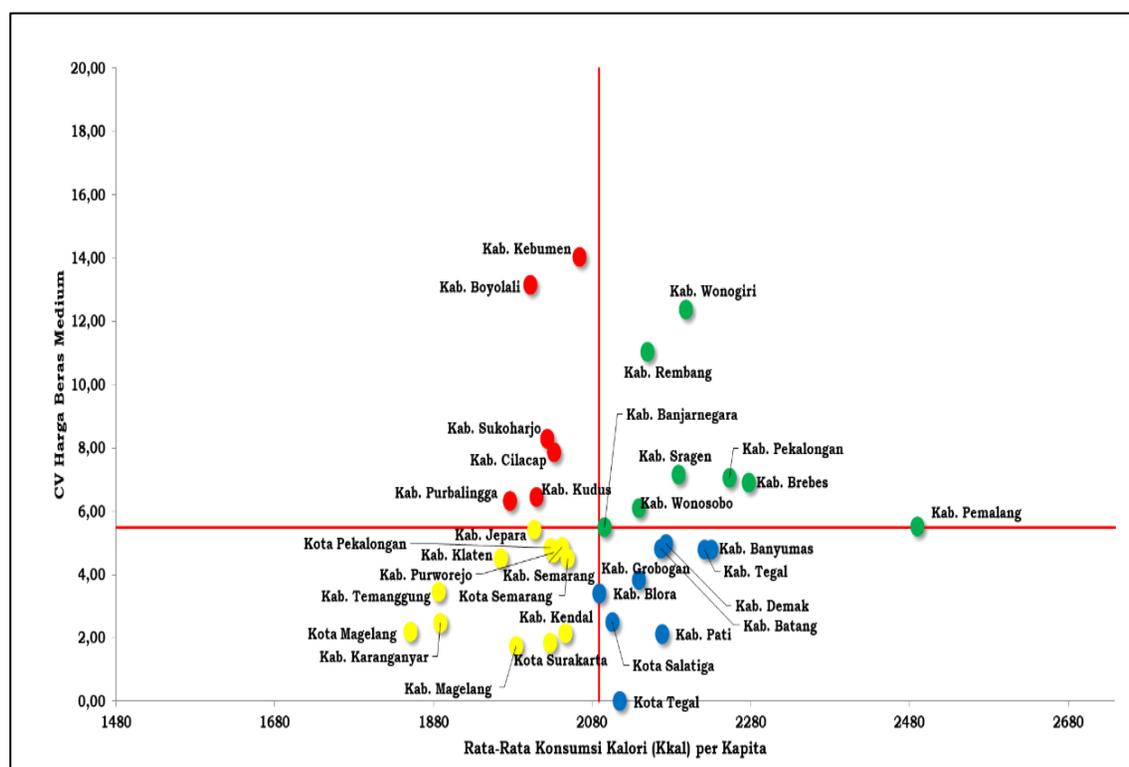
Berdasarkan gambar 4.41 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi peningkatan produksi padi beras di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.13

Tabel 4.13
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Padi
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Prioritas 1 (12 kab/kota)	: Kabupaten Boyolali, Purworejo, Purbalingga, Jepara, Kendal, Temanggung, Semarang, Kudus, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Surakarta dan Kota Magelang
Prioritas 2 (6 kabupaten)	: Kabupaten Cilacap, Kebumen, Klaten, Magelang, Sukoharjo dan Karanganyar
Prioritas 3 (7 kab/kota)	: Kabupaten Rembang, Batang, Pekalongan, Wonosobo, Banjarnegara, Kota Salatiga dan Kota Tegal
Prioritas 4 (10 kabupaten)	: Kabupaten Grobogan, Blora, Pati, Sragen, Demak, Brebes, Pemalang, Wonogiri, Banyumas dan Tegal

b. Prioritas Wilayah Untuk Menjaga Stabilitas Harga Beras

Pemetaan wilayah prioritas untuk menjaga stabilitas harga beras di Jawa Tengah dilakukan dengan menyandingkan variabel rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari di wilayah kabupaten/kota terhadap koefisien variasi (CV) harga beras medium dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar 4.39



Gambar 4.39
Pemetaan Wilayah untuk Menjaga Stabilitas Harga Beras
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan gambar 4.42 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi stabilnya harga beras di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.14

Tabel 4.14
Prioritas Wilayah untuk Menjaga Stabilitas Harga Beras
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

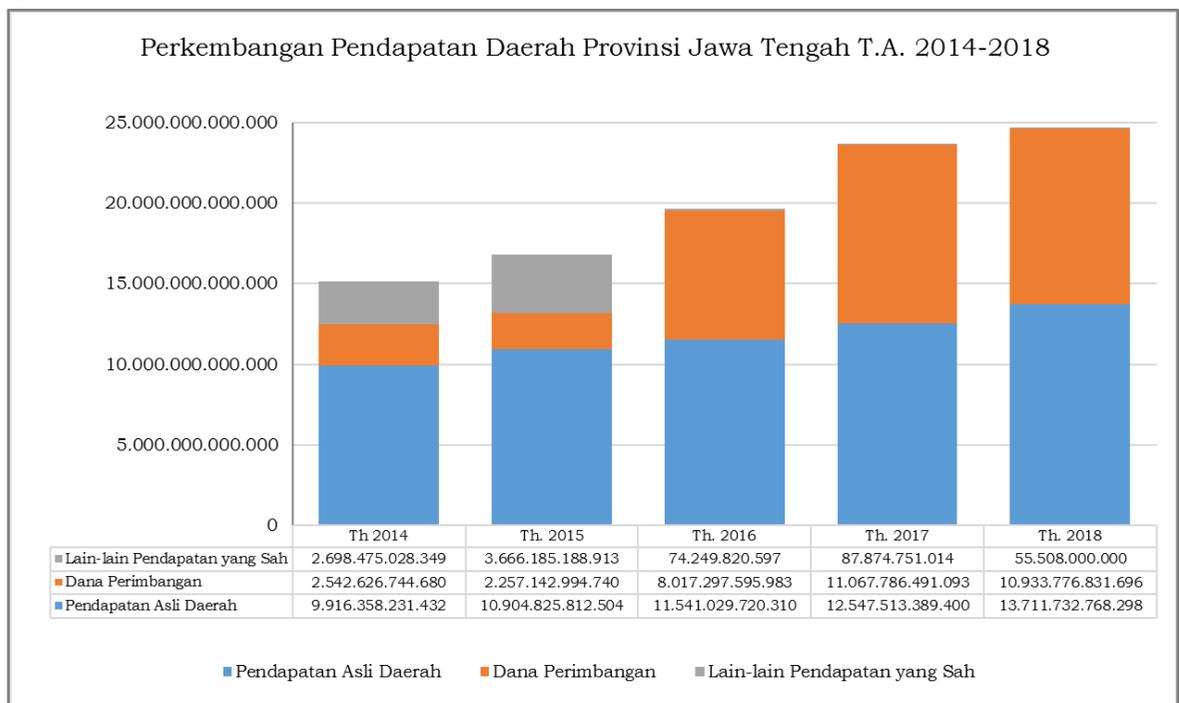
Prioritas 1 (6 kabupaten)	: Kabupaten Kebumen, Boyolali, Sukoharjo, Cilacap, Purbalingga dan Kudus
Prioritas 2 (12 kab/kota)	: Kabupaten Jepara, Klaten, Purworejo, Temanggung, Karanganyar, Magelang, Semarang, Kendal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Magelang dan Kota Pekalongan
Prioritas 3 (8 kabupaten)	: Kabupaten Wonogiri, Rembang, Brebes, Sragen, Wonosobo, Pekalongan, Pemalang dan Banjarnegara,
Prioritas 4 (9 kabupaten)	: Kabupaten Grobogan, Blora, Pati, Banyumas, Tegal, Demak, Batang, Kota Salatiga dan Kota Tegal

BAB V
ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dalam rangka pelayanan publik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di berbagai sektor. APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah, sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

A. Analisis Pendapatan Daerah

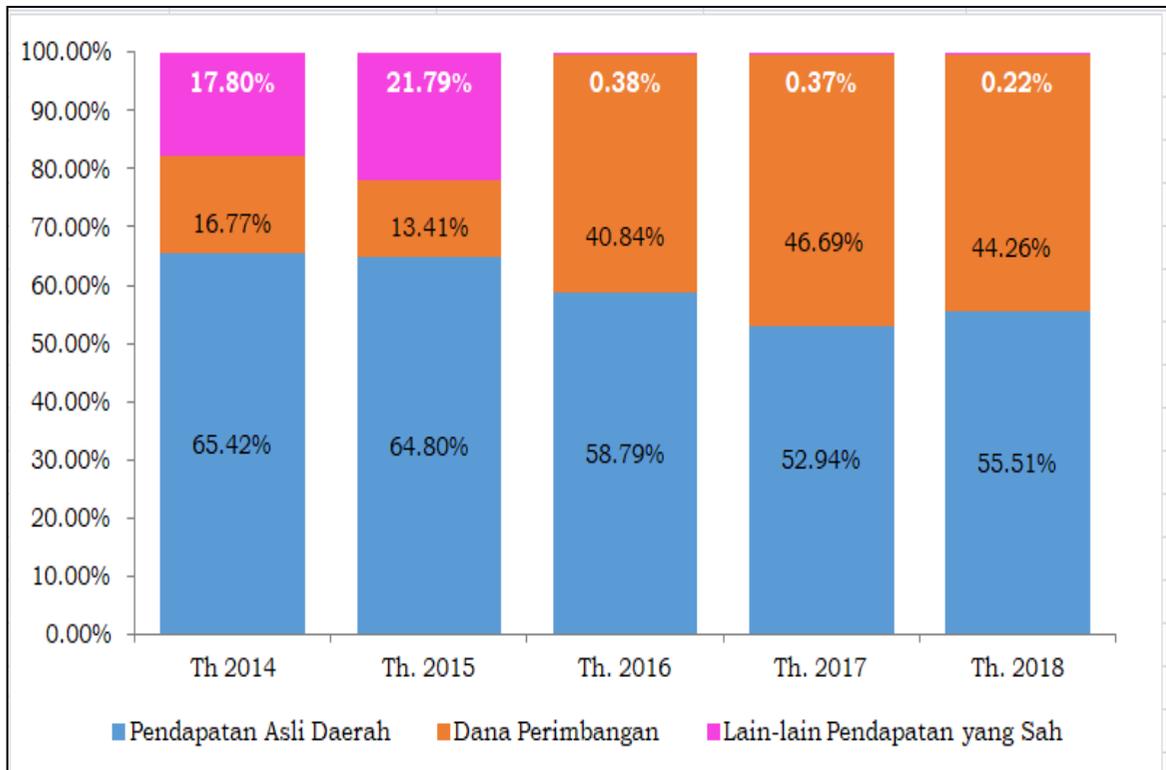
Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lainnya. Dalam kurun lima tahun terakhir (2014-2018) pendapatan daerah konsisten meningkat sebagaimana gambar 5.1



Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2014 - 2018

Berdasarkan komposisinya, PAD masih mendominasi sumber pendapatan daerah, namun trennya cenderung menurun dari 65,42% di tahun 2014 menjadi 55,51% di tahun 2018 sebagaimana gambar 5.2.



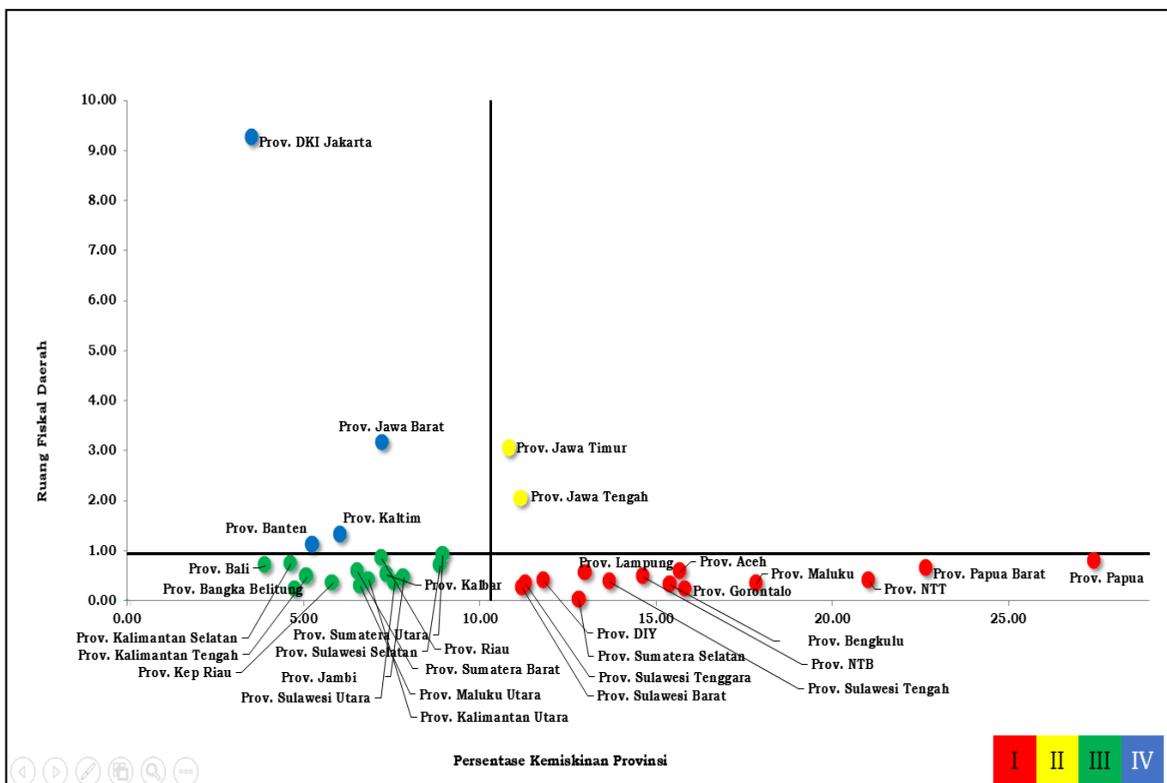
Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.2
Komposisi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2014 – 2018

Dari komposisi pendapatan daerah tahun 2014-2018, dominasi PAD menunjukkan derajat otonomi fiskal daerah cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Tengah tidak sepenuhnya tergantung terhadap bantuan eksternal baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain.

Dari sisi kapasitas/ruang fiskal, indeks kapasitas fiskal Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar 2,034 dengan kategori sangat tinggi, sehingga memiliki potensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya-upaya penurunan kemiskinan.

Pengelompokkan kapasitas fiskal daerah dibandingkan dengan daerah lainnya terhadap angka kemiskinan, Jawa Tengah masuk pada kelompok kuadran II yaitu daerah dengan kapasitas fiskal tinggi namun angka kemiskinannya masih tinggi, sebagaimana gambar 5.3.



Sumber: Peta Kapasitas Daerah, Kemenkeu 2018, diolah.

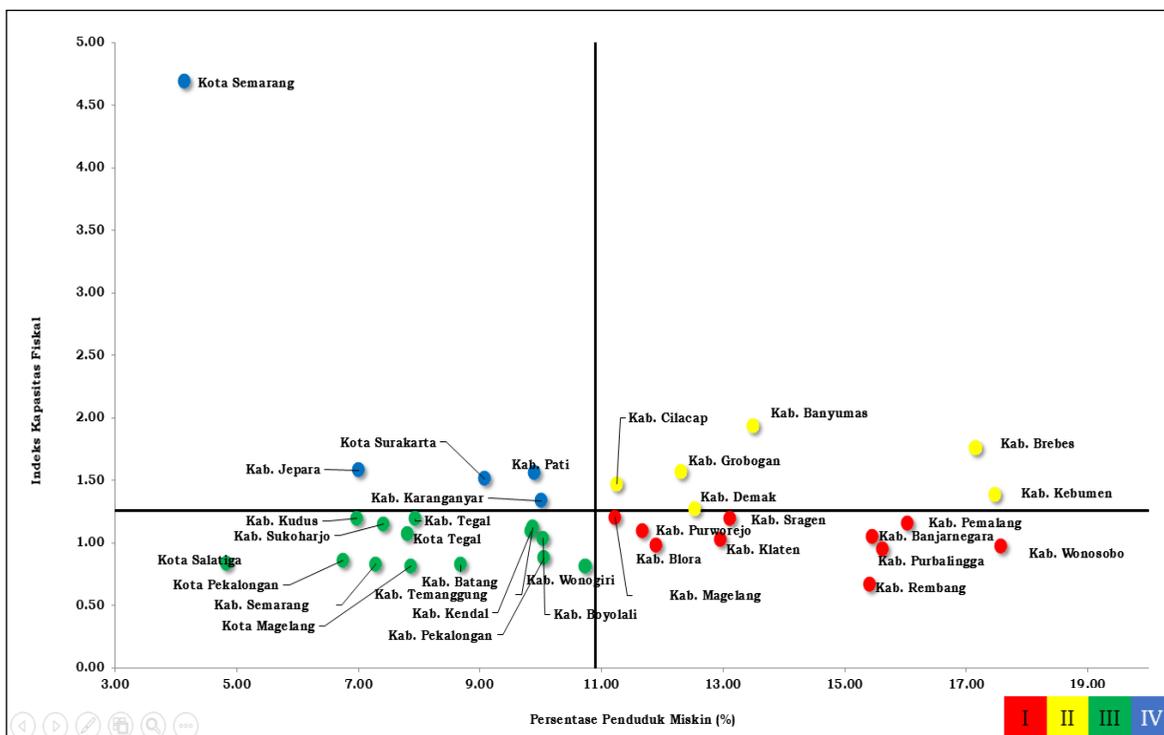
Gambar 5.3
Pengelompokan Provinsi berdasarkan Kapasitas Fiskal dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2018

Gambar 5.3 menjelaskan tentang kapasitas fiskal dan tingkat kemiskinan terdapat 4 kelompok kuadran sebagaimana tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Pengelompokan Provinsi berdasarkan Kapasitas Fiskal dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2018

Kuadran I (Kapasitas fiskal rendah dan kemiskinan tinggi)	: Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, NTB, Sulawesi Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, DIY, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat.
Kuadran II (Kapasitas fiskal tinggi dan kemiskinan tinggi)	: Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur
Kuadran III (Kapasitas fiskal rendah dan kemiskinan rendah)	: Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Riau, Jambi, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Bali.
Kuadran IV (Kapasitas fiskal tinggi dan kemiskinan rendah)	: Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Banten.

Untuk wilayah Jawa Tengah hubungan antara kapasitas fiskal dan kemiskinan terdapat 10 kabupaten berada pada kuadran I (berwarna merah) yaitu daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan kemiskinan tinggi, sebagaimana gambar 5.4.



Sumber: Peta Kapasitas Daerah, Kemenkeu 2018, diolah.

Gambar 5.4
Pengelompokan Kabupaten/Kota berdasarkan Kapasitas Fiskal dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2018

Gambar 5.4 menjelaskan tentang kapasitas fiskal dan tingkat kemiskinan terdapat 4 kelompok kuadran kabupaten/kota sebagaimana tabel 5.2

Tabel 5.2
Pengelompokan Kabupaten/Kota berdasarkan Kapasitas Fiskal dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2018

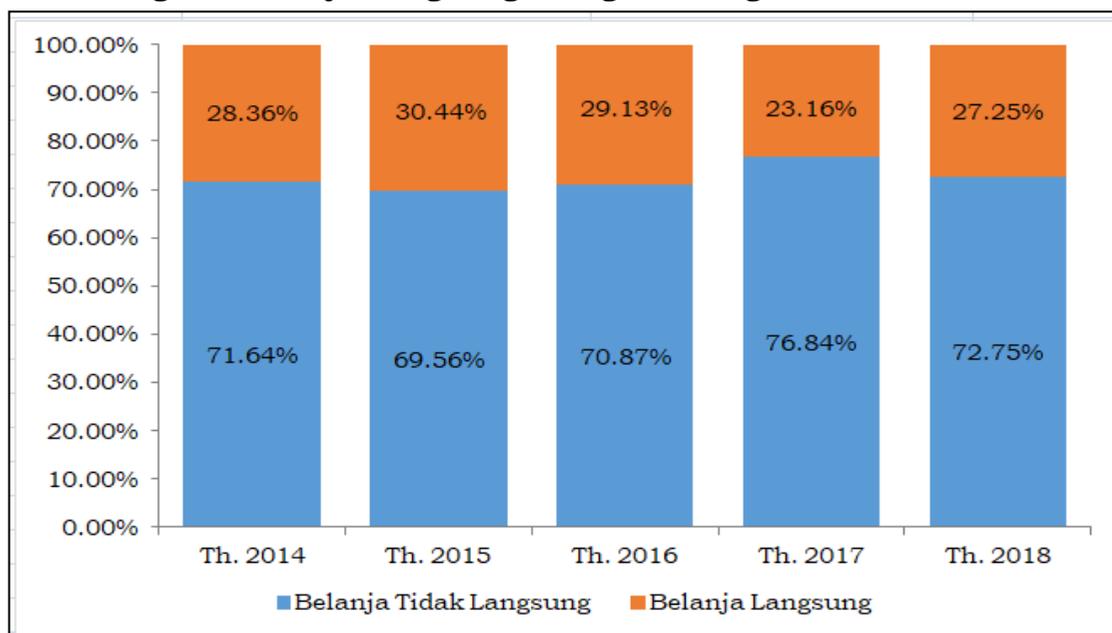
Kuadran I (10 kab.) Kapasitas fiskal rendah dan kemiskinan tinggi	: Kabupaten Wonosobo, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Rembang, Sragen, Purworejo, Klaten, Blora dan Magelang.
Kuadran II (6 kab.) Kapasitas fiskal tinggi dan kemiskinan tinggi	: Kabupaten Kebumen, Brebes, Demak, Grobogan, Banyumas dan Cilacap.
Kuadran III (13 kab./kota) Kapasitas fiskal rendah dan kemiskinan rendah	: Kabupaten Boyolali, Wonogiri, Pekalongan, Kendal, Temanggung, Batang, Tegal, Semarang, Sukoharjo, Kudus, Kota Salatiga, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.
Kuadran IV (5 kab./kota) Kapasitas fiskal tinggi dan kemiskinan rendah	: Kabupaten Pati, Karanganyar, Jepara, Kota Surakarta dan Kota Semarang

Kabupaten/kota yang berada pada kuadran I semestinya menjadi perhatian utama dalam upaya penurunan kemiskinan melalui bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu kabupaten/kota yang berada di kuadran I perlu memprioritaskan kebijakan penganggarannya untuk efektivitas belanja daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

B. Analisis Belanja Daerah

1. Struktur Belanja Daerah

Komponen belanja daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanjanya untuk pelayanan publik. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2018) komponen Belanja Tidak Langsung proporsinya lebih besar dibandingkan Belanja Langsung sebagaimana gambar 5.5.

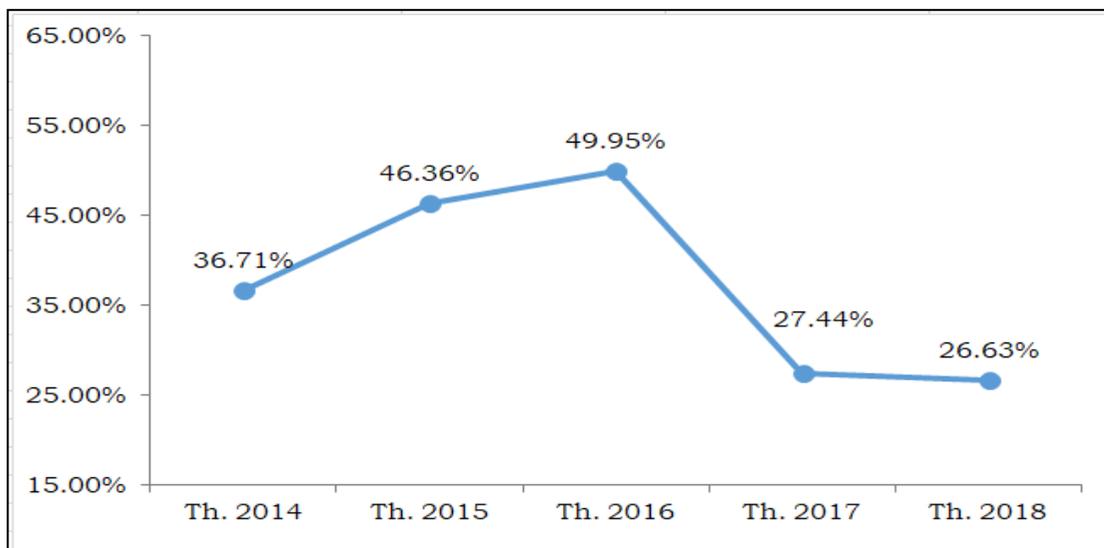


Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.5
Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2014 - 2018

Meskipun belanja tidak langsung (BTL) proporsinya lebih besar tetapi di dalamnya bukan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai saja. Dalam komponen BTL juga terdapat belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan, antara lain diwujudkan melalui Bantuan Siswa Miskin, Kartu Jateng Sejahtera dan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pada komponen belanja modal, prosentasenya terhadap total belanja langsung pada tahun 2014-2016 meningkat, namun dalam dua tahun terakhir (2017-2018) menurun menjadi 26,63%. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan kewenangan urusan wajib pendidikan (pendidikan menengah) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang berkonsekuensi adanya tambahan pembiayaan khususnya untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Penyebab lainnya adalah pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan) tidak lagi menjadi prioritas pembangunan di tahun berikutnya. Proporsi Belanja Modal terhadap total belanja Langsung T,A, 2014-2018 sebagaimana gambar 5.6.

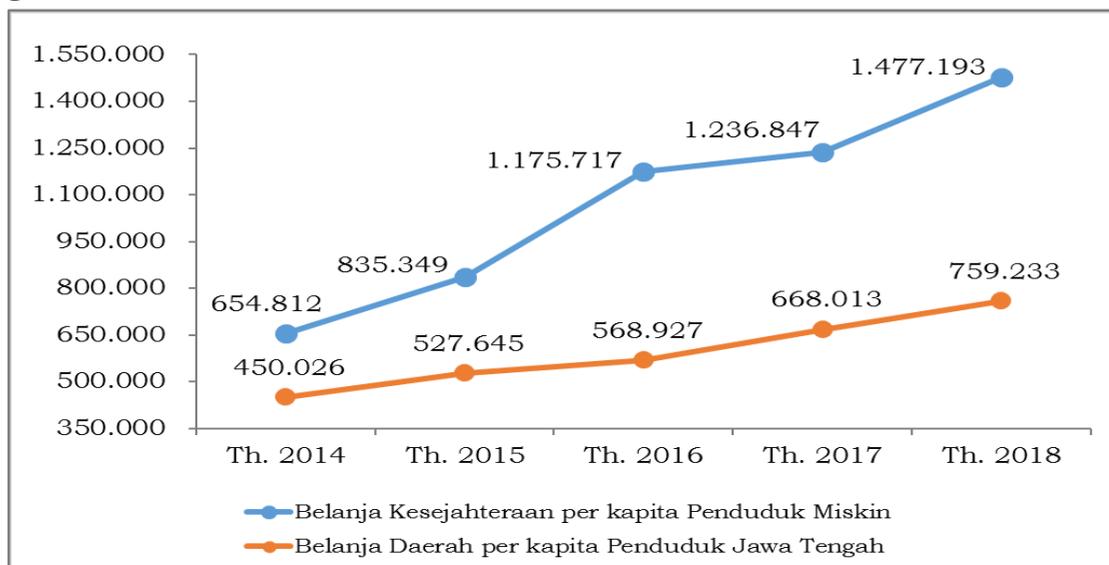


Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.6
Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Langsung Provinsi Jawa Tengah T.A. 2014 - 2018

2. Analisis Belanja Kesejahteraan

Pengalokasian belanja untuk kesejahteraan masyarakat (belanja hibah dan bansos dibagi jumlah penduduk miskin) dari tahun 2014-2018 konsisten meningkat. Hal yang sama juga terjadi peningkatan belanja daerah per kapita penduduk Jawa Tengah, sebagaimana gambar 5.7

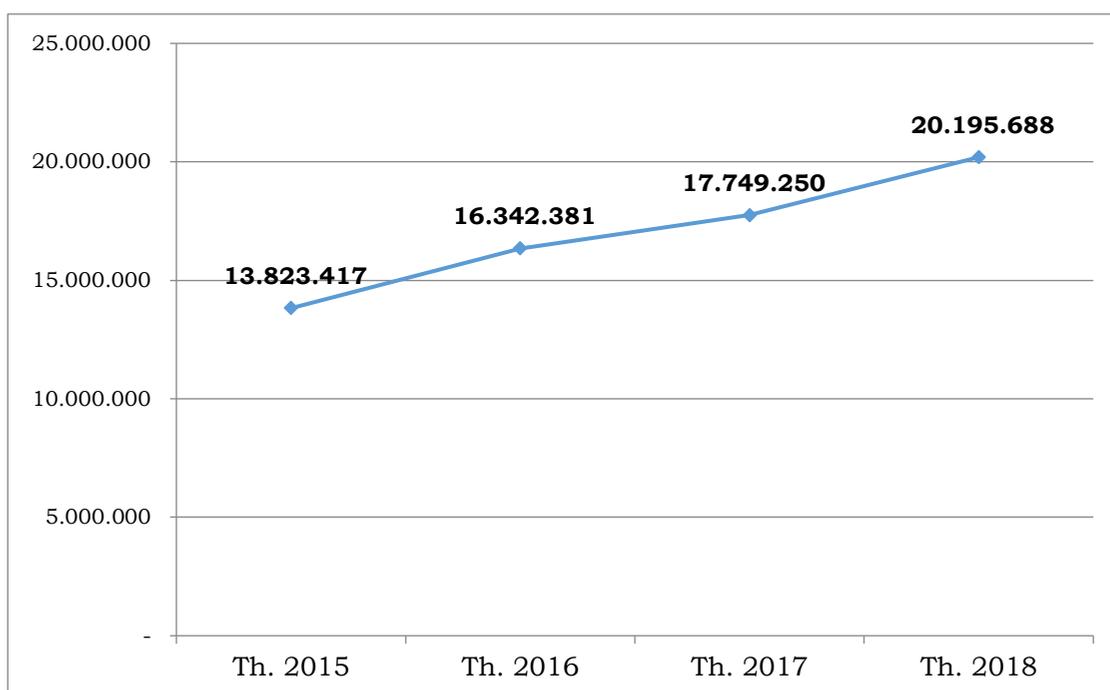


Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.7
Perkembangan Belanja per kapita Penduduk Jawa Tengah dan Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah T.A. 2014 - 2018

Dari berbagai kondisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa secara umum kebijakan belanja daerah pada APBD Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin, ditandai dengan peningkatan belanja kesejahteraan per kapita walaupun masih relatif kecil. Hal yang sama terjadi dengan peningkatan belanja per kapita bagi masyarakat Jawa Tengah yang meningkat.

Jika dihitung berdasarkan total belanja daerah secara kewilayahan yang terdiri total belanja daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap total jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan pertahunnya sebagaimana yang tertera pada gambar di bawah. Semakin tinggi belanja yang dikeluarkan pemerintah menunjukkan semakin banyak fasilitas dan pelayanan publik yang tersedia. Kondisi ini dapat mendorong penurunan kemiskinan menjadi lebih cepat karena akses, sarpras dan kualitas pelayanan publik semakin baik.



Sumber: BPS 2019, data diolah.

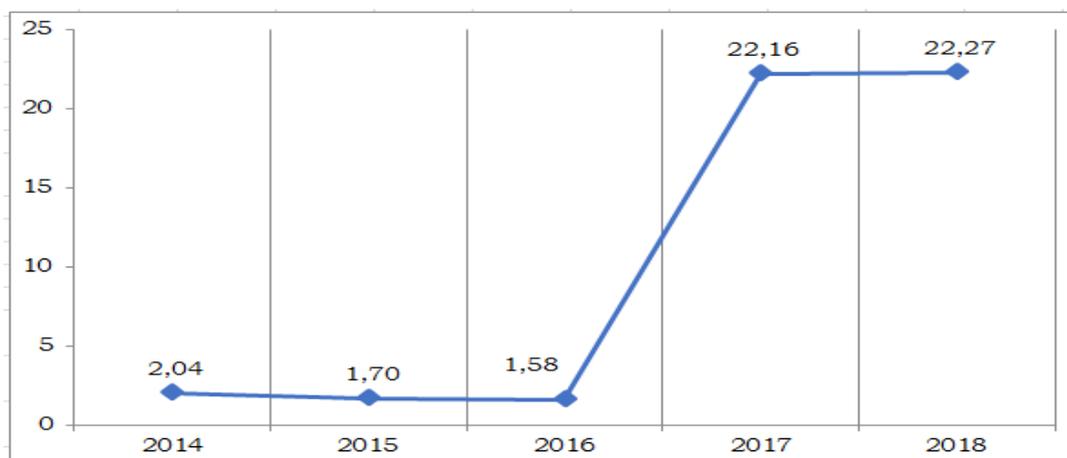
Gambar 5.8
Perkembangan Belanja per kapita Penduduk Jawa Tengah dan Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah T.A. 2014 – 2018

3. Analisis Belanja Sektor untuk Penanggulangan Kemiskinan

Analisis belanja sektoral untuk penanggulangan kemiskinan dikelompokkan berdasarkan dimensi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan.

a. Analisis Belanja untuk Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan SMA/SMK/SLB

Belanja untuk meningkatkan akses layanan pendidikan SMA/SMK/SLB berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kurun waktu tahun 2014-2018 proporsi anggaran dinas pendidikan terhadap total belanja daerah cenderung meningkat sebagaimana gambar 5.9



Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.9
Proporsi Anggaran pada Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan SMA/SMK/SLB terhadap Total Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah T.A. 2014 - 2018

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2014-2018 mengalami perubahan. Pada Tahun 2014-2016 terdapat 9 Program kemudian berubah menjadi 5 Program di tahun 2017-2018. Perubahan program ini dikarenakan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan adanya perubahan wewenang di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini membuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan revisi pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2014-2018, sebagaimana tabel 5.3

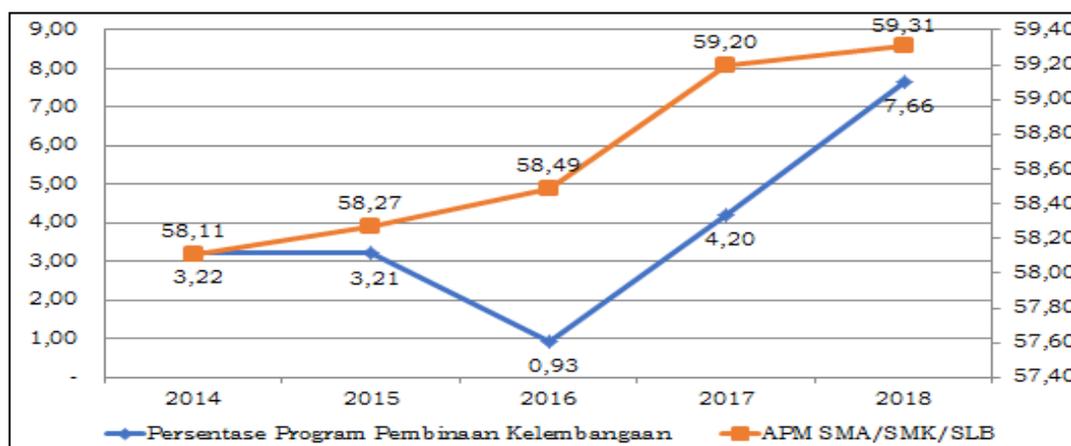
Tabel 5.3
Perubahan Nomenklatur Program pada Urusan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Program Tahun 2014-2016	Program Tahun 2017-2018
1. Pendidikan Anak Usia Dini	1. Pendidikan Menengah.
2. Pendidikan Dasar	2. Pendidikan Khusus.
3. Pendidikan Menengah	3. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik
4. Peningkatan Pendidikan formal dan non formal	4. Manajemen Pelayanan Pendidikan
5. Pendidikan Khusus	5. Pendidikan Berkelanjutan
6. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik	
7. Manajemen Pelayanan Pendidikan	
8. Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi	
9. Pendidikan Berkelanjutan	

Untuk meningkatkan layanan pendidikan SMA/SMK/SLB diwujudkan melalui program Pembinaan Kelembagaan, Pemenuhan Sarpras, Pembiayaan Layanan Pendidikan, Program Bantuan Siswa Miskin, Beasiswa Daerah dan program Pendirian SMK Boarding School.

Belanja untuk Program Pembinaan Kelembagaan SMA/SMK/SLB terhadap total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2014-2018 cenderung meningkat,

peningkatan terjadi dari tahun 2016 (0,93%) ke tahun 2017 (4,20%) sebesar 3,27%. Meningkat lagi ke tahun 2018 (7,66%) sebesar 3,46, sebagaimana gambar 5.10



Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.10
Perkembangan Proporsi Anggaran Program Pembinaan Kelembagaan terhadap Peningkatkan Akses Layanan Pendidikan SMA/SMK/SLB T.A. 2014 - 2018

Gambar di atas menjelaskan bahwa peningkatan persentase belanja Program Pembinaan Kelembagaan SMA/SMK/SLB pada Tahun 2014-2018 memberikan kontribusi positif pada APM SMA/SMK/SLB terutama pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Belanja untuk Program Pemenuhan Sarpras SMA/SMK/SLB terhadap total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif, peningkatan paling besar terjadi ditahun 2016 (0,12%) ke tahun 2017 (3,81%) namun di tahun 2018 justru turun sebesar 3,38%.

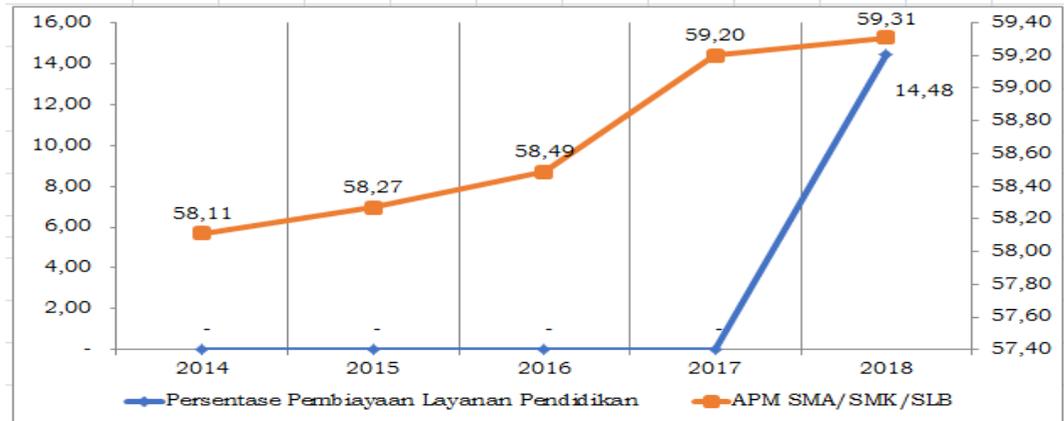


Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.11
Perkembangan Proporsi Anggaran Program Pemenuhan Sarpras terhadap Peningkatkan Akses Layanan Pendidikan SMA/SMK/SLB T.A. 2014 - 2018

Gambar di atas menjelaskan bahwa penurunan persentase belanja Pemenuhan Sarpras SMA/SMK/SLB pada Tahun 2014-2016 tidak berdampak langsung pada peningkatan APM SMA/SMK/SLB. Meskipun persentasenya mulai meningkat kembali pada tahun 2017, namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam peningkatan APM SMA/SMK/SLB.

Belanja untuk program Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA/SMK/SLB terhadap total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 sebesar 14,48%, sedangkan di tahun tahun sebelumnya belum dianggarkan secara khusus program tersebut.

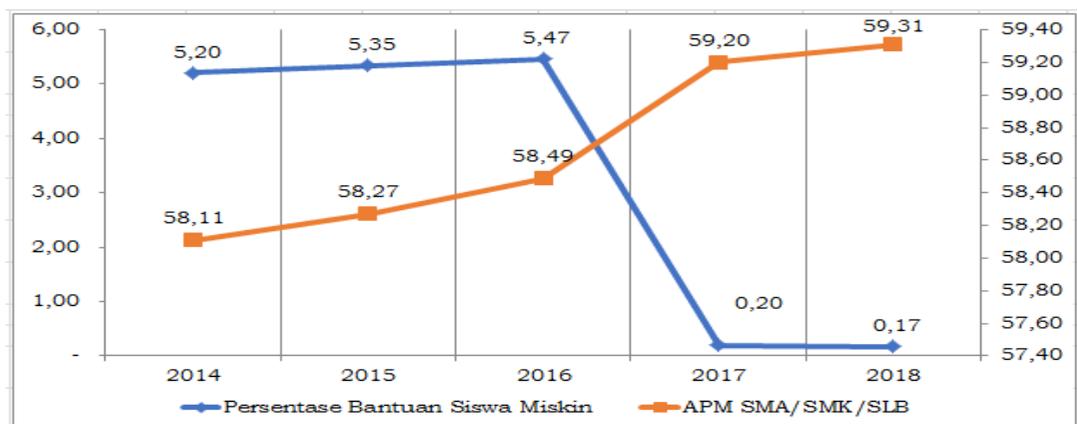


Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.12
Perkembangan Proporsi Anggaran Program Pembiayaan layanan Pendidikan terhadap Peningkatkan Akses Layanan Pendidikan SMA/SMK/SLB T.A. 2014 – 2018

Gambar di atas menjelaskan bahwa persentase pembiayaan layanan pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan dalam peningkatan APM SMA/SMK/SLB.

Belanja untuk program Bantuan Siswa Miskin SMA/SMK/SLB terhadap total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2014-2018 cenderung menurun, penurunan paling besar terjadi pada tahun 2016 ke 2017 sebesar 5,27%.

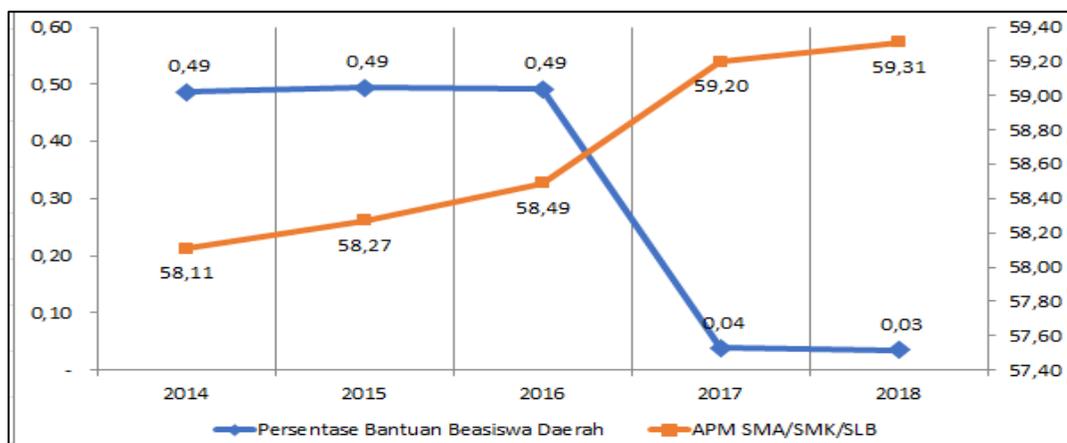


Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.13
Perkembangan Proporsi Anggaran Program Bantuan Siswa Miskin terhadap Peningkatkan Akses Layanan Pendidikan SMA/SMK/SLB T.A. 2014 – 2018

Gambar di atas menjelaskan bahwa penurunan persentase belanja Bantuan Siswa Miskin SMA/SMK/SLB pada Tahun 2014-2018 tidak berdampak langsung pada peningkatan APM SMA/SMK/SLB.

Belanja untuk program Bantuan Beasiswa Daerah (SMA Taruna Nusantara Magelang) terhadap total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 sebesar 0,03%, penurunan paling besar terjadi di tahun 2016 (0,49%) ke tahun 2017 (0,04%) sebesar 0,45%.

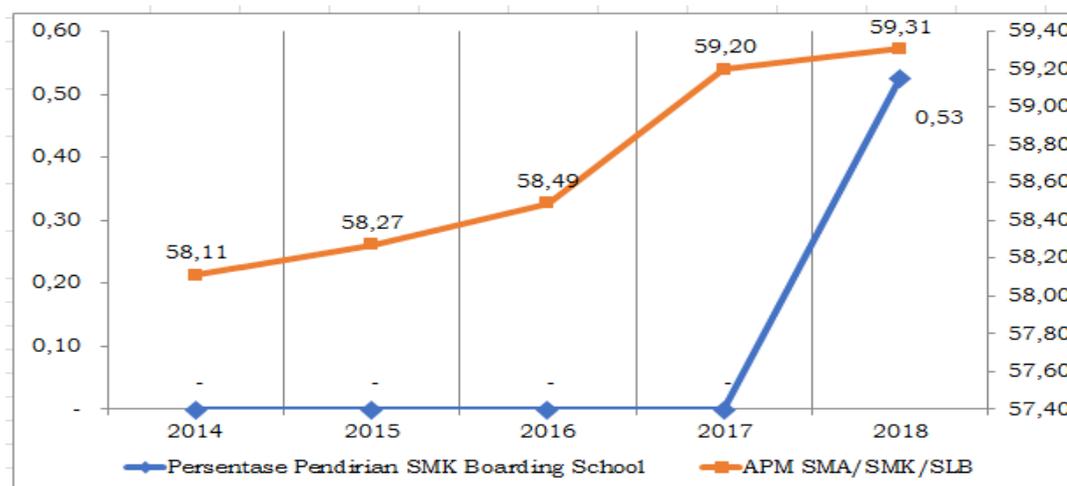


Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.14
Perkembangan Proporsi Anggaran Program Bantuan Beasiswa Daerah terhadap Peningkatan Akses Layanan Pendidikan SMA/SMK/SLB T.A. 2014 – 2018

Gambar di atas menjelaskan bahwa penurunan persentase Bantuan Beasiswa Daerah (SMA Taruna Nusantara Magelang Tahun 2014-2018 tidak berdampak langsung pada peningkatan APM SMA/SMK/SLB.

Belanja untuk program Pendirian SMK Boarding School terhadap total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 sebesar 0,53%, sedangkan di tahun tahun sebelumnya belum dianggarkan secara khusus program tersebut.



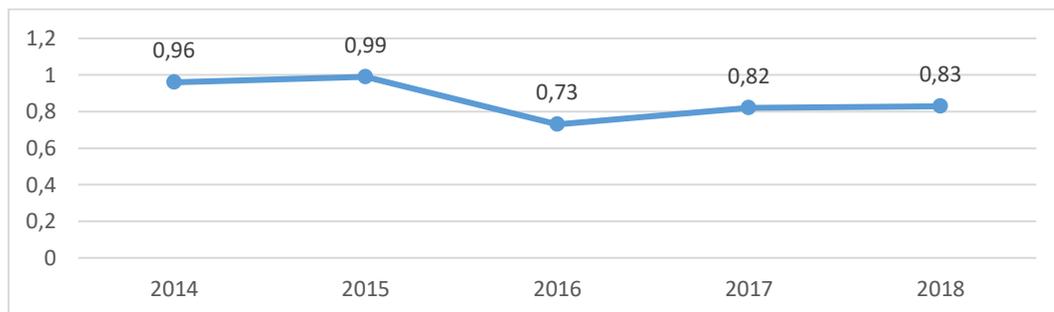
Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.15
Perkembangan Proporsi Anggaran Program Pendirian SMK Boarding School terhadap Peningkatan Akses Layanan Pendidikan SMA/SMK/SLB T.A. 2014 – 2018

Gambar di atas menjelaskan bahwa persentase Pendirian SMK Boarding School memberikan pengaruh yang signifikan dalam peningkatan APM SMA/SMK/SLB.

b. Analisis Belanja untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

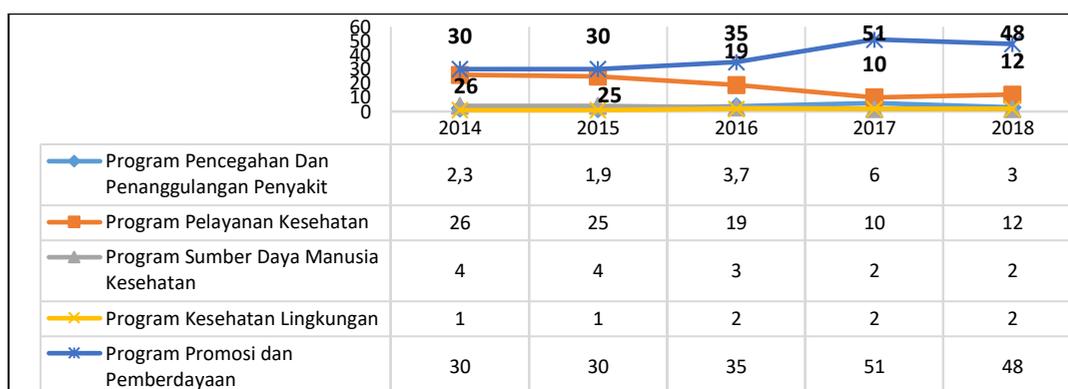
Proporsi belanja untuk meningkatkan derajat kesehatan berada pada Dinas Kesehatan terhadap total belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2014-2018 cenderung menurun, sebagaimana gambar berikut :



Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.16
Perkembangan Proporsi Anggaran pada Dinas Kesehatan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan terhadap Total Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah T.A. 2014 – 2018

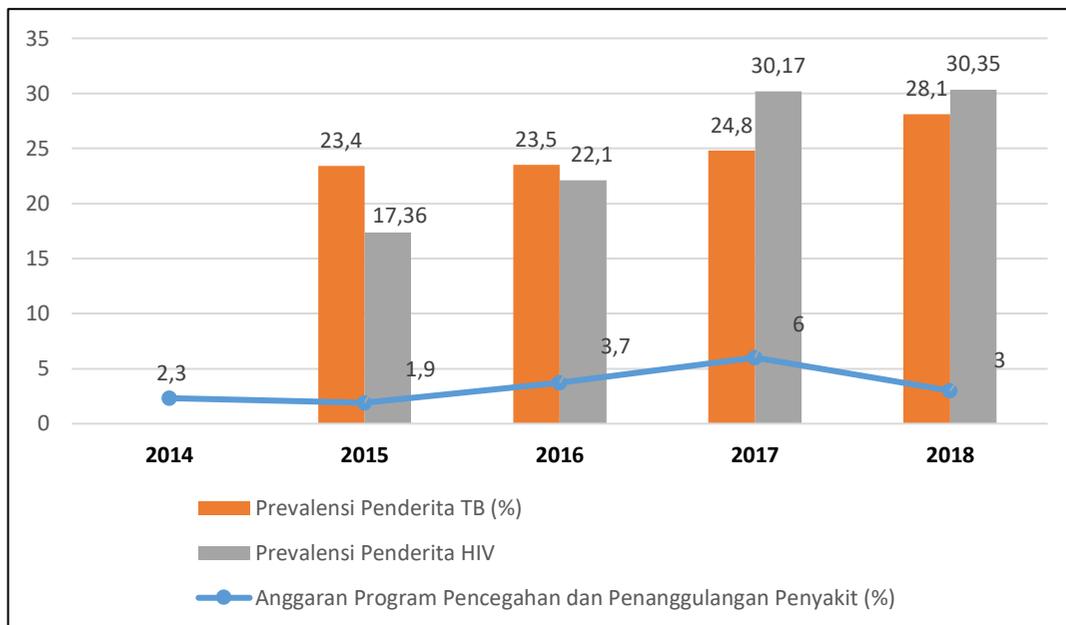
Komposisi anggaran program terhadap total belanja Dinas Kesehatan yang dilaksanakan sejak tahun 2014-2018 menunjukkan tren yang fluktuatif. Program Promosi dan Pemberdayaan memiliki porsi anggaran terbesar diantara program yang lain. Sedangkan untuk Program Kesehatan Lingkungan memiliki porsi anggaran terkecil.



Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.17
Perkembangan Proporsi Anggaran Program pada Dinas Kesehatan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan terhadap Total Belanja Dinas Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah T.A. 2014 – 2018

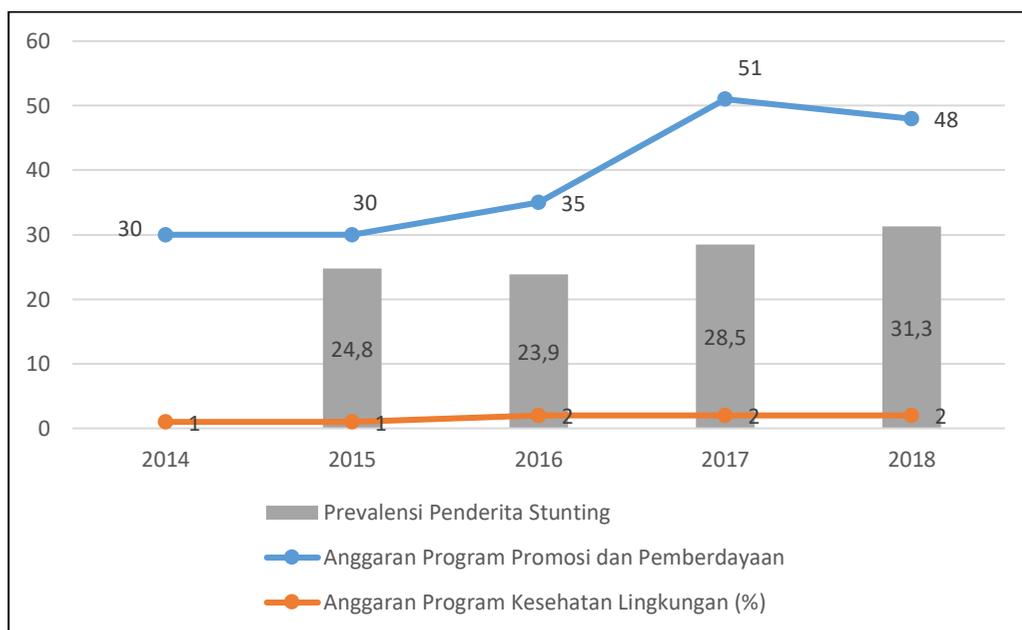
Proporsi anggaran untuk program pencegahan dan penanggulangan penyakit memiliki porsi anggaran yang fluktuatif yang bertujuan untuk pencegahan kesakitan, kematian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, Jika dikaitkan dengan capaian prevalensi penderita TB (%) dan prevalensi penderita HIV (%) terlihat hubungan yang berbanding lurus dengan jumlah penderita.



Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.18
Perkembangan Proporsi Anggaran Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terhadap Prevalensi Penderita TB (%) dan Prevalensi Penderita HIV (%) di Provinsi Jawa Tengah T.A. 2014 – 2018

Untuk penanganan *stunting* didukung melalui dua program utama yaitu Program Kesehatan Lingkungan dan Program Promosi dan Pemberdayaan. Program Promosi dan Pemberdayaan memiliki porsi anggaran terbesar pada belanja Dinas Kesehatan mengalami peningkatan yang cukup besar di tahun 2017. Sedangkan anggaran untuk Kesehatan Lingkungan memiliki porsi anggaran yang cukup kecil. Jika dikaitkan dengan angka Prevalensi Penderita Stunting setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, maka program yang ada harus diarahkan pada upaya Promotif dan Preventif.



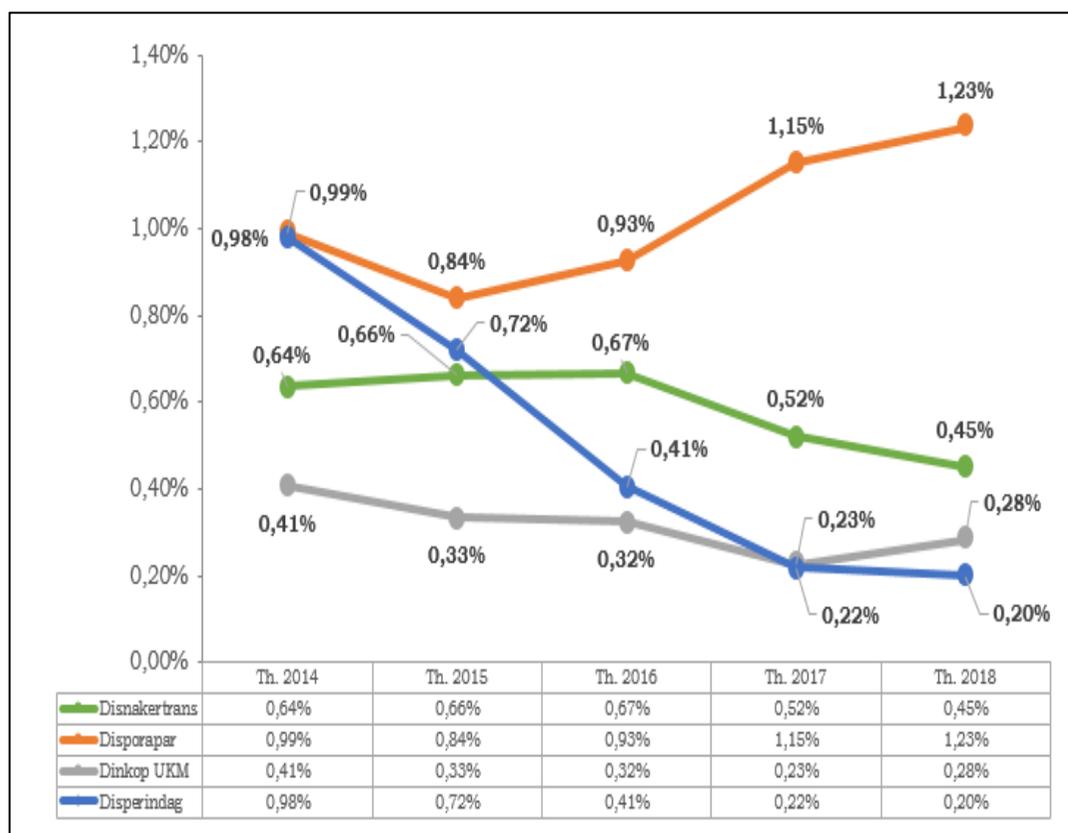
Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.19
Perkembangan Proporsi Anggaran Program Kesehatan Lingkungan dan Program Promosi & Pemberdayaan terhadap Prevalensi Penderita Stunting Di Provinsi Jawa Tengah T.A. 2014 – 2018

c. Analisis Belanja untuk Menurunkan Pengangguran

Belanja untuk menurunkan pengangguran berada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Dalam kurun waktu tahun 2014-2018 proporsi anggaran Disnakertrans, Dinkop UKM dan Disperindag terhadap total belanja daerah cenderung menurun. Sedangkan proporsi anggaran Disporapar terhadap total belanja daerah masih cenderung meningkat, sebagaimana gambar berikut.

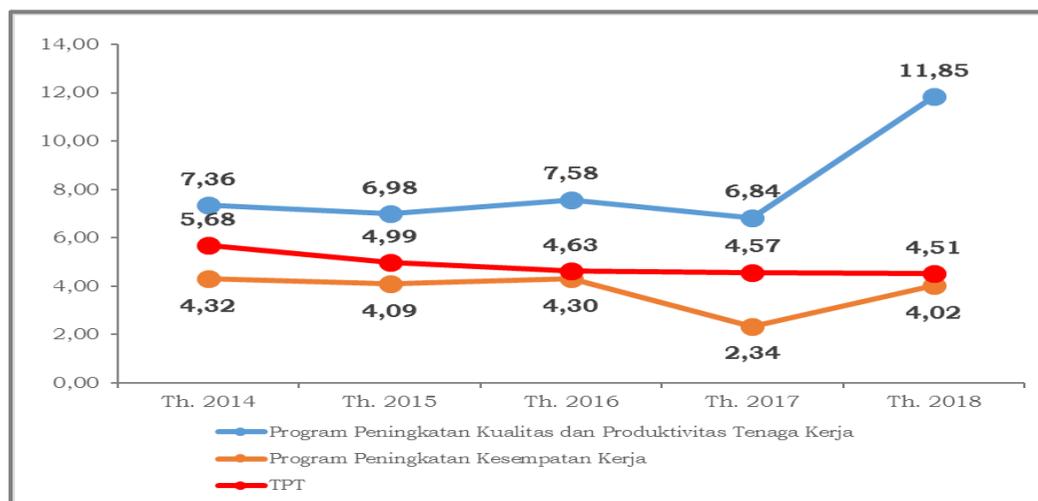


Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.20
Perkembangan Proporsi Anggaran pada Perangkat Daerah untuk Menurunkan Pengangguran terhadap Total Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah T.A. 2014 - 2018

Untuk menambah kesempatan kerja baru pada sektor formal diwujudkan melalui program peningkatan kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan pemuda, pendidikan perkoperasian dan UKM, pengembangan produk tekstil dan alas kaki, penguatan dan pengembangan industri agro serta penguatan dan pengembangan industri non agro. Selanjutnya untuk mengurangi resiko kehilangan pekerjaan bagi kelompok rentan diwujudkan melalui program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Belanja untuk program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja terhadap total belanja Disnakertrans, dalam kurun waktu tahun 2014-2018 cenderung meningkat namun belanja untuk program peningkatan kesempatan kerja cenderung menurun, sebagaimana gambar berikut.

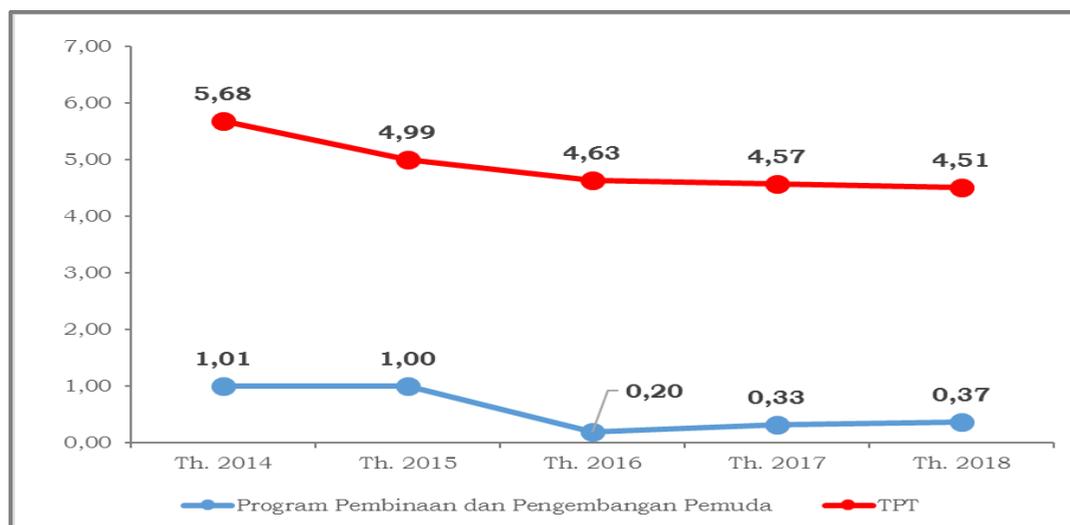


Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.21
Perkembangan Proporsi Anggaran Program pada Disnakertrans terhadap Penurunan Pengangguran T.A. 2014 - 2018

Gambar di atas menjelaskan bahwa tren peningkatan persentase belanja program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja memberikan dampak positif terhadap penurunan pengangguran, namun proporsi belanja program peningkatan kesempatan kerja (trennya menurun) belum memberikan dampak positif dalam penurunan pengangguran.

Belanja untuk program pembinaan dan pengembangan pemuda terhadap total belanja Disporapar dalam kurun waktu tahun 2014-2018 cenderung menurun, sebagaimana gambar berikut.

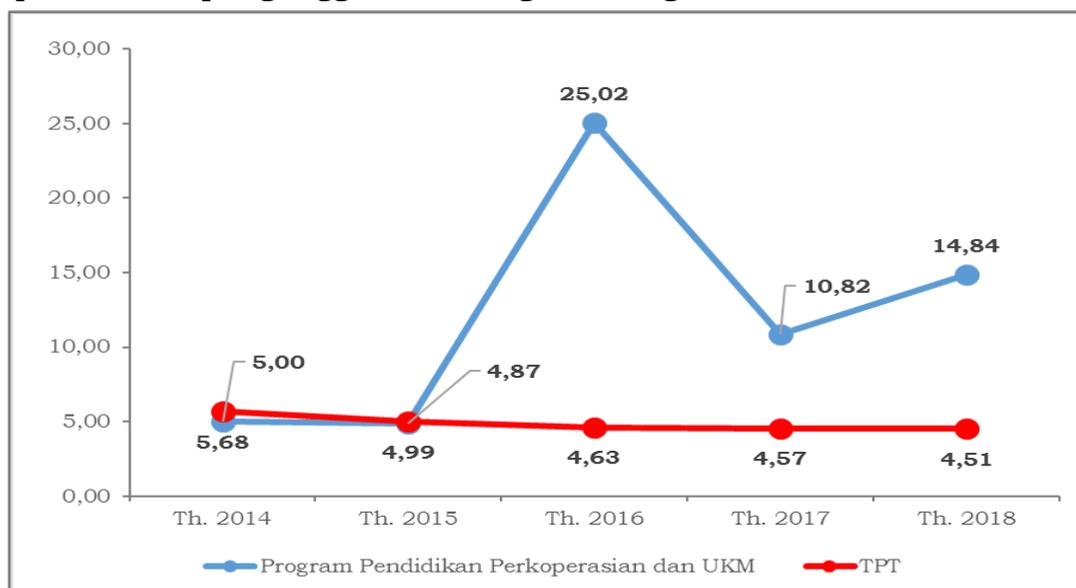


Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.22
Perkembangan Proporsi Anggaran Program pada Disporapar terhadap Penurunan Pengangguran T.A. 2014 - 2018

Gambar di atas menjelaskan bahwa penurunan persentase belanja program pembinaan dan pengembangan pemuda pada Tahun 2014-2016 tidak berdampak langsung pada penurunan pengangguran. Meskipun persentasenya mulai meningkat kembali (relatif kecil) dalam 2 tahun terakhir, namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam penurunan pengangguran.

Belanja untuk program pendidikan perkoperasian dan UKM terhadap total belanja Dinkop UKM, dalam kurun waktu tahun 2014-2018 fluktuatif, dan tidak berpengaruh langsung terhadap penurunan pengangguran, sebagaimana gambar berikut.

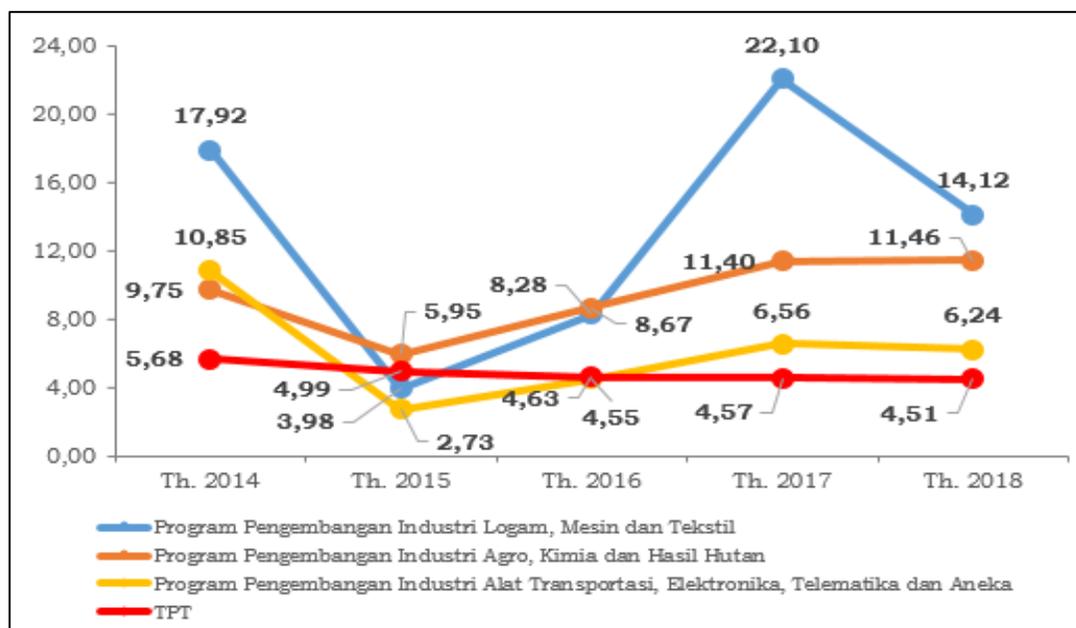


Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.23
Perkembangan Proporsi Anggaran Program pada Dinkop dan UKM terhadap Penurunan Pengangguran T.A. 2014 – 2018

Gambar di atas menjelaskan bahwa penurunan persentase belanja program pendidikan perkoperasian dan UKM pada Tahun 2014-2016 tidak berdampak langsung pada penurunan pengangguran. Meskipun persentasenya mulai meningkat kembali (relatif kecil) dalam 2 tahun terakhir, namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam penurunan pengangguran.

Belanja untuk program pengembangan produk tekstil dan alas kaki, penguatan dan pengembangan industri agro serta penguatan dan pengembangan industri non agro terhadap total belanja Disperindag, dalam kurun waktu tahun 2014-2018 juga fluktuatif dan tidak berpengaruh langsung terhadap penurunan pengangguran sebagaimana gambar berikut.



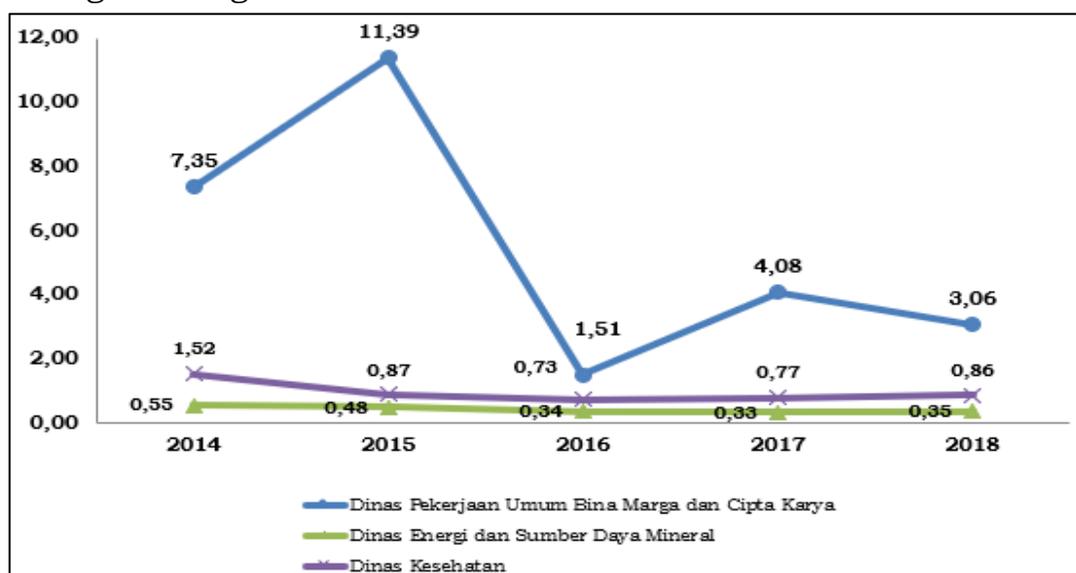
Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.24
Perkembangan Proporsi Anggaran Program pada Disperindag terhadap Penurunan Pengangguran T.A. 2014 - 2018

d. Analisis Belanja untuk Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak

Belanja untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak di Jawa Tengah berada pada 3 perangkat daerah yaitu 1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK); 2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM); serta 3) Dinas Kesehatan.

Dalam kurun waktu tahun 2014-2018 proporsi anggaran masing-masing dinas tersebut terhadap APBD cenderung menurun sebagaimana gambar berikut :



Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.25
Proporsi Anggaran pada Perangkat Daerah terhadap Total Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Meningkatkan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak T.A. 2014 - 2018

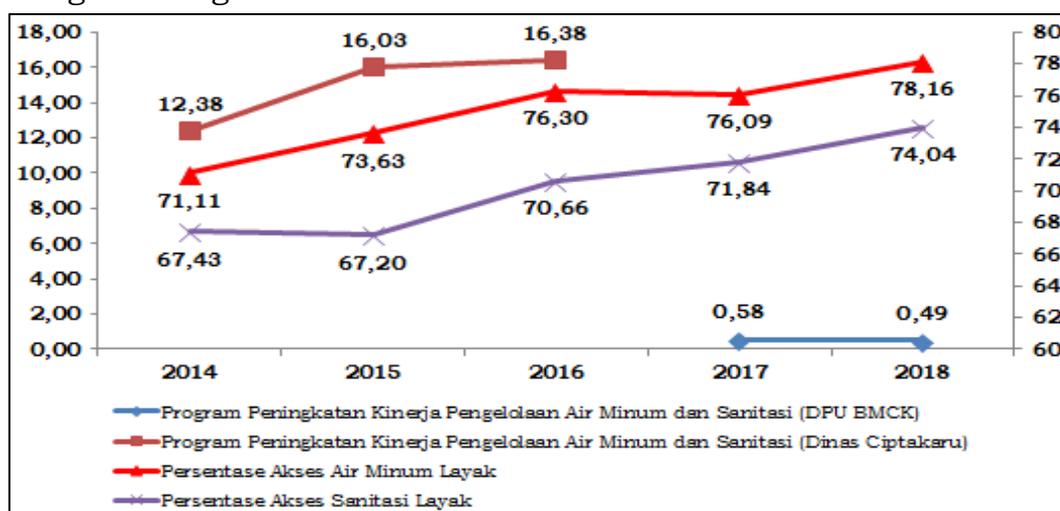
Untuk meningkatkan akses air minum layak diwujudkan melalui program 1) program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi; dan 2) program pengembangan kegeologian/program pengembangan pertambangan dan air tanah. Sedangkan untuk meningkatkan akses sanitasi layak diwujudkan melalui 1) program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi; serta 2) program kesehatan lingkungan atau kesehatan masyarakat.

Belanja untuk program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi dalam kurun waktu 2014-2016 terdapat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Belanja program tersebut konsisten meningkat dan diikuti meningkatnya akses sumber air minum dan sanitasi layak. Pada tahun 2017-2018 belanja program tersebut terdapat pada DPU BMCK karena adanya perubahan kelembagaan perangkat daerah.

Penurunan belanja program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi pada tahun 2017-2018, sebagai akibat adanya pemindahan anggaran karena perubahan kelembagaan, tidak memberikan pengaruh langsung terhadap akses sumber air minum dan sanitasi layak karena ternyata aksesnya meningkat.

Perubahan tersebut menyebabkan penurunan belanja program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi. Penurunan belanja program tidak memberikan pengaruh langsung terhadap akses sumber air minum dan sanitasi layak karena ternyata aksesnya malah meningkat.

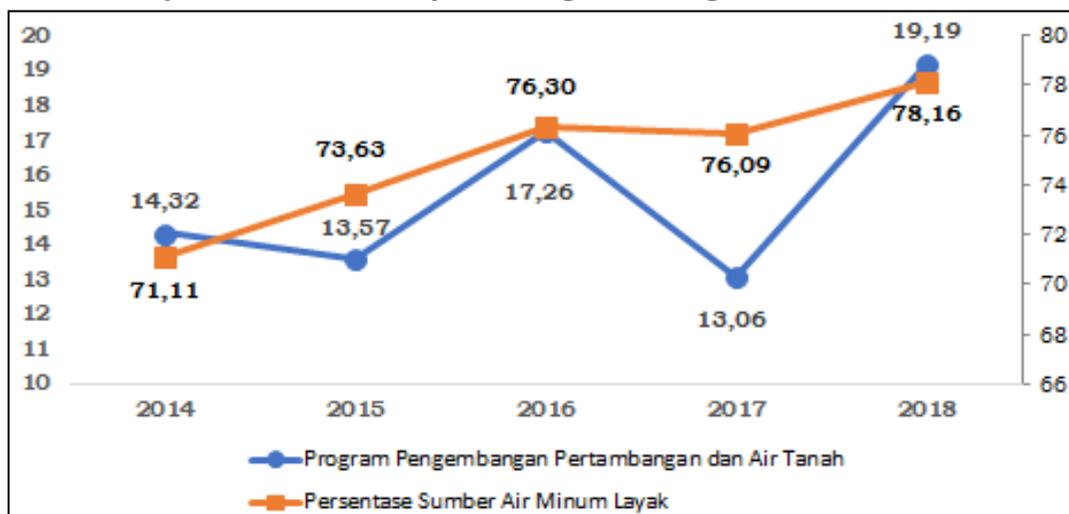
Belanja program kesehatan lingkungan/kesehatan masyarakat dalam 4 tahun terakhir cenderung meningkat dan diikuti meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak sebagaimana gambar berikut :



Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.26
Perkembangan Proporsi Anggaran Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Sanitasi dan Persentase Akses Air Minum dan Sanitasi Layak T.A. 2014 – 2018

Belanja untuk program pengembangan pertambangan dan air tanah terhadap total belanja Dinas ESDM dalam kurun waktu 2014-2018 fluktuatif dan memberikan berpengaruh terhadap peningkatan akses air minum layak karena ketika anggaran program meningkat diikuti dengan peningkatan akses sumber air minum layak dan sebaliknya, sebagaimana gambar berikut :

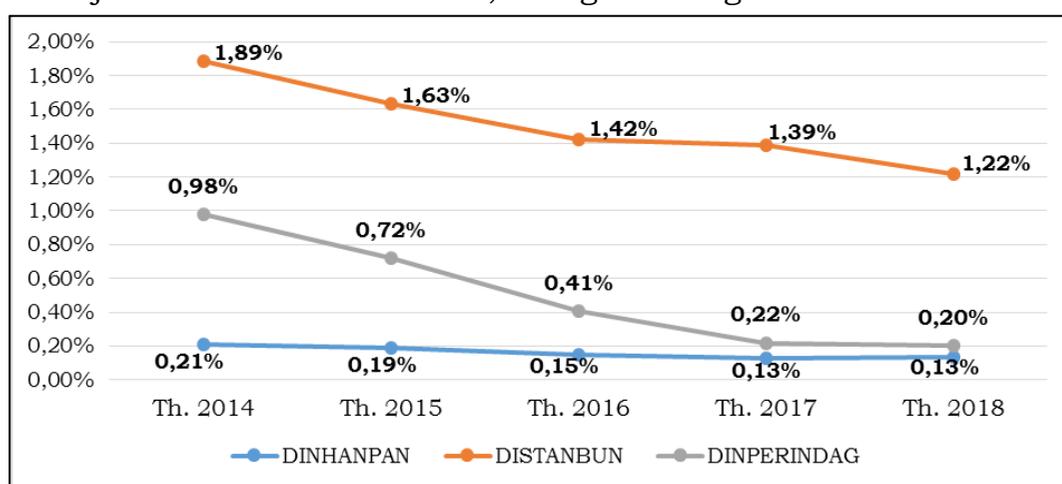


Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.27
Perkembangan Proporsi Anggaran Program Pengembangan Pertambangan & Air Tanah dan Persentase Akses Air Minum Layak T.A. 2014 - 2018

e. Analisis Belanja untuk Peningkatan Konsumsi Pangan

Belanja untuk meningkatkan konsumsi pangan khususnya beras berada pada Dinas Ketahanan Pangan (Dinhanpan), Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag). Dalam kurun waktu tahun 2014-2018 proporsi anggaran ketiga dinas tersebut terhadap total belanja daerah terus menurun, sebagaimana gambar berikut.

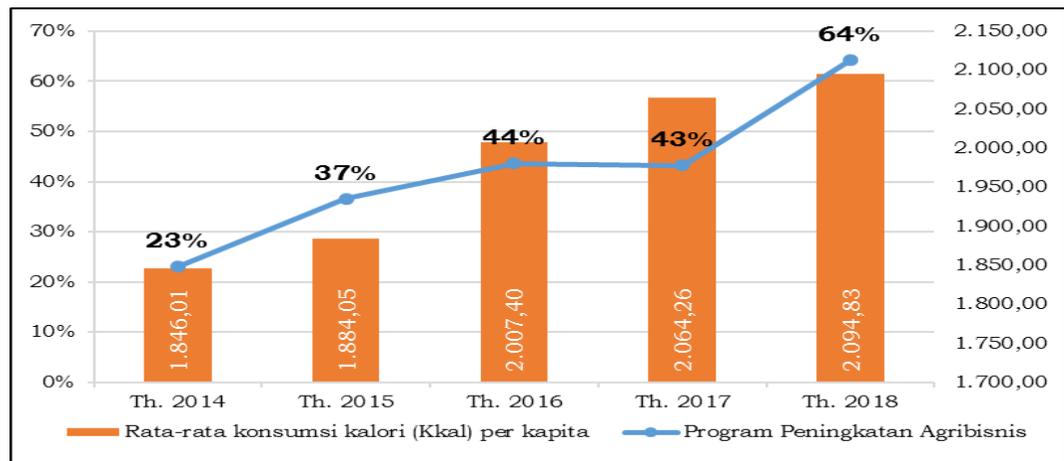


Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah.

Gambar 5.28
Perkembangan Proporsi Anggaran pada Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Konsumsi Pangan terhadap Total Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah T.A. 2014 - 2018

Untuk meningkatkan produksi padi diwujudkan melalui program peningkatan agribisnis. Selanjutnya untuk menjaga stabilitas harga beras diwujudkan melalui program peningkatan ketahanan pangan dan program peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri, dan pemberdayaan UDKM.

Belanja untuk program peningkatan agribisnis terhadap total belanja Distanbun dalam kurun waktu tahun 2014-2018 cenderung meningkat, sebagaimana gambar berikut.

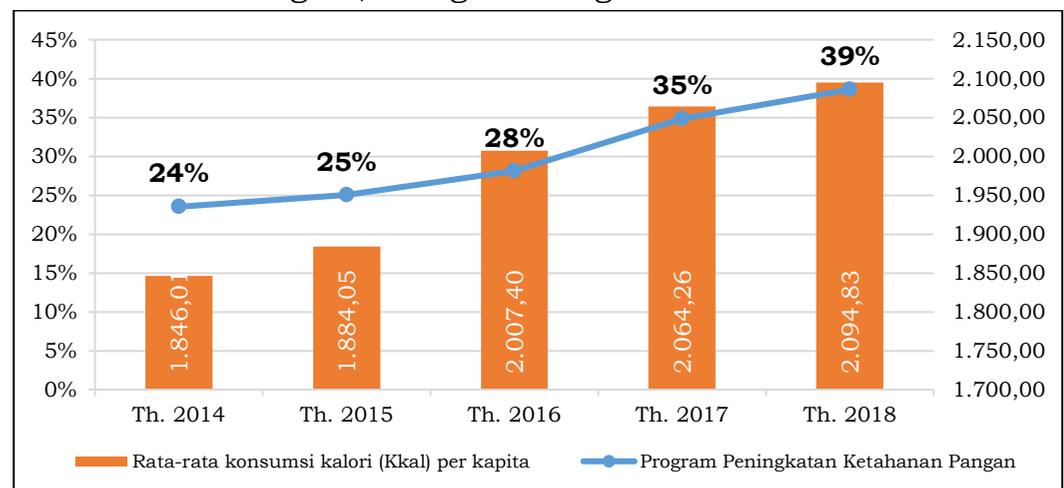


Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah

Gambar 5.29
Perkembangan Proporsi Anggaran Program Peningkatan Agribisnis terhadap Konsumsi Kalori (Kkal) per Kapita T.A. 2014 – 2018

Gambar di atas menjelaskan bahwa peningkatan persentase belanja program peningkatan agribisnis pada Tahun 2014-2018 memberikan kontribusi positif pada peningkatan konsumsi pangan. Meskipun persentasenya sempat menurun 1% di tahun 2017, namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan konsumsi pangan.

Belanja untuk program peningkatan ketahanan pangan terhadap total belanja Dinhanpan dalam kurun waktu tahun 2014-2018 terus meningkat, sebagaimana gambar berikut :

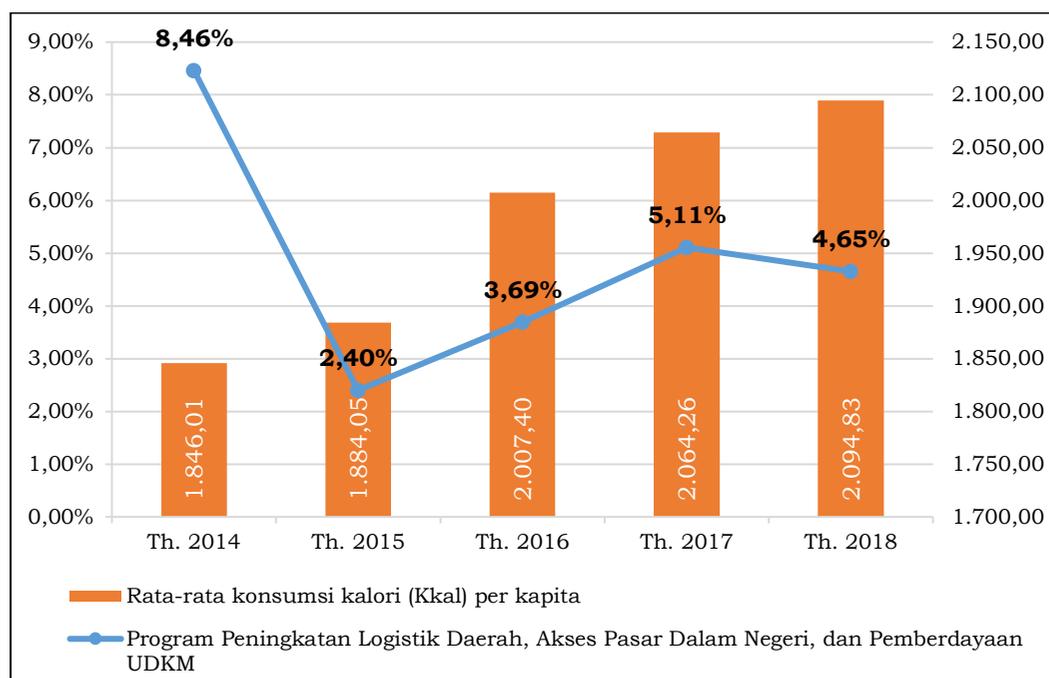


Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah

Gambar 5.30
Perkembangan Proporsi Anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan terhadap Konsumsi Kalori (Kkal) per Kapita T.A. 2014 – 2018

Gambar di atas menjelaskan bahwa peningkatan persentase belanja program peningkatan ketahanan pangan pada Tahun 2014-2018 memberikan kontribusi positif pada peningkatan konsumsi pangan.

Belanja untuk program peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri, dan pemberdayaan UDKM terhadap total belanja Dinperindag dalam kurun waktu tahun 2014-2018 cenderung menurun, sebagaimana gambar berikut.



Sumber: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, diolah

Gambar 5.31
Perkembangan Proporsi Anggaran Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar dalam Negeri, dan Pemberdayaan UDKM terhadap Konsumsi Kalori (Kkal) per Kapita T.A. 2014 – 2018

Gambar di atas menjelaskan bahwa penurunan persentase belanja program peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri, dan pemberdayaan UDKM tidak berdampak langsung pada peningkatan konsumsi pangan.

BAB VI
TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

A. TINJAUAN KEBIJAKAN

Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Jawa Tengah pada periode RPJMD 2013-2018 yang tertuang dalam misi kedua pembangunan daerah : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran, dalam rangka mewujudkan visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, dengan tujuan antara lain : 1) menurunkan jumlah penduduk miskin; 2) menurunkan jumlah penganggur; 3) mengembangkan Koperasi dan UMKM; 4) Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan; 5) Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS. Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya angka kemiskinan; menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka; Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM; Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan; Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM.

Pada periode RPJMD 2018-2023 penanggulangan kemiskinan masih menjadi prioritas pembangunan, yang tertuang dalam misi ketiga pembangunan daerah yaitu : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dalam rangka mewujudkan visi “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”, dengan tujuan antara lain: 1) kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata; dan 2) menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan. Sasaran yang ingin dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah: 1) meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah; 2) menurunnya pengangguran terbuka; dan 3) meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2013-2018 diwujudkan dalam bentuk :

1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin

Untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin terdapat beberapa kebijakan antara lain:

a. Kartu Jateng Sejahtera

Kartu Jateng Sejahtera (KJS) diberikan kepada fakir miskin di Jawa Tengah yang tidak produktif dan belum mendapatkan program

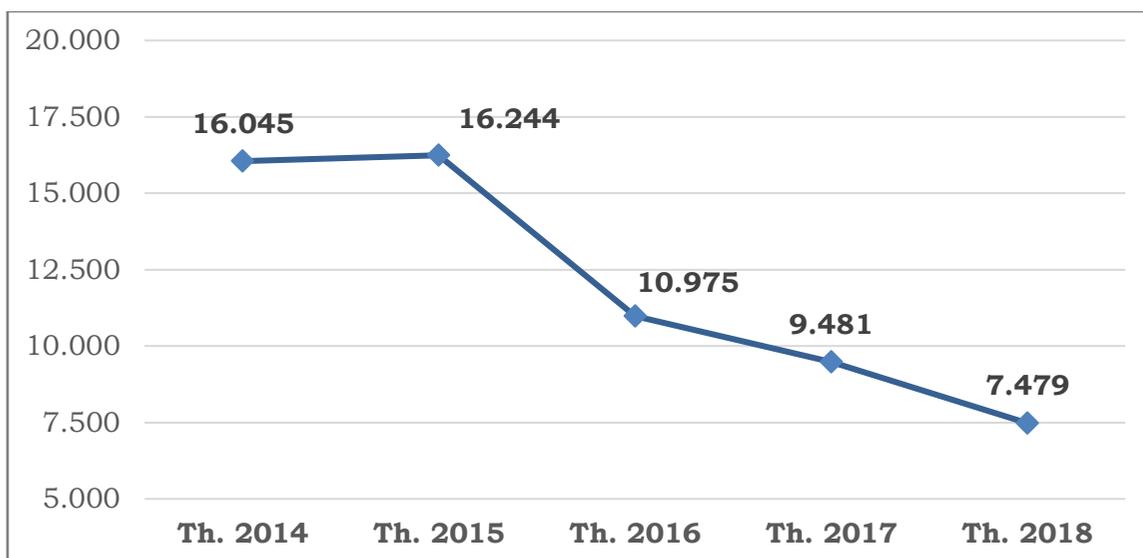
perlindungan sosial, sebagaimana tertuang dalam Pergub Jateng Nomor 40 Tahun 2017 tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera. Kebijakan ini berlaku sejak Tahun 2017 dengan kuota 12.764 penerima manfaat per tahun dan masih berlanjut hingga saat ini.

b. Jaminan Kesehatan Daerah

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) diberikan kepada setiap warga negara di Jawa Tengah dengan kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin dan penerima manfaat balai rehabilitasi sosial yang belum mempunyai jaminan kesehatan, sebagaimana tertuang dalam Pergub Jateng Nomor 21 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ke dalam program Jaminan Nasional. Kebijakan ini berlaku sejak Tahun 2015 dengan kuota 165.929 jiwa (sampai dengan tahun 2016), bertambah kuotanya menjadi 327.000 jiwa pada Tahun 2017 dan 2018.

c. Bantuan Siswa Miskin

Bantuan Siswa Miskin (BSM) diberikan kepada siswa SMA/SMK/SLB dari keluarga tidak mampu. Kebijakan ini berlaku sejak Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam Pergub Jateng Nomor 70 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, terakhir diatur dalam Pergub Jateng Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah penerima manfaat BSM semakin menurun, sebagaimana gambar berikut :



Gambar 6.1
Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Siswa Miskin di Jawa Tengah
Tahun 2014-2018

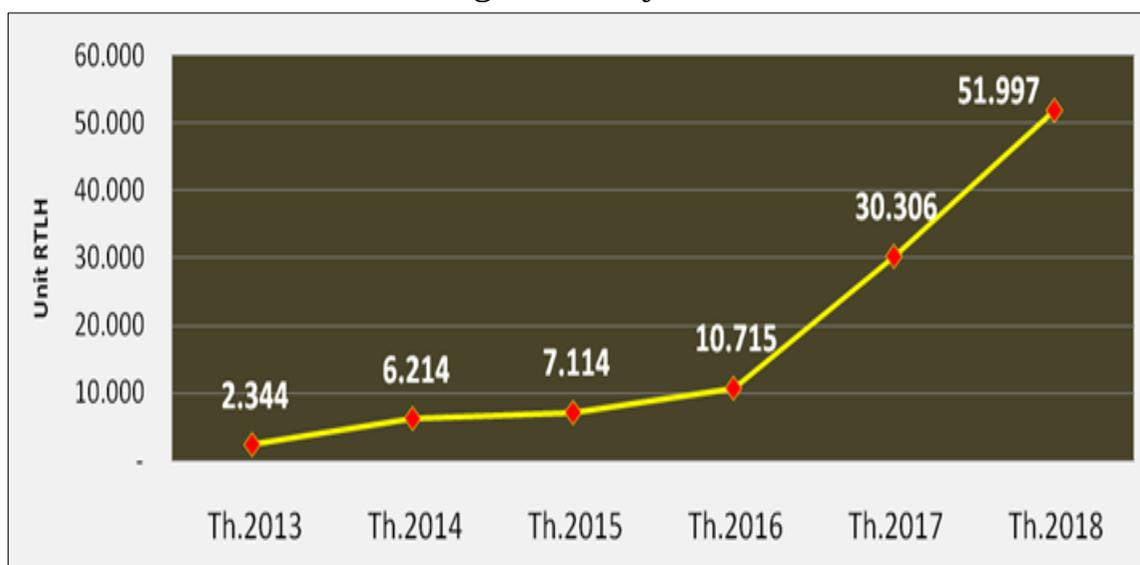
Berdasarkan gambar 6.1 penurunan penerima manfaat dikarenakan sebagian penerima manfaat BSM telah diakomodir melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat.

d. Pendirian SMK *Boarding School*

Untuk meringankan beban pengeluaran biaya Pendidikan bagi keluarga tidak mampu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendirikan 3 unit SMK Negeri Jawa Tengah dengan pola *boarding school* untuk menampung siswa miskin dan berprestasi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jateng Nomor 420/28 tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jawa Tengah. Tujuan pendirian SMK tersebut adalah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar dan menurunkan angka putus sekolah. Saat ini SMKN Jateng tersebut berada di 3 lokasi yaitu di Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga dan Kota Semarang. Kurikulum yang diajarkan meliputi Teknik Elektronika Industri, Teknik Instalasi Listrik, Teknik Pemesinan, Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, dan Teknik Bisnis Konstruksi dan Properti. Pada tahun 2020 akan dibangun asrama pada SMK negeri dengan pola semi *boarding school* di 15 kabupaten (Kabupaten Rembang, Blora, Grobogan, Demak, Sragen, Klaten, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Brebes, Pemalang, Wonogiri).

e. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Tengah dilaksanakan melalui Bantuan Stimulan Perbaikan RTLH pada Rumah Tangga Miskin yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, dengan kuota 3 unit RTLH per desa per tahun dengan nominal masing-masing RTLH sebesar Rp.10.000.000,-. Melalui stimulasi APBD tersebut, dalam kurun waktu tahun 2013-2018 telah tertangani sebanyak 51.997 unit RTLH.



Gambar 6.2
Jumlah Kumulatif Penanganan RTLH Melalui
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Stimulasi perbaikan RTLH bertujuan untuk menumbuhkan kembali gotong royong masyarakat; memperluas akses pembiayaan; serta sinergi penanganan dengan pusat, provinsi, kabupaten/kota, CSR, Baznas, dan lainnya. Penanganan RTLH di Jawa Tengah membutuhkan dukungan dan sinergi semua pihak karena sampai dengan tahun 2018 masih terdapat 1.525.399 unit RTLH. Penanganan RTLH sebagai salah satu upaya untuk perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik.

f. Stimulan Jamban

Kebijakan pemberian stimulan jamban merupakan upaya untuk meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat dan mempercepat capaian program *Open Defecation Free* (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan di Jawa Tengah. Sampai tahun 2018 jumlah pemberian stimulan jamban sebanyak 12.000 unit.

2. Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin

a. Kartu Tani

Kartu Tani merupakan Kartu Debit BRI CO-Breeding yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di mesin *Electronic Data Capture* (EDC) BRI yang ditempatkan dipengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya. Tujuannya adalah terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan Asas 6 (enam) Tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga) serta pemberian layanan perbankan bagi petani di Jawa Tengah. Kebijakan ini mulai sejak tahun 2015 berdasarkan Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 004/2015, Nomor B.122-DIR/KPM/03/2015, Tanggal 4 Maret 2015, tentang Kartu Tani sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2018 telah tersalurkan sebanyak 2.444.689 kartu tani.

b. Kartu Nelayan

Kartu Nelayan saat ini berfungsi sebagai identitas nelayan yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Layanan BBM Bersubsidi untuk Nelayan (SIMINA), yang bertujuan untuk memonitor dan mengendalikan distribusi *BBM* bersubsidi untuk nelayan Jawa Tengah. Sistem tersebut merupakan *'tools'* pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan dan menghindari penyimpangan sasaran distribusi *BBM* bersubsidi untuk nelayan. Pada tahun 2020 kartu tani akan dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai kartu identitas saja, namun juga dapat berfungsi untuk mengurus perijinan subsidi *BBM* dan asuransi nelayan. Sampai dengan tahun 2018 telah didistribusikan sebanyak 114.443 kartu nelayan di 16 kabupaten/ kota.

3. Mengembangkan dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil

a. KUR Mitra 02 dan KUR Mitra 25

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mitra 02 dan Mitra 25 merupakan program inisiasi Bank Jateng, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Program KUR Mitra 02 dan Mitra 25 merupakan bentuk keberpihakan kepada pengusaha kecil untuk mendapatkan/menambah modal dengan suku bunga rendah, tidak memerlukan jaminan agunan fisik, tidak dipungut biaya, serta memperoleh pelayanan edukasi masalah keuangan. Program tersebut diharapkan dapat mengena ke pelaku pasar usaha mikro dan ultramikro hingga UKM, termasuk usaha tani dan nelayan.

b. Sadewa Market

Sadewa Market merupakan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pengembangan KUMKM Berbasis Digital yang berfungsi untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk unggulan UMKM. Sistem ini dibuat untuk menjembatani UMKM dengan pasar agar produk-produk UMKM dapat bersaing dalam era digital 4.0.

4. Mensinergikan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

a. Pengendalian Inflasi Daerah

Inflasi daerah menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menekan bertambahnya masyarakat miskin yang diakibatkan melonjaknya harga kebutuhan pokok masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah dengan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga stabilitas harga ketika terjadi kenaikan harga BBM, musim kemarau dan penyebab lainnya.

b. Komitmen Membangun Sinergi Kebijakan dan Pemanfaatan Data Terpadu Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Komitmen membangun sinergi kebijakan dan pemanfaatan data terpadu untuk penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui rapat koordinasi TKPKD, *brainstorming* penanggulangan kemiskinan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan mendorong penggunaan data terpadu untuk intervensi penanggulangan kemiskinan.

c. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan. Bantuan keuangan tersebut diarahkan untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan, pengembangan rintisan desa berdikari menjadi Kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa dan operasional KPMD. Pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa diberikan sejak Tahun 2017 yang diatur dalam Pergub Jateng Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Desa,

yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub Jateng Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Pergub Jateng Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Desa.

B. PEMETAAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah yang sudah dilakukan dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Intervensi kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga melalui APBD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan untuk menambah jangkauan (kuota) yang dibiayai Pemerintah. Program-program tersebut diwujudkan melalui Kartu Jateng Sejahtera, Jaminan Kesehatan Daerah, Bantuan Siswa Miskin, SMK *Boarding School*, Penanganan RTLH, dan Stimulan Jamban bertujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Secara umum program-program tersebut sangat membantu masyarakat miskin, namun belum bisa menjangkau seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat karena keterbatasan anggaran dan validitas data penerima manfaat.

2. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Intervensi kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui APBD Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Program-program tersebut diwujudkan melalui pemberian kartu tani, kartu nelayan dan pelatihan-pelatihan melalui Balai Latihan Kerja dan sekolah lapang. Program-program tersebut bermanfaat untuk meningkatkan ketrampilan dan membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan namun belum menjadi fokus utama program penanggulangan kemiskinan dikarenakan anggaran yang tersedia masih difokuskan mendukung program-program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.

3. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Intervensi kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program ini diwujudkan melalui kerjasama dengan Bank Jateng berupa mitra 02 dan mitra 25 yang sangat membantu permodalan bagi wirausahawan baru dan wirausahawan yang membutuhkan modal tambahan. Selain memberikan fasilitas pemodal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan Aplikasi Sadewa Market untuk membantu

pemasaran produk UMKM secara online. Namun demikian program-program tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan karena kurangnya pendampingan terhadap debitur (masyarakat yang akan mengajukan pinjaman untuk permodalan usaha) maupun pelaku UMKM.

4. Kelompok Program Lainnya

Intervensi kelompok program lainnya yang dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, diwujudkan melalui menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan stabilitas harganya, serta pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa yang dilaksanakan secara swakelola dan padat karya.

C. TINJAUAN KELEMBAGAAN

1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Tengah.

TKPKD Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.2/131/2010, tanggal 31 Agustus 2010, sebagai tindak lanjut amanat Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.

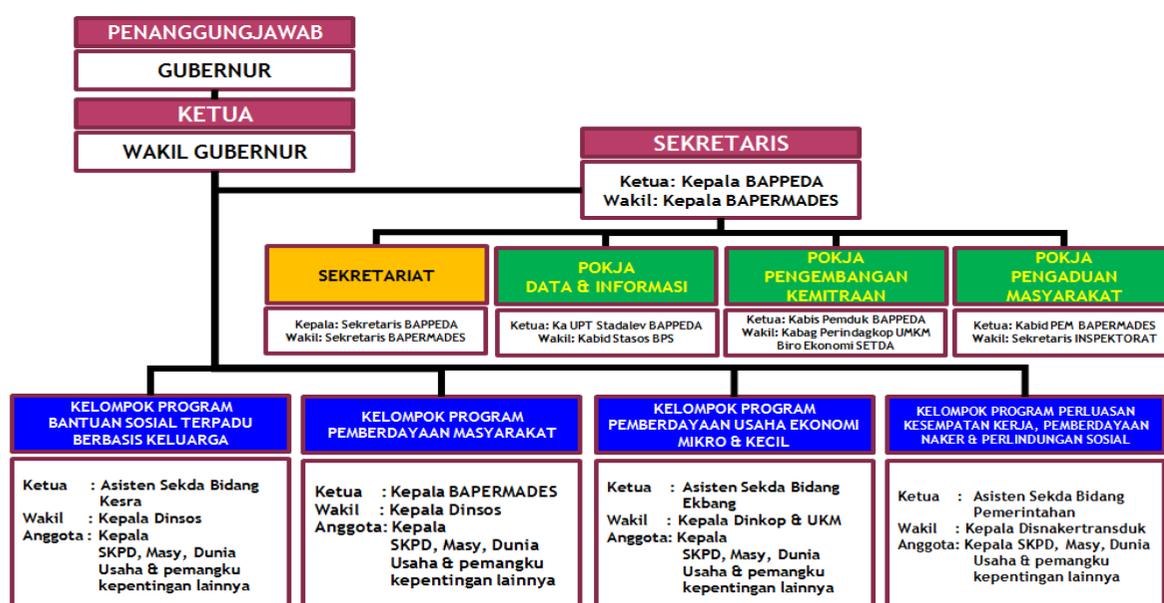
a. Tugas dan Fungsi TKPKD Provinsi Jawa Tengah:

- 1) Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di provinsi, dengan fungsi :
 - a) pengkoordinasian penyusunan SPKD Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b) penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c) pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d) pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e) pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan
- 2) Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi, dengan fungsi :
 - a) pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b) pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c) penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;

- d) pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e) pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f) penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

b. Struktur Kelembagaan

Struktur organisasi TKPKD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.2/131/2010, tanggal 31 Agustus 2010 sebagaimana bagan di bawah ini.



Gambar 6.3
Struktur Organisasi TKPKD Provinsi Jawa Tengah

c. Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah

Sejak dibentuk Tahun 2010 TKPKD Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan:

- 1) Kegiatan-kegiatan koordinatif dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- 2) Menghasilkan dokumen-dokumen seperti dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2012-2018, dokumen laporan tahunan kinerja TKPK Provinsi Jateng 2012-2018, dokumen SPKD 2015-2018.
- 3) Melakukan asistensi dan *coaching* terkait literasi data Basis Data Terpadu tahun 2015 kepada kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, antara lain :

- 1) Masih lemahnya komitmen penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
- 2) Masih terjadi exclusion error dan inclusion error pada data terpadu penanggulangan kemiskinan.

- 3) Belum optimalnya peran CSR dalam penanggulangan kemiskinan.
- 4) Belum intensifnya advokasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan TKPK kabupaten/kota.
- 5) Belum optimalnya penggunaan Basis Data Terpadu kemiskinan dalam intervensi penanggulangan kemiskinan pada dokumen perencanaan penganggaran daerah.

BAB VII

ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH

A. ISU STRATEGIS

Penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah membutuhkan percepatan karena kemiskinan masih cukup tinggi baik dari persentase maupun jumlahnya (absolut) serta laju penurunan yang lambat. Percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis dalam konteks kondisi umum daerah, termasuk kondisi makro ekonomi (pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran), serta secara khusus mempertajam analisis kondisi kemiskinan dalam dimensi konsumsi maupun multi dimensi (non konsumsi).

Isu strategi penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah juga dirumuskan berdasarkan prioritas pembangunan nasional dalam penanggulangan kemiskinan. Secara nasional dalam RPJMN 2020-2024 terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.

Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini dikembangkan pemerintah dalam upaya membuat kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

Konteks penajaman penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah perlu mempertimbangkan sebaran penduduk miskin yang masih didominasi oleh penduduk miskin perdesaan dan karakteristik kemiskinan perdesaan dengan kelompok sasaran petani (buruh petani, petani gurem dan pekerja serabutan) dan kelompok nelayan (buruh nelayan dan nelayan kecil).

Tiga karakteristik kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh

perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

Selain itu, dalam implementasinya upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah masih belum efektif karena adanya ketidaktepatan sasaran program dan kegiatan maupun lokasi intervensi penanggulangan kemiskinan. Hal ini terjadi karena belum terintegrasinya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, belum tervalidasinya data kemiskinan secara periodik, belum efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif, dan belum optimalnya pemberdayaan kelompok sasaran (petani dan nelayan) dan belum optimalnya pendampingan berkelanjutan kepada kelompok sasaran penerima program.

Isu-isu strategis kemiskinan di Jawa Tengah merepresentasikan kondisi masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan.

Oleh karena itu untuk mengatasi isu-isu tersebut penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah hendaknya diprioritaskan pada upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat melalui peningkatan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan), menciptakan peluang usaha baru untuk mengurangi pengangguran, perbaikan prasarana dasar (air minum dan sanitasi layak), serta menjamin kecukupan dan ketersediaan pangan terutama beras.

Secara rinci strategi penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya, melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses mutu layanan kesehatan yang merata serta penurunan angka kematian, kesakitan, dan kecacatan, serta peningkatan akses air minum dan sanitasi layak.
2. Penguatan *sustainable livelihood* dalam kerangka mengurangi pengangguran dan menjaga kelompok rentan dari kehilangan pekerjaan melalui peningkatan kondisi yang baik (*enabling environment*) bagi masuknya investasi baru, pengembangan *startup* wirausaha baru melalui pelatihan keterampilan usaha produktif berbasis sumber daya lokal dengan mempertimbangkan sasaran pemuda, perempuan dan kelompok rentan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat terutama pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, industri kreatif dan usaha kecil termasuk peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam rumah tangga (ekonomi rumah tangga); peningkatan peran dan

produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes).

3. Peningkatan ketersediaan dan kecukupan pangan terutama beras melalui peningkatan produksi dan menjaga stabilitas harga beras, serta stimulan lumbung pangan pada daerah rawan pangan dan pemberian bantuan sumber pangan lainnya.
4. Penguatan tata kelola dan koordinasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui peningkatan dan perluasan pengelolaan basis data penanggulangan kemiskinan, perbaikan program bantuan sosial berbasis individu dan rumah tangga serta program penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas yang didukung pendampingan secara terpadu dan tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat.

B. RENCANA AKSI DAERAH

Rencana Aksi Daerah (RAD) merupakan rencana intervensi prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan. RAD penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah diprioritaskan pada dimensi-dimensi yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), peningkatan pendapatan (ketenagakerjaan), serta dimensi yang berkaitan dengan prasarana dasar dan ketahanan pangan.

1. RAD pada Dimensi Pendidikan

Difokuskan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan SMA/MA/ Sederajat melalui prioritas intervensi :

- a. Mendekatkan akses dan memadainya sarpras pendidikan dengan prioritas wilayah di 9 kabupaten yaitu Kabupaten Wonosobo, Purbalingga, Cilacap, Temanggung, Pekalongan, Pemalang, Magelang, Batang dan Brebes.
- b. Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin untuk mengikuti pendidikan dengan prioritas wilayah di 12 kabupaten yaitu Kabupaten Batang, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, Temanggung, Cilacap, Jepara, Semarang, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Brebes.

Prioritas intervensi tersebut antara lain diwujudkan melalui program pembinaan SMA, program pembinaan SMK, dan program pendidikan khusus.

2. RAD pada Dimensi Kesehatan

Difokuskan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui prioritas intervensi :

- a. Peningkatan akses mutu layanan kesehatan yang merata dengan prioritas wilayah di 12 kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Pemalang, Wonosobo, Brebes, Purbalingga, Batang, Cilacap, Pekalongan, Kebumen, Magelang, Kendal, dan Purworejo.
- b. Penurunan angka kematian, kesakitan, dan kecacatan terutama dilakukan untuk :
 - 1) Mengendalikan penyebaran TB dengan prioritas wilayah di 7 kab/kota yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kendal, Brebes, Tegal, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan.

- 2) Mengendalikan penyebaran HIV dengan prioritas wilayah di 9 kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Grobogan, Pemalang, Kebumen, Wonosobo, Brebes, Tegal, Blora, dan Batang.
- 3) Mengurangi stunting dengan prioritas wilayah di 13 kab/kota yaitu Kabupaten Magelang, Tegal, Banjarnegara, Pekalongan, Rembang, Pemalang, Wonosobo, Brebes, Kendal, Banyumas, Purbalingga, Blora, dan Kota Tegal.

Prioritas intervensi tersebut diwujudkan melalui program pelayanan kesehatan, program sumber daya manusia kesehatan, program promosi dan pemberdayaan, program kesehatan lingkungan, serta program pencegahan dan pengendalian penyakit.

3. RAD pada Dimensi Ketenagakerjaan

Difokuskan untuk menurunkan pengangguran dengan prioritas intervensi:

- a. Penambahan kesempatan kerja baru pada sektor formal melalui:
 - 1) Bursa kerja dengan prioritas wilayah di 7 kabupaten yaitu Kabupaten Tegal, Cilacap, Demak, Brebes, Pemalang, Purbalingga, dan Kebumen.
 - 2) Wirausaha baru dengan prioritas wilayah di 5 kab/kota yaitu Kabupaten Kendal, Kebumen, Kota Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Magelang.
- b. Pengurangan resiko kehilangan pekerjaan bagi kelompok rentan dengan prioritas wilayah di 7 kabupaten yaitu Kabupaten Tegal, Cilacap, Brebes, Demak, Pemalang, Purbalingga, dan Kebumen.

Prioritas intervensi tersebut diwujudkan melalui program peningkatan kesempatan kerja, program pembinaan dan pengembangan pemuda, program pendidikan perkoperasian dan UKM, program pengembangan produk tekstil dan alas kaki, program penguatan dan pengembangan industri Agro, program penguatan dan pengembangan industri Non Agro, dan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

4. RAD pada Dimensi Infrastruktur Dasar

Difokuskan untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan dengan prioritas intervensi :

- a. Peningkatan layanan air minum dengan prioritas wilayah di 10 kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Boyolali, Grobogan, Blora, Jepara, Temanggung, dan Pekalongan
- b. Pengembangan sumber-sumber air minum dengan prioritas wilayah di 12 kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Magelang, Grobogan, Jepara, Pemalang, Tegal, dan Brebes.
- c. Peningkatan kepemilikan jamban dengan prioritas wilayah di 8 kabupaten yaitu Kabupaten Brebes, Cilacap, Banyumas, Pemalang, Tegal, Magelang, Purbalingga, dan Jepara.

Prioritas intervensi tersebut diwujudkan melalui program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi, program pengembangan kegeologian, dan program kesehatan masyarakat.

5. RAD pada Dimensi Ketahanan Pangan

Difokuskan untuk meningkatkan konsumsi pangan masyarakat miskin dengan prioritas intervensi :

- a. Peningkatan produksi padi dengan prioritas wilayah di 12 kab/kota yaitu Kabupaten Boyolali, Purworejo, Purbalingga, Jepara, Kendal, Temanggung, Semarang, Kudus, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Surakarta dan Kota Magelang.
- b. Menjaga stabilitas harga beras dengan prioritas wilayah di 6 kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen, Boyolali, Sukoharjo, Cilacap, Purbalingga dan Kudus.

Prioritas intervensi tersebut diwujudkan melalui program peningkatan agribisnis, program peningkatan ketahanan pangan (SISLOGDA), serta program peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM.

RAD penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah selain diprioritaskan melalui intervensi pada 5 dimensi tersebut, juga dilakukan melalui program-program lain yang mendukung penanggulangan kemiskinan antara lain penanganan RTLH, sambungan listrik murah, pembangunan sumur bor, bantuan modal usaha, pelayanan panti, baik melalui pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah maupun dukungan pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/Kota dan CSR).

Secara rinci rencana aksi daerah melalui APBD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada matriks sebagai berikut.

Tabel 7.1
RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019 - 2023

DIMENSI PENDIDIKAN															
MASALAH UTAMA YANG AKAN DIATASI : MENINGKATNYA AKSES LAYANAN PENDIDIKAN SMA/SMK/SLB															
NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
1	Dekatnya akses dan memadainya sarpras pada pendidikan SMA/SMK/SLB	Kabupaten Wonosobo, Purbalingga, Cilacap, Temanggung, Pekalongan, Pemalang, Magelang, Batang dan Brebes	Program Pembinaan SMA												
			Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMA (Beasiswa SMA Taruna Nusantara)	Jumlah Penerima Beasiswa SMA Taruna Nusantara	10 Siswa	2.146.560.000	10 Siswa	2.190.000.000	10 Siswa	2.200.000.000	10 Siswa	2.400.000.000	10 Siswa	2.500.000.000	Bidang Pembinaan SMA
			Kegiatan Penguatan Kelembagaan SMA	Jumlah Rekomendasi Perijinan	9 Dokumen	50.000.000	9 Dokumen	100.000.000	9 Dokumen	150.000.000	9 Dokumen	200.000.000	9 Dokumen	300.000.000	Bidang Pembinaan SMA
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA	Jumlah Sarana Prasarana SMA sesuai SNP	452 Paket	76.727.061.000	466 Paket	38.000.000.000	479 Paket	38.103.999.000	493 Paket	38.103.999.000	506 Paket	38.103.999.000	Bidang Pembinaan SMA
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA	Jumlah Sarpras SMA Wilayah I sesuai SNP	-	-	98 unit	2.720.000.000	98 unit	2.870.000.000	98 unit	3.020.000.000	98 unit	3.170.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan I
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA	Jumlah Sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP	-	-	57 unit	2.220.000.000	57 unit	2.370.000.000	57 unit	2.520.000.000	57 unit	2.670.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan II
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA	Jumlah Sarpras SMA Wilayah III sesuai SNP	-	-	56 unit	2.420.000.000	56 unit	2.570.000.000	56 unit	2.720.000.000	56 unit	2.870.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan III
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA	Jumlah Sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP	-	-	59 unit	1.920.000.000	59 unit	2.070.000.000	59 unit	2.220.000.000	59 unit	2.370.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan IV
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA	Jumlah Sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP	-	-	65 unit	3.320.000.000	65 unit	3.470.000.000	65 unit	3.620.000.000	65 unit	3.770.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan V
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA	Jumlah Sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP	-	-	61 unit	3.220.000.000	61 unit	3.370.000.000	61 unit	3.520.000.000	61 unit	3.670.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan VI
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA	Jumlah Sarpras SMA Wilayah VII sesuai SNP	-	-	62 unit	1.820.000.000	62 unit	1.970.000.000	62 unit	2.120.000.000	62 unit	2.270.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan VII
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA	Jumlah Sarpras SMA Wilayah VIII sesuai SNP	-	-	89 unit	3.220.000.000	89 unit	3.370.000.000	89 unit	3.520.000.000	89 unit	3.670.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan VIII
			Kegiatan	Jumlah Sarpras	-	-	69 unit	4.120.000.000	69 unit	4.270.000.000	69 unit	4.420.000.000	69 unit	4.570.000.000	Seksi Sekolah

NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022			2023	
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN		VOLUME	ANGGARAN
			Pemenuhan Sarpras SMA	SMA Wilayah IX sesuai SNP											Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan IX
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA	Jumlah Sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP	-	-	78 unit	3.220.000.000	78 unit	3.370.000.000	78 unit	3.520.000.000	78 unit	3.670.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan X
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA	Jumlah Sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP	-	-	42 unit	2.220.000.000	42 unit	2.370.000.000	42 unit	2.520.000.000	42 unit	2.670.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan XI
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA	Jumlah Sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP	-	-	68 unit	3.320.000.000	68 unit	3.470.000.000	68 unit	3.620.000.000	68 unit	3.770.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan XII
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA	Jumlah Sarpras SMA Wilayah XIII sesuai SNP	-	-	58 unit	2.520.000.000	58 unit	2.670.000.000	58 unit	2.820.000.000	58 unit	2.970.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan XIII
			Program Pembinaan SMK												
			Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SMK	Jumlah rekomendasi perijinan	80 Dokumen	100.000.000	50 Dokumen	138.902.000	50 Dokumen	400.000.000	50 Dokumen	400.000.000	50 Dokumen	410.000.000	Bidang Pembinaan SMK
			Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	Jumlah Sarana Prasarana SMK sesuai SNP	265 Paket	114.486.498.000	270 Paket	96.986.498.000	270 Paket	59.486.498.000	270 Paket	544.864.980.000	270 Paket	54.552.641.000	Bidang Pembinaan SMK
			Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	Jumlah Sarpras SMK Wilayah I sesuai SNP	-	-	133 Unit	2.398.200.000	133 Unit	2.798.200.000	133 Unit	2.898.200.000	133 Unit	2.948.200.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan I
			Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	Jumlah Sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP	-	-	109 Unit	2.308.200.000	109 Unit	3.208.200.000	109 Unit	3.308.200.000	109 Unit	3.358.200.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan II
			Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	Jumlah Sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP	-	-	110 Unit	3.723.200.000	110 Unit	4.123.200.000	110 Unit	4.223.200.000	110 Unit	4.273.200.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan III
			Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	Jumlah Sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP	-	-	105 Unit	2.478.800.000	105 Unit	2.878.800.000	105 Unit	2.978.800.000	105 Unit	3.028.800.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan IV
			Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	Jumlah Sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP	-	-	155 Unit	3.967.600.000	155 Unit	4.367.600.000	155 Unit	4.467.600.000	155 Unit	4.517.600.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan V
			Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	Jumlah Sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP	-	-	179 Unit	3.992.000.000	179 Unit	4.392.000.000	179 Unit	5.992.000.000	179 Unit	6.042.000.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan VI
			Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	Jumlah Sarpras SMK Wilayah VII sesuai SNP	-	-	80 Unit	2.307.600.000	80 Unit	2.707.600.000	80 Unit	3.307.600.000	80 Unit	3.357.600.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan VII

NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022			2023	
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN		VOLUME	ANGGARAN
			SMK												Pendidikan VII
			Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	Jumlah Sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP	-	-	151 Unit	3.477.600.000	151 Unit	3.877.600.000	151 Unit	3.977.600.000	151 Unit	4.027.600.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan VIII
			Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	Jumlah Sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP	-	-	123 Unit	4.715.800.000	123 Unit	5.115.800.000	123 Unit	8.215.800.000	123 Unit	8.265.800.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan IX
			Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	Jumlah Sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP	-	-	112	4.047.600.000	112	4.447.600.000	112	4.547.600.000	112	4.597.600.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan X
			Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	Jumlah Sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP	-	-	59	2.978.200.000	59	3.378.200.000	59	3.478.200.000	59	3.528.200.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan XI
			Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	Jumlah Sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP	-	-	166 Unit	4.477.000.000	166 Unit	4.877.000.000	166 Unit	4.977.000.000	166 Unit	50.270.000.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan XII
			Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	Jumlah Sarpras SMK Wilayah XIII sesuai SNP	-	-	93 Unit	3.308.200.000	93 Unit	3.708.200.000	93 Unit	3.808.200.000	93 Unit	3.858.200.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan XIII
			Program Pendidikan Khusus												
			Kegiatan Penguatan Kelembagaan SLB	Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan SLB	12 Dokumen	89.120.000	10 Dokumen	125.000.000	10 Dokumen	125.000.000	10 Dokumen	125.000.000	10 Dokumen	125.000.000	Bidang Pembinaan Diksus
			Kegiatan Penguatan Kelembagaan SLB	Penguatan Pusat Layanan Khusus	2 Unit	98.220.000	2 Unit	185.598.000	2 Unit	430.598.000	2 Unit	430.598.000	2 Unit	430.598.000	Bidang Pembinaan Diksus
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP	24 Paket	2.310.160.000	28 Paket	1.000.000.000	32 Paket	1.000.000.000	36 Paket	1.100.000.000	40 Paket	1.200.000.000	Bidang Pembinaan Diksus
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	Jumlah ruang dan alat terapi Pusat Layanan Khusus	-		0 Unit	250.160.000	0 Unit	250.160.000	0 Unit	250.160.000	0 Unit	350.160.000	Bidang Pembinaan Diksus
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	Jumlah Sarpras SLB Wilayah I sesuai SNP	-		22 Unit	215.000.000	22 Unit	215.000.000	22 Unit	315.000.000	22 Unit	335.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan I
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	Jumlah Sarpras SLB Wilayah II sesuai SNP	-		3 Unit	10.000.000	3 Unit	250.000.000	3 Unit	350.000.000	3 Unit	370.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan II
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	Jumlah Sarpras SLB Wilayah III sesuai SNP	-		9 Unit	275.000.000	9 Unit	275.000.000	9 Unit	375.000.000	9 Unit	395.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan III
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	Jumlah Sarpras SLB Wilayah IV sesuai SNP	-		7 Unit	10.000.000	7 Unit	250.000.000	7 Unit	350.000.000	7 Unit	370.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan IV
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	Jumlah Sarpras SLB Wilayah V sesuai SNP	-		30 Unit	275.000.000	30 Unit	275.000.000	30 Unit	375.000.000	30 Unit	395.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa

NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022			2023	
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN		VOLUME	ANGGARAN
															Dinas Pendidikan V
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	Jumlah Sarpras SLB Wilayah VI sesuai SNP	-		28 Unit	10.000.000	28 Unit	250.000.000	28 Unit	350.000.000	28 Unit	370.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan VI
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	Jumlah Sarpras SLB Wilayah VII sesuai SNP	-		24 Unit	275.000.000	24 Unit	275.000.000	24 Unit	375.000.000	24 Unit	395.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan VII
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	Jumlah Sarpras SLB Wilayah VIII sesuai SNP	-		12 Unit	275.000.000	12 Unit	275.000.000	12 Unit	375.000.000	12 Unit	395.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan VIII
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	Jumlah Sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP	-		12 Unit	275.000.000	12 Unit	275.000.000	12 Unit	375.000.000	12 Unit	395.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan IX
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	Jumlah Sarpras SLB Wilayah X sesuai SNP	-		8 Unit	85.000.000	8 Unit	85.000.000	8 Unit	185.000.000	8 Unit	205.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan X
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	Jumlah Sarpras SLB Wilayah XI sesuai SNP	-		4 Unit	125.000.000	4 Unit	125.000.000	4 Unit	225.000.000	4 Unit	245.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan XI
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	Jumlah Sarpras SLB Wilayah XII sesuai SNP	-		5 Unit	10.000.000	5 Unit	250.000.000	5 Unit	350.000.000	5 Unit	370.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan XII
			Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	Jumlah Sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP	-		10 Unit	10.000.000	10 Unit	250.000.000	10 Unit	350.000.000	10 Unit	370.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan XIII
2	mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin untuk mengikuti pendidikan	Kabupaten Batang, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, Temanggung, Cilacap, Jepara, Semarang, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Brebes.	Program Pembinaan SMA												
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	Jumlah dokumen tata kelola BOS dan BOP SMA	12 Dokumen	342.840.000	12 Dokumen	400.000.000	12 Dokumen	450.000.000	12 Dokumen	455.000.000	12 Dokumen	460.000.000	Bidang Pembinaan SMA
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	Jumlah siswa SMA penerima BOS dan BOP	620.634 Siswa	736.173.200.000	639.254 Siswa	432.926.972.000	658.430 Siswa	433.876.972.000	678.184 Siswa	434.877.971.000	698.530 Siswa	435.941.969.000	Bidang Pembinaan SMA
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	26.507.000.000	4 Dokumen	26.607.000.000	4 Dokumen	26.757.000.000	4 Dokumen	26.857.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan I
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	20.685.000.000	4 Dokumen	20.785.000.000	4 Dokumen	20.935.000.000	4 Dokumen	21.035.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan II
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	25.191.000.000	4 Dokumen	25.291.000.000	4 Dokumen	25.441.000.000	4 Dokumen	25.541.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan III
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	18.489.000.000	4 Dokumen	18.589.000.000	4 Dokumen	18.739.000.000	4 Dokumen	18.839.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan IV

NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	27.477.000.000	4 Dokumen	27.577.000.000	4 Dokumen	27.727.000.000	4 Dokumen	27.827.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan V
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	25.662.000.000	4 Dokumen	25.762.000.000	4 Dokumen	25.912.000.000	4 Dokumen	26.012.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan VI
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	17.629.000.000	4 Dokumen	17.729.000.000	4 Dokumen	17.879.000.000	4 Dokumen	17.979.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan VII
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	24.896.000.000	4 Dokumen	24.996.000.000	4 Dokumen	25.146.000.000	4 Dokumen	25.246.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan VIII
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	28.718.000.000	4 Dokumen	28.818.000.000	4 Dokumen	28.968.000.000	4 Dokumen	29.068.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan IX
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	27.301.000.000	4 Dokumen	27.401.000.000	4 Dokumen	27.551.000.000	4 Dokumen	27.651.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan X
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	19.954.000.000	4 Dokumen	20.054.000.000	4 Dokumen	20.204.000.000	4 Dokumen	20.304.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan XI
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	27.872.000.000	4 Dokumen	27.972.000.000	4 Dokumen	28.122.000.000	4 Dokumen	28.222.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan XII
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	18.721.000.000	4 Dokumen	18.821.000.000	4 Dokumen	18.971.000.000	4 Dokumen	19.071.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan XIII
			Program Pembinaan SMK												
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	Jumlah dokumen Tata Kelola Manajemen BOS dan BOP SMK Negeri di Jawa Tengah	4 Dokumen	200.000	4 Dokumen	200.000	4 Dokumen	500.000	4 Dokumen	600.000	4 Dokumen	700.000	Bidang Pembinaan SMK
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	Jumlah siswa SMK penerima BOS dan BOP	254.543 Siswa	680.229.600.000	267.430 Siswa	425.686.600.000	267.650 Siswa	452.300.000.000	267.900 Siswa	452.300.000.000	268.050 Siswa	452.300.000.000	Bidang Pembinaan SMK
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	Jumlah SMK Boarding yang dikelola	3 Unit	25.500.000.000	3 Unit	25.500.000.000	3 Unit	28.586.600.000	3 Unit	31.486.600.000	3 Unit	32.386.600.000	Bidang Pembinaan SMK
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	26.200.000.000	4 Dokumen	26.400.000.000	4 Dokumen	26.500.000.000	4 Dokumen	26.550.000.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan I
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	13.604.000.000	4 Dokumen	13.804.000.000	4 Dokumen	13.904.000.000	4 Dokumen	13.954.000.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan II

NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	14.114.000.000	4 Dokumen	14.314.000.000	4 Dokumen	14.414.000.000	4 Dokumen	14.464.000.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan III
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	10.637.000.000	4 Dokumen	10.837.000.000	4 Dokumen	10.937.000.000	4 Dokumen	10.987.000.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan IV
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	28.106.000.000	4 Dokumen	28.306.000.000	4 Dokumen	28.406.000.000	4 Dokumen	28.456.000.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan V
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	26.296.000.000	4 Dokumen	26.496.000.000	4 Dokumen	26.596.000.000	4 Dokumen	26.646.000.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan VI
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	19.901.000.000	4 Dokumen	20.101.000.000	4 Dokumen	20.201.000.000	4 Dokumen	20.251.000.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan VII
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	19.191.000.000	4 Dokumen	19.391.000.000	4 Dokumen	19.491.000.000	4 Dokumen	19.541.000.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan VIII
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	35.846.000.000	4 Dokumen	36.046.000.000	4 Dokumen	36.146.000.000	4 Dokumen	36.196.000.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan IX
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	21.283.000.000	4 Dokumen	21.483.000.000	4 Dokumen	21.583.000.000	4 Dokumen	21.633.000.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan X
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	10.278.000.000	4 Dokumen	10.478.000.000	4 Dokumen	10.578.000.000	4 Dokumen	10.628.000.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan XI
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	23.384.000.000	4 Dokumen	23.584.000.000	4 Dokumen	23.684.000.000	4 Dokumen	23.734.000.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan XII
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	15.649.000.000	4 Dokumen	15.849.000.000	4 Dokumen	15.949.000.000	4 Dokumen	15.999.000.000	Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan XIII
			Program Pendidikan Khusus												
			Kegiatan Pembiayaan Layanan	Jumlah siswa SLB penerima BOS dan BOP	15.649 Siswa	23.775.000.000	15.649 Siswa	16.198.554.000	15.649 Siswa	16.127.947.000	15.649 Siswa	16.102.947.000	15.649 Siswa	16.172.947.000	Bidang Pembinaan Diksus
			Kegiatan Pembiayaan Layanan	Jumlah dokumen manajemen BOS dan BOP SLB	1 Dokumen	200.947.000	1 Dokumen	254.393.000	1 Dokumen	325.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	380.000.000	Bidang Pembinaan Diksus
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	731.000.000	4 Dokumen	751.000.000	4 Dokumen	801.000.000	4 Dokumen	851.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan I
			Kegiatan Pembiayaan Layanan	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	354.000.000	4 Dokumen	374.000.000	4 Dokumen	424.000.000	4 Dokumen	474.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa

NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
			Pendidikan SLB												Dinas Pendidikan II
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	1.008.000.000	4 Dokumen	1.028.000.000	4 Dokumen	1.078.000.000	4 Dokumen	1.128.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan III
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	295.000.000	4 Dokumen	315.000.000	4 Dokumen	365.000.000	4 Dokumen	415.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan IV
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	286.000.000	4 Dokumen	306.000.000	4 Dokumen	356.000.000	4 Dokumen	406.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan V
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	808.000.000	4 Dokumen	828.000.000	4 Dokumen	878.000.000	4 Dokumen	928.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan VI
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	373.000.000	4 Dokumen	393.000.000	4 Dokumen	443.000.000	4 Dokumen	493.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan VII
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	732.000.000	4 Dokumen	752.000.000	4 Dokumen	802.000.000	4 Dokumen	852.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan VIII
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	950.000.000	4 Dokumen	970.000.000	4 Dokumen	1.020.000.000	4 Dokumen	1.070.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan IX
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	505.000.000	4 Dokumen	525.000.000	4 Dokumen	575.000.000	4 Dokumen	625.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan X
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	353.000.000	4 Dokumen	373.000.000	4 Dokumen	423.000.000	4 Dokumen	473.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan XI
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	1.122.000.000	4 Dokumen	1.142.000.000	4 Dokumen	1.192.000.000	4 Dokumen	1.242.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan XII
			Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB	Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP	-		4 Dokumen	493.000.000	4 Dokumen	513.000.000	4 Dokumen	563.000.000	4 Dokumen	613.000.000	Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan XIII

DIMENSI PENDIDIKAN

FOKUS LAINNYA PENDUKUNG DIMENSI PENDIDIKAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		
				VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
1	Pembinaan SMA/SMK/Dikusus	Kegiatan Bantuan Siswa Miskin (BSM)	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat BSM	10.000 siswa miskin	10.000.000	10.000 siswa miskin	10.000.000	10.000 siswa miskin	10.000.000	10.000 siswa miskin	10.000.000	10.000 siswa miskin	10.000.000	

Tabel 7.2
RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019 - 2023

DIMENSI KESEHATAN															
MASALAH UTAMA YANG AKAN DIATASI : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT															
NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022			2023	
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN		VOLUME	ANGGARAN
1	Akses Mutu Layanan Kesehatan Merata	Kabupaten Banyumas, Pemalang, Wonosobo, Brebes, Purbalingga, Batang, Cilacap, Pekalongan, Kebumen, Magelang, Kendal, dan Purworejo	Program Pelayanan Kesehatan	Standar isasi Yankes Dan Jamkes		249.888.528.000		250.273.832.000		250.710.000.000		251.275.000.000		250.850.000.000	Bidang Pelayanan Kesehatan
				Persentase Kab/Kota Dengan 100% Puskesmas Terakreditasi	80	335.000.000	100	336.000.000	100	404.000.000	100	425.000.000	100	450.000.000	Bidang Pelayanan Kesehatan
				Persentase Kab/Kota Yang 100% Labkesda Terakreditasi	31,42	330.000.000	45,71	368.000.000	62,85	402.000.000	80	425.000.000	100	450.000.000	Bidang Pelayanan Kesehatan
				Persentase Kab/Kota Yang 100% Rs Terakreditasi	77,1	335.000.000	100	366.000.000	100	404.000.000	100	425.000.000	100	450.000.000	Bidang Pelayanan Kesehatan
			Kegiatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan	Cakupan Masyarakat Miskin Non Kuota yang Mempunyai Jaminan Kesehatan	901.770 jiwa (maskin non kuota Prov. Jateng)	248.888.528.000	855.559 jiwa (maskin non kuota Prov. Jateng)	238.265.004.000	855.559 jiwa (maskin non kuota Prov. Jateng)	431.201.736.000	855.559 jiwa (maskin non kuota Prov. Jateng)	431.201.736.000	900.000 jiwa (maskin non kuota Prov. Jateng)	453.600.000.000	Dinas Kesehatan
			Pelayanan Kesehatan Rujukan		5.500.000.000		212.048.000.000		162.533.366.000		12.988.676.000		6.581.206.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	
			Proporsi Kab/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Unit-Unit Kritis Sesuai Ketentuan	22	900.000.000	43	990.000.000	63	1.189.000.000	83	1.197.900.000	100	1.250.000.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	
			Proporsi Kab/Kota Yang Memiliki Pelayanan Gawat Darurat Pra Rumah Sakit	32	100.000.000	45	110.000.000	55	121.000.000	70	133.100.000	84	146.410.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	
			Proporsi Rumah Sakit Dengan Sarana Prasarana Dan Alat (Spa) Penunjang Sesuai Kelas	22	90.000.000	36	99.000.000	66	108.900.000	75	119.790.000	82	131.769.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	
			Proporsi Rumah Sakit Khusus Milik Pemprov	55,55	4.410.000.000	55,55	210.600.000.000	55,55	160.604.466.000	55,55	11.317.866.000	55,55	4.823.027.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	
Proporsi Rs Provinsi Jawa Tengah Yang Melaksanakan Rs Tanpa Dinding	14		29	99.000.000.000	57	100.000.000.000	86	105.000.000.000	100	110.000.000.000	Bidang Pelayanan Kesehatan				

NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
			Program Sumber Daya Manusia Kesehatan												
				Proporsi Pelayanan Kesehatan Pada Tanggap Darurat Krisis Kesehatan	100		100	150.000.000.000	100	410.000.000.000	100	115.000.000.000	100	120.000.000.000	Bidang Pelayanan Kesehatan
2	Penurunan Angka Kematian, Kesakitan, dan kecacatan	Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Rembang, Purbalingga, Grobogan, Kebumen, Batang, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Wonosobo, Brebes, Kendal, Banyumas, Cilacap, Elora, dan Kota Tegal.	Program Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat)												
				Persentase Sdm Kesehatan Yang Dikembangkan Kompetensinya	50	1.200.000.000	60	5.500.000.000	60	5.451.346.000	75	5.151.546.000	75	4.917.994.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan
				Persentase Kabupaten/Kota dengan prevelensi gizi buruk kurang dari 0,05%	47.402 ibu hamil KEK	20.075.588.000	64.021 ibu hamil KEK	26.014.933.000	65.000 ibu hamil KEK	26.412.750.000	65.000 ibu hamil KEK	26.412.750.000	47.402 ibu hamil KEK	26.412.750.000	Bidang Kesehatan Masyarakat
					-	-	70.630 Balita Kurus	16.018.884.000	71.000 Balita Kurus	16.102.800.000	71.000 Balita Kurus	16.102.800.000	71.000 Balita Kurus	16.102.800.000	
				% Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk Kurang Dari 0,05%	48,57	500.000.000.000	51	600.000.000.000	51	600.000.000.000	54	600.000.000.000	54	600.000.000.000	Bidang Kesehatan Masyarakat
				% Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 %	97,14	500.000.000.000	97,14	500.000.000.000	97,14	500.000.000.000	97,14	500.000.000.000	100	500.000.000.000	Bidang Kesehatan Masyarakat
				% Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 %	25,71	500.000.000.000	28,57	500.000.000.000	28,57	500.000.000.000	28,57	500.000.000.000	31,42	500.000.000.000	Bidang Kesehatan Masyarakat
				% Lansia Dilayani Sesuai Standar Minimal 60%	34,28	500.000.000.000	37,1	350.000.000.000	37,1	350.000.000.000	42,8	350.000.000.000	42,8	350.000.000.000	Bidang Kesehatan Masyarakat
				% Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90%	48,5	500.000.000.000	51,4	700.000.000.000	51,4	700.000.000.000	57,1	700.000.000.000	57,1	700.000.000.000	Bidang Kesehatan Masyarakat
				% Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90%	77	500.000.000.000	80	500.000.000.000	80	500.000.000.000	82	500.000.000.000	82	500.000.000.000	Bidang Kesehatan Masyarakat
			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit												
				% Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60%	85,7	500.000.000.000	88,5	500.000.000.000	88,5	370.000.000.000	91,4	370.000.000.000	91,4	370.000.000.000	Bidang Kesehatan Masyarakat

NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
				% Bayi Baru Lahir Dengan Potensi Stunting	30	500.000.000.000	29	15.000.000.000.000	27	15.000.000.000.000	25	15.000.000.000.000	23	15.000.000.000.000	Bidang Kesehatan Masyarakat
				Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular		4.500.000.000.000		3.782.313.000.000		4.085.000.000.000		4.380.000.000.000		5.100.518.000.000	Bidang Pencegahan dan Penendalian penyakit
				% Kab/Kota Dengan Kasus Baru Kusta	71	400.000.000.000	71	300.000.000.000	74	325.000.000.000	74	350.000.000.000	77	400.000.000.000	Bidang Pencegahan dan Penendalian penyakit
				% Kab/Kota Dengan Angka Penemuan Kasus Diare Balita	20	300.000.000.000	23	150.000.000.000	23	150.000.000.000	26	175.000.000.000	26	200.000.000.000	Bidang Pencegahan dan Penendalian penyakit
				% Kab/Kota Dengan Cakupan Penemuan Kasus Pnemonia Balita	20	400.000.000.000	23	200.000.000.000	26	200.000.000.000	29	205.000.000.000	31	250.000.000.000	Bidang Pencegahan dan Penendalian penyakit
				% Kab/Kota Dengan Kasus Leptospirosis	80	400.000.000	80	200.000.000	83	225.000.000	83	250.000.000	83	300.000.000	Bidang Pencegahan dan Penendalian penyakit
				% Kab/Kota Endemis Filaria Yang Melaksanakan Pemberian Obat Pencegahan Massal (Popm) Filariasis	100	300.000	100	200.000	100	250.000	100	275.000	100	300.000	Bidang Pencegahan dan Penendalian penyakit
				% Kab/Kota Melaks Deteksi Dini Hepatitis B	28,5	400.000.000	31,4	200.000.000	34	225.000.000	37	250.000.000	40	300.000.000	Bidang Pencegahan dan Penendalian penyakit
				% Kab/Kota Mempertahankan Bebas Rabies Pada Manusia	100	400.000.000	100	200.000.000	100	225.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	Bidang Pencegahan dan Penendalian penyakit
				% Kab/Kota Yang Melaksanakan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan	27	300.000.000	31	200.000.000	35	210.000.000	39	225.000.000	43	300.000.000	Bidang Pencegahan dan Penendalian penyakit
				% Kasus Hiv/Aids Yg Diobati ARV	55	400.000.000	55	800.000.000	55	825.000.000	55	850.000.000	55	950.518.000	Bidang Pencegahan dan Penendalian penyakit
				Angka Kesakitan DBD	33	400.000.000	30	400.000.000	28	450.000.000	26	475.000.000	25	600.000.000	Bidang Pencegahan dan Penendalian

NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
															penyakit
				Cnr (Case Notification Rate) TB	177	400.000.000	201	532.313.000	210	550.000.000	225	575.000.000	240	650.000.000	Bidang Pencegahan dan Penendalian penyakit
				API (Annual Parasite Incidence)	0,06	400.000.000	0,06	400.000.000	0,05	450.000.000	0,05	500.000.000	0,05	550.000.000	Bidang Pencegahan dan Penendalian penyakit

Tabel 7.3
RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019 - 2023

DIMENSI KETENAGAKERJAAN															
MASALAH UTAMA YANG AKAN DIATASI : TINGGINYA JUMLAH PENGANGGURAN															
NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
1	Bertambahnya kesempatan kerja baru pada sektor formal	Kabupaten Tegal, Cilacap, Demak, Brebes, Pemalang, Purbalingga, dan Kebumen	Program Peningkatan Kesempatan Kerja												
			Pembinaan masyarakat penganggur dan perluasan kesempatan kerja	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya	40 org	302.000.000	40 org	281.021.000	80 org	632.972.000	80 org	633.306.000	80 org	664.971.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi
				Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan/ pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan	540 org	1.445.293.000	620 org	1.580.272.000	800 org	2.252.250.000	800 org	2.264.863.000	800 org	2.383.106.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi
				Jumlah TKI Purna dan tenaga kerja khusus (disabilitas, lansia, kel rentan) mengikuti kgt pengembangan sektor informal	140 org	385.000.000	140 org	371.000.000	160 org	404.000.000	160 org	424.000.000	160 org	445.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi
			Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Online dan Job Fair	800 org	530.639.000	800 org	565.529.000	800 org	622.081.000	800 org	728.000.000	800 org	758.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda												
			Pengembangan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan PKKP	200 org	5.350.000.000	200 org	6.548.000.000	200 org	7.250.000.000	200 org	7.592.000.000	200 org	7.793.000.000	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
				Jumlah pemuda yang mengikuti kewirausahaan	400 org	1.250.000.000	1.000 org	3.900.000.000	1.000 org	4.200.000.000	1.000 org	4.500.000.000	1.000 org	4.725.000.000	
			Program Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki											Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Peningkatan SDM industri produk tekstil dan alas kaki	Pelatihan sdm operator industri alas kaki/ garmen	750 orang	2.813.500.000	500 orang	1.350.000.000	560 orang	1.605.000.000	627 orang	2.164.000.000	750 orang		2.700.000.000
			Pembinaan Lingkungan sosial melalui penyediaan sarana prasarana kelembagaan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di wilayah IHT	Pelatihan keterampilan sdm industri produk tekstil	1000 orang	2.250.000.000	1100 orang	2.220.000.000	1200 orang	2.000.000.000	1200 orang	2.000.000.000	1200 orang		2.000.000.000

NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
		Kabupaten Kendal, Kebumen, Kota Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Magelang.	Program Pendidikan Perkoperasian UMKM												
			Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau.	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	30 Angkatan/750 orang	1.500.000.000	30 Angkatan/750 orang	1.500.000.000	30 Angkatan/750 orang	1.500.000.000	30 Angkatan/750 orang	1.500.000.000	30 Angkatan/750 orang	1.500.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
			Program Penguatan dan Pengembangan Industri Agro												Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri agro di wilayah IHT	Pelatihan komoditas agro di wilayah perbatasan	90 orang	210.000.000	90 orang	184.010.000	90 orang	220.000.000	90 orang	220.000.000	90 orang	220.000.000	
				Pengembangan produksi industri olahan pangan komoditas agro di 3 kab/kota	120 orang	350.000.000	240 orang	492.750.000	120 orang	360.000.000	120 orang	360.000.000	120 orang	360.000.000	
			Penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri agro mendukung program pembangunan kewilayahan	Bintek standard mutu bagi wirausaha baru industri pangan (olahan gula kelapa di Brebes; olahan singkong di Banyumas, olahan nanas di Pemalang; olahan ikan di Kab. Tegal;	120 orang	280.000.000	150 orang	350.000.000	120 orang	290.000.000	120 orang	290.000.000	120 orang	290.000.000	
			Program Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro												
			Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri non agro di wilayah IHT	Penumbuhan WUB Bagi Industri Aneka Berbasis Potensi Lokal Daerah	250 orang	825.320.000	250 orang	868.555.000	250 orang	870.000.000	250 orang	870.000.000	250 orang	870.000.000	
				Penumbuhan Wirausaha Baru bagi Perempuan Pelaku Usaha Bidang Industri	40 orang	112.935.000	60 orang	180.000.000							
2	Mengurangi resiko kehilangan pekerjaan bagi kelompok rentan	Kabupaten Tegal, Cilacap, Brebes, Demak, Pemalang, Purbalingga, dan Kebumen.	Program Peingkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja												
			Pemagangan Dalam dan Luar Negeri serta Pembinaan SDM Pelatihan	Jumlah Peserta Magang Luar Negeri	1600 org	277.340.000	2600 org	761.120.000	2600 org	682.340.000	2600 org	682.340.000	2600 org	682.340.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transnigrasi
			Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja di Bidang Industri	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kerja	240 org	643.780.000	380 org	1.103.780.000	800 org	1.443.780.000	800 org	1.443.780.000	800 org	1.443.780.000	

NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
			Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja di Bidang Industri - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kerja (DBHCHT)	300 org	1.523.000.000	420 org	1.537.250.000	320 org	1.537.250.000	320 org	1.537.250.000	320 org	1.537.250.000	
			Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Bidang Jasa, Pra Magang dan Pekerja Migran	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Bidang Jasa	40 org	228.220.000	40 org	189.565.000	80 org	428.220.000	100 org	430.000.000	100 org	430.000.000	
				Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Bidang Migran Indonesia	16 org	161.370.000	16 org	199.129.000	40 org	432.000.000	40 org	432.000.000	40 org	435.000.000	
				Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Bidang Pra Magang	130 org	752.810.000	130 org	153.706.000	200 org	1.139.780.000	200 org	1.140.000.000	200 org	1.175.000.000	
			Pelatihan Kerja bagi Pencari Kerja di Bidang Pertanian Mendukung Mekanisme Penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN.	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Bidang Pertanian Mendukung Mekanisme Penempatan AKL, AKAD, dan AKAN.	96 org	253.890.000	96 org	253.890.000	96 org	255.890.000	96 org	260.890.000	96 org	270.000.000	
			Pelatihan Kerja bagi Pencari Kerja di Bidang Pertanian Mendukung Mekanisme Penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN (DBHCHT)	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Bidang Pertanian Mendukung Mekanisme Penempatan AKL, AKAD, dan AKAN (DBHCHT).	480 org	1.531.369.000	480 org	1.531.369.000	480 org	1.531.369.000	500 org	1.531.369.000	520 org	1.605.203.000	
			Pelatihan peningkatan produktivitas melalui DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas	625 org	1.123.175.000	465 org	1.123.175.000	676 org	1.123.175.000	700 org	1.123.175.000	725 org	1.123.175.000	

DIMENSI KETENAGAKERJAAN

FOKUS LAINNYA PENDUKUNG DIMENSI KETENAGAKERJAAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		
				VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
1	Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja	Jumlah pekerja anak yg dikembalikan ke dunia pendidikan	60	475.000.000	180	1.233.979.000	60	574.750.000	60	632.225.000	60	695.447.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transnigrasi
2	Program Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Kegiatan Pemberdayaan Usaha dan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Kerjasama Kemitraan PMA/PMDN dengan UKM	10 dokumen	475.100.000	12 dokumen	510.000.000	14 dokumen	619.035.000	17 dokumen	890.000.000	20 dokumen	1.288.000.000	DPMPSTP

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB		
				2019		2020		2021		2022			2023	
				VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN		VOLUME	ANGGARAN
3	Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Diberdayakan di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I (Pemberdayaan masyarakat miskin)	88	541.634.000	88	300.000.000	88	345.000.000	88	396.750.000	88	456.263.000	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I
			Jumlah Unit Usaha Masyarakat Sekitar Hutan yang dikembangkan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I (Pemberdayaan masyarakat miskin)	5		5		5		5		5		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Diberdayakan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II (Pemberdayaan masyarakat miskin)	87	498.434.000	87	286.598.000	87	329.588.000	87	379.028.000	87	435.881.000	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II
			Jumlah Unit Usaha Sekitar Hutan yang Dikembangkan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II (Pemberdayaan masyarakat miskin)	5		5		5		5		5		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Diberdayakan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (Pemberdayaan masyarakat miskin)	45	418.754.000	45	330.000.000	45	379.500.000	45	436.425.000	90	501.889.000	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III
			Jumlah Unit Usaha Sekitar Hutan yang Dikembangkan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (Pemberdayaan masyarakat miskin)	5		5		5		5		5		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Diberdayakan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV (Pemberdayaan masyarakat miskin)	90	478.934.000	90	330.000.000	90	379.500.000	90	436.425.000	90	501.889.000	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV
			Jumlah Unit Usaha Sekitar Hutan yang Dikembangkan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV (Pemberdayaan masyarakat miskin)	5		5		5		5		5		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		
				VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Diberdayakan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (Pemberdayaan masyarakat miskin)	85	517.634.000	85	280.395.000	85	322.448.000	85	370.815.000	85	426.435.000	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V
			Jumlah Unit Usaha Sekitar Hutan yang Dikembangkan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (Pemberdayaan masyarakat miskin)	5		5		5		5		5		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Diberdayakan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI (Pemberdayaan masyarakat miskin)	85	448.754.000	85	300.000.000	85	345.000.000	85	396.750.000	85	456.263.000	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI
			Jumlah Unit Usaha Sekitar Hutan yang Dikembangkan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI (Pemberdayaan masyarakat miskin)	5		5		5		5		5		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Diberdayakan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII (Pemberdayaan masyarakat miskin)	150	532.313.000	150	330.000.000	150	379.500.000	150	436.425.000	150	501.889.000	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII
			Jumlah Unit Usaha Sekitar Hutan yang Dikembangkan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII (Pemberdayaan masyarakat miskin)	5		5		5		5		5		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Diberdayakan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (Pemberdayaan masyarakat miskin)	110	433.754.000	110	330.000.000	110	379.500.000	110	436.425.000	110	501.889.000	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII
			Jumlah Unit Usaha Sekitar Hutan yang Dikembangkan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (Pemberdayaan masyarakat miskin)	5		5		5		5		5		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Diberdayakan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (Pemberdayaan masyarakat miskin)	80	363.554.000	80	330.000.000	80	379.500.000	80	436.425.000	80	501.889.000	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB		
				2019		2020		2021		2022			2023	
				VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN		VOLUME	ANGGARAN
			masyarakat miskin)											
			Jumlah Unit Usaha Sekitar Hutan yang Dikembangkan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (Pemberdayaan masyarakat miskin)	5		5		5		5		5		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Diberdayakan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X (Pemberdayaan masyarakat miskin)	80	493.934.000	80	330.000.000	80	379.500.000	80	436.425.000	80	501.889.000	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X
			Jumlah Unit Usaha Sekitar Hutan yang Dikembangkan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X (Pemberdayaan masyarakat miskin)	5		5		5		5		5		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Diberdayakan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah XI (Pemberdayaan masyarakat miskin)	100	393.554.000	100	330.000.000	100	379.500.000	100	436.425.000	100	501.889.000	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X
			Jumlah Unit Usaha Sekitar Hutan yang Dikembangkan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah XI (Pemberdayaan masyarakat miskin)	5		5		5		5		5		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X
4	Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	5%		5%		5%		5%		5%		
		Pengendalian Penanganan DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (Ha) (Bantuan bibit untuk masyarakat miskin)	1.428	303.000	2.856	448.800	4.284	493.680	5.712	543.048	7.140	597.353	CDK Wilayah I
			Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah II (Ha) (Bantuan bibit untuk masyarakat miskin)	1.428	462.000	2.856	491.700	4.284	540.870	5.712	594.957	7.140	654.453	CDK Wilayah II
			Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah III (Ha) (Bantuan bibit untuk masyarakat miskin)	1.483	529.500	2.966	433.950	4.449	477.345	5.932	525.080	7.415	577.587	CDK Wilayah III

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		
				VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
			Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah IV (Ha) (Bantuan bibit untuk masyarakat miskin)	1.593	454.500	3.186	483.450	4.778	531.795	6.371	584.975	7.964	643.472	CDK Wilayah IV
			Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah V (Ha)(Bantuan bibit untuk masyarakat miskin)	1.758	507.000	3.515	541.200	5.273	595.320	7.030	654.852	8.788	720.337	CDK Wilayah V
			Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah VI (Ha) (Bantuan bibit untuk masyarakat miskin)	2.856	465.000	5.712	561.000	8.568	617.100	11.424	678.810	14.280	746.691	CDK Wilayah VI
			Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah VII (Ha) (Bantuan bibit untuk masyarakat miskin)	2.746	492.000	5.490	524.700	8.238	577.170	10.985	634.887	13.731	698.376	CDK Wilayah VII
			Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah VIII (Ha) (Bantuan bibit untuk masyarakat miskin)	1.812	502.500	3.625	470.250	5.437	517.275	7.250	569.003	9.062	625.903	CDK Wilayah VIII
			Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah IX (Ha) (Bantuan bibit untuk masyarakat miskin)	2.307	492.000	4.613	458.700	6.920	504.570	9.227	555.027	11.534	610.530	CDK Wilayah IX
			Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah X (Ha) (Bantuan bibit untuk masyarakat miskin)	1.812	502.500	3.625	437.250	5.437	480.975	7.250	529.073	9.062	581.980	CDK Wilayah X
			Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah XI (Ha) (Bantuan bibit untuk masyarakat miskin)	2.746	567.000	5.492	508.200	8.238	559.020	10.985	614.922	13.731	676.414	CDK Wilayah XI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		
				VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen	Pembinaan Industri melalui Fasilitasi Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Industri Kecil Menengah di Wilayah IHT	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi Registrasi HKI	60 pelaku usaha	60.000.000	60 pelaku usaha	60.000.000	70 pelaku usaha	70.000.000	70 pelaku usaha	70.000.000	70 pelaku usaha	70.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Program Peningkatan Agribisnis	Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan	Starup Kewirausahaan	-	-	6 Unit	687.000.000	18 Unit	1.000.000.000	35 Unit	1.000.000.000	35 Unit	1.000.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan	Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura	-	-	4 Unit	350.000.000	5 Unit	350.000.000	6 Unit	350.000.000	7 Unit	350.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan	Fasilitasi pasca panen dan pengolahan tanaman perkebunan	-	-	200 Unit	1.500.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan						
7	Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUMKM	Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah KUMKM yang dikuatkan usahanya	400 orang	1.025.000.000	400 orang	1.025.000.000	400 orang	1.025.000.000	400 orang	1.025.000.000	400 orang	1.025.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
8	Pengembangan Akses Pembiayaan bagi KUMKM	Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUMKM	Jumlah KUMKM yang Dibina Kapasitasnya dalam Akses Pembiayaan	150 orang	240.000.000	150 orang	240.000.000	150 orang	240.000.000	150 orang	240.000.000	150 orang	240.000.000	

Tabel 7.4
RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019 - 2023

DIMENSI INFRASTRUKTUR DASAR															
MASALAH UTAMA YANG AKAN DIATASI : RENDAHNYA AKSES AIR MINUM DAN SANITASI LAYAK															
NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
1	Meningkatnya Layanan Air Minum	Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Boyolali, Grobogan, Blora, Jepara, Temanggung, dan Pekalongan	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi												DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROV. JATENG
			Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMMAS	Jumlah kabupaten/ kota terfasilitasi Pendampingan Pelaksanaan Program Pusat Pamsimas III	29 Kabupaten/ Kota	510.000.000	29 Kabupaten/ Kota	700.000.000	29 Kabupaten/ Kota	700.000.000	29 Kabupaten/ Kota	700.000.000	29 Kabupaten/ Kota	700.000.000	
2	Mengembangkan Sumber-Sumber Air Minum	Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Magelang, Grobogan, Jepara, Pemalang, Tegal, dan Brebes	Program Pengembangan Kegeologian												
			Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Solo	Pembangunan sumur bor	3	618.000.000	1	250.000.000	5	1.750.000.000	4	1.400.000.000	4	1.400.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
			Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Muria	Pembangunan sumur bor	1	350.000.000	1	250.000.000	4	1.400.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
			Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Utara	Pembangunan sumur bor	1	340.000.000	1	240.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
			Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Selatan	Pembangunan sumur bor	2	589.000.000	1	245.000.000	4	1.400.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan

NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022			2023	
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN		VOLUME	ANGGARAN
			Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Utara	Pembangunan sumur bor	1	315.000.000	1	250.000.000	4	1.400.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
			Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Selatan	Pembangunan sumur bor	4	1.140.955.000	1	172.600.000	6	2.100.000.000	6	2.100.000.000	6	2.100.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
			Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Ungaran Telomoyo	Pembangunan sumur bor	0	0	1	250.000.000	1	350.000.000	2	700.000.000	1	350.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran Telomoyo
			Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Sewu Lawu	Pembangunan sumur bor	2	514.000.000	1	250.000.000	4	1.400.000.000	4	1.400.000.000	4	1.400.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
			Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Selatan	Pembangunan sumur bor	2	600.000.000	2	500.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
			Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Semarang-Demak	Pembangunan sumur bor	2	650.000.000	1	250.000.000	2	700.000.000	3	1.050.000.000	2	700.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak
			Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Merapi	Pembangunan sumur bor	1	240.000.000	1	230.000.000	2	700.000.000	3	1.050.000.000	2	700.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
			Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Tengah	Pembangunan sumur bor	1	298.000.000	1	250.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
3	Meningkatnya Kepemilikan Jamban	Kabupaten Brebes, Cilacap, Banyumas, Pemalang, Tegal, Magelang, Purbalingga, dan Jepara	Program Kesehatan Masyarakat Kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	5.000 paket	5.000.000.000	10.000 paket	10.000.000.000	Dinas Kesehatan						

DIMENSI INFRASTRUKTUR DASAR

FOKUS LAINNYA PENDUKUNG DIMENSI INFRASTRUKTUR DASAR

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		
				VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
1	Pengembangan Ketenagalistrikan	Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Solo	Pembangunan sumur bor	3	618.000.000	1	250.000.000	5	1.750.000.000	4	1.400.000.000	4	1.400.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Muria	Pembangunan sumur bor	1	350.000.000	1	250.000.000	4	1.400.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
		Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Utara	Pembangunan sumur bor	1	340.000.000	1	240.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Selatan	Pembangunan sumur bor	2	589.000.000	1	245.000.000	4	1.400.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Utara	Pembangunan sumur bor	1	315.000.000	1	250.000.000	4	1.400.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB		
				2019		2020		2021		2022			2023	
				VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN		VOLUME	ANGGARAN
		Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Selatan	Pembangunan sumur bor	4	1.140.955.000	1	172.600.000	6	2.100.000.000	6	2.100.000.000	6	2.100.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
		Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Ungaran Telomoyo	Pembangunan sumur bor	0	0	1	250.000.000	1	350.000.000	2	700.000.000	1	350.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran Telomoyo
		Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Sewu Lawu	Pembangunan sumur bor	2	514.000.000	1	250.000.000	4	1.400.000.000	4	1.400.000.000	4	1.400.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
		Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Selatan	Pembangunan sumur bor	2	600.000.000	2	500.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Semarang-Demak	Pembangunan sumur bor	2	650.000.000	1	250.000.000	2	700.000.000	3	1.050.000.000	2	700.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak
		Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Merapi	Pembangunan sumur bor	1	240.000.000	1	230.000.000	2	700.000.000	3	1.050.000.000	2	700.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Tengah	Pembangunan sumur bor	1	298.000.000	1	250.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB		
				2019		2020		2021		2022			2023	
				VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN		VOLUME	ANGGARAN
2	Pembangunan Perumahan	Perencanaan teknis dan pembiayaan perumahan	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan	0	6.510.000.000	4,57	15.750.000.000	7,7	33.750.000.000	10,39	43.000.000.000	12,5	43.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				0 PB		500 PB @ Rp 35.000.000		750 PB @ Rp 35.000.000		1.000 PB @ Rp 35.000.000		1.250 PB @ Rp 35.000.000		
		Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya	Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	4,94	2.810.000.000	10,35	5.000.000.000	19,31	5.250.000.000	28,28	5.500.000.000	37,24	5.750.000.000	
				25,677 PK		25,677 PK		25,677 PK		25,677 PK		25,677 PK		
		Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya	Jumlah rumah yang terkena dampak bencana dan relokasi yang ditangani	0	-	52 (Pembangunan Baru) @ Rp 50.000.000	3.850.000.000	25 (Pembangunan Baru) @ Rp 50.000.000	1.250.000.000	25 (Pembangunan Baru) @ Rp 50.000.000	1.250.000.000	25 (Pembangunan Baru) @ Rp 50.000.000	1.250.000.000	
				150 (Peningkatan kualitas) @ Rp 12.000.000	1.800.000.000	165 (Peningkatan kualitas) @ Rp 20.000.000	3.300.000.000	150 (Peningkatan kualitas) @ Rp 20.000.000	3.000.000.000	150 (Peningkatan kualitas) @ Rp 20.000.000	3.000.000.000	150 (Peningkatan kualitas) @ Rp 20.000.000	3.000.000.000	
				-	-	0	2.350.000.000	1 TB (Tower Block)	19.500.000.000	2 TB (Tower Block)	26.750.000.000	1 TB (Tower Block)	27.250.000.000	

Tabel 7.5
RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019 - 2023

DIMENSI KETAHANAN PANGAN															
MASALAH UTAMA YANG AKAN DIATASI : RENDAHNYA RATA-RATA KONSUMSI KALORI (kcal) PER KAPITA															
NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
1	Peningkatan Produksi Padi	Kabupaten Boyolali, Purworejo, Purbalingga, Jepara, Kendal, Temanggung, Semarang, Kudus, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Surakarta dan Kota Magelang	Program Peningkatan Agribisnis												Dinas Pertanian dan Pekebunan
			Kegiatan Peningkatan Produksi Padi	Pengembangan produksi padi	-		1.000 Ha	3.500.000.000	1.200 Ha	3.500.000.000	1.250 Ha	3.500.000.000	1.300 Ha	3.500.000.000	Dinas Pertanian dan Pekebunan
			Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Rehab jaringan irigasi tersier	-		17 Unit	3.200.000.000	20 Unit	3.200.000.000	22 Unit	3.700.000.000	25 Unit	3.700.000.000	Dinas Pertanian dan Pekebunan
			Kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk, dan Pestisida	Asuransi petani	-		35.000 Ha	10.000.000.000	32.500 Ha	10.000.000.000	32.500 Ha	10.000.000.000	32.500 Ha	10.000.000.000	Dinas Pertanian dan Pekebunan
2	Menjaga Stabilitas Harga Beras	Kabupaten Kebumen, Boyolali, Sukoharjo, Cilacap, Purbalingga dan Kudus	Program Peningkatan Ketahanan Pangan												Dinas Ketahanan Pangan
				CV Harga Pangan Strategis Beras	5%		5%		5%		5%		5%		Dinas Ketahanan Pangan
			Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan	Fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI) Center	1 Unit	21.475.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
				Jumlah intervensi harga pangan strategis (Beras, Cabe, Bawang Merah)	5 Kali	872.025.000	5 Kali	950.000.000	5 Kali	1.000.000.000	5 Kali	1.000.000.000	5 Kali	1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan, Jaringan Distribusi, Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA)	Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta sistem logistik daerah	-	-	1 Laporan	5.000.000.000	1 Laporan	5.000.000.000	1 Laporan	5.000.000.000	1 Laporan	5.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
				Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan Gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (gapoktan)	-	-	70 Kelompok	900.000.000	105 Kelompok	900.000.000	105 Kelompok	900.000.000	105 Kelompok	900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri												
Pemantauan distribusi dan logistik kepokmas	Jumlah distributor kepokmas yang dipantau	100 Unit	925.000.000	100 Unit	925.000.000	100 Unit	925.000.000	100 Unit	925.000.000	100 Unit	925.000.000	100 Unit	925.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

NO	PRIORITAS INTERVENSI	PRIORITAS WILAYAH	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
			& komoditi strategis lainnya	Jumlah barang penting yang diawasi	0 Unit		0 Unit		7 Unit	200.000.000	7 Unit	200.000.000	7 Unit	200.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Promosi dan informasi pasar produk dalam negeri	Jumlah informasi harga kepokmas	25 Komoditi	716.300.000	25 Komoditi	1.500.000.000	25 Komoditi	1.300.000.000	25 Komoditi	1.600.000.000	25 Komoditi	1.665.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Jumlah paket sembako yang diserahkan masyarakat miskin	7.500 paket	523.600.000	9.000 paket	550.000.000	10.000 paket	620.000.000	11.000 paket	680.000.000	12.000 paket	750.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

DIMENSI KETAHANAN PANGAN

FOKUS LAINNYA PENDUKUNG DIMENSI KETAHANAN PANGAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		
				VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
1	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	Jumlah Desa yang Diberdayakan sebagai Upaya Penanganan Kerawanan Pangan	34 Desa	3.750.000.000	34 Desa	3.900.000.000	34 Desa	4.000.000.000	34 Desa	4.150.000.000	34 Desa	4.250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Konsumsi Pangan B2SA	Jumlah kelompok penerima stimulan benih/bibit tanaman, ikan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan	125 kelompok	1.339.214.000	130 kelompok	1.735.000.000	135 kelompok	1.800.000.000	140 kelompok	1.950.000.000	145 kelompok	2.000.000.000	

Tabel 7.6
RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019 - 2023

DIMENSI LAINNYA														
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		
				VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	
1	Penataan Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk terfasilitasi pengurusan dokumen KTP el	100%	1.675.000.000	100%	408.898.000	100%	2.026.750.000	100%	2.229.425.000	100%	2.452.367.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
		Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk terfasilitasi pengurusan dokumen pencatatan sipil	90%	1.400.000.000	92%	330.000.000	95%	1.694.000.000	97%	1.863.400.000	100%	2.049.740.000	
2	Penanganan Fakir Miskin	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan	Jumlah keluarga fakir miskin perkotaan dan daerah rentan mendapatkan penanganan	1.000 org	700.000.000	2.000 org	900.000.000	3.000 org	1.000.000.000	4.000 org	1.200.000.000	5.000 org	1.200.000.000	Dinas Sosial
		Penanganan Fakir Miskin Perdesaan	Jumlah keluarga fakir miskin perdesaan dan daerah rentan mendapatkan penanganan	1.000 org	700.000.000	2.000 org	875.000.000	3.000 org	1.000.000.000	4.000 org	1.000.000.000	5.000 org	875.000.000	
		Pengolahan Data Kemiskinan dan PMKS lainnya	Dokumen data kemiskinan dan PMKS tervalidasi	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	5.875.000.000	1 dokumen	5.300.000.000	1 dokumen	4.900.000.000	1 dokumen	4.425.000.000	
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan Jaminan Sosial Perorangan dan Keluarga	Porsentase PMKS Non Produktif yang ditangani	12.764 org	1.000.000.000	12.764 org	1.150.000.000	12.764 org	1.200.000.000	12.764 org	1.350.000.000	12.764 org	1.500.000.000	
4	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	Porsentase PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Panti	2.100 org	3.200.000.000	4.200 org	4.200.000.000	6.300 org	4.200.000.000	8.400 org	4.200.000.000	10.600 org	4.200.000.000	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Porsentase PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Panti	2.100 org	3.100.000.000	4.200 org	4.200.000.000	6.300 org	4.200.000.000	8.400 org	4.200.000.000	10.600 org	4.200.000.000	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila	Porsentase PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Panti	250 org	725.000.000	500 org	1.243.040.000	750 org	1.229.775.000	1.000 org	1.230.000.000	1.250 org	1.200.000.000	
		Kegiatan Penyantunan PMKS	Porsentase PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Panti	4.602 org		9.204 org		13.806 org		18.408 org		23.010 org		
5	Program Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau pulau Kecil	Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang diberdayakan (orang)	250 orang	300.000.000	275 orang	200.000.000	300 orang	200.000.000	325 orang	200.000.000	350 orang	200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Program Usaha dan Pengembangan Komoditas	Kegiatan Pengembangan Logistik, Bina Mutudan Diversifikasi Produk	Jumlah SDM pengolah perikanan yang terbina (orang)	250 orang	600.000.000	300 orang	1.400.000.000	350 orang	1.650.000.000	400 orang	2.100.000.000	450 orang	2.550.000.000	
7	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kepelabuhan dan Kenelayanan	Jumlah nelayan yang terlindungi	10.000 orang	1.750.000.000	10.000 orang	2.500.000.000	10.000 orang	2.750.000.000	10.000 orang	3.000.000.000	10.000 orang	3.250.000.000	
8	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Pengembangan Inovasi Dan Infrastruktur (Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Peternakan)	Meningkatnya kemampuan dan Pendapatan KK Miskin melalui Usaha ternak ayam kampung unggul	65 lokasi (6.500 KK Miskin); Ayam 12 ekor/KK; Pakan 15 Kg/KK; Kandang 1 Unit/KK; Mesin Tetas 1 Unit/Lokasi	6.252.185.000	6 lokasi (480 KK Miskin); Ayam 12 ekor/KK; Pakan 40 Kg/KK; Kandang 1 Unit/KK; Mesin Tetas 4 Unit/Lokasi	2.351.000.000	6 lokasi (480 KK Miskin); Ayam 12 ekor/KK; Pakan 40 Kg/KK; Kandang 1 Unit/KK; Mesin Tetas 4 Unit/Lokasi	2.400.000.000	6 lokasi (480 KK Miskin); Ayam 12 ekor/KK; Pakan 40 Kg/KK; Kandang 1 Unit/KK; Mesin Tetas 4 Unit/Lokasi	2.450.000.000	6 lokasi (480 KK Miskin); Ayam 12 ekor/KK; Pakan 40 Kg/KK; Kandang 1 Unit/KK; Mesin Tetas 4 Unit/Lokasi	2.500.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Meningkatnya kemampuan dan Pendapatan KK Miskin melalui	5 Lokasi/Kelompok	232.000.000	5 Lokasi/Kelompok	245.000.000	5 Lokasi/Kelompok	250.000.000	5 Lokasi/Kelompok	255.000.000	5 Lokasi/Kelompok	260.000.000	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB		
				2019		2020		2021		2022			2023	
				VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN		VOLUME	ANGGARAN
			Usaha ternak kambing	LMDH (20 KK/ Lokasi); 20 Ekor Kambing Betina, 3 Ekor Kambing Jantan;		LMDH (20 KK/ Lokasi); 20 Ekor Kambing Betina, 3 Ekor Kambing Jantan;		LMDH (20 KK/ Lokasi); 20 Ekor Kambing Betina, 3 Ekor Kambing Jantan;		LMDH (20 KK/ Lokasi); 20 Ekor Kambing Betina, 3 Ekor Kambing Jantan;		LMDH (20 KK/ Lokasi); 20 Ekor Kambing Betina, 3 Ekor Kambing Jantan;		
9	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perempuan yang Telah Mendapatkan Pendampingan Menjadi Pelaku Usaha Ekonomi	30 orang	1.103.091.000	30 orang	1.213.400.000	30 orang	1.334.740.000	30 orang	1.468.214.000	30 orang	1.615.036.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
10	Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana	Peningkatan Kesertaan KB MKJP	Jumlah Peserta KB MKJP	39.900 orang (400 MOP; 1700 MOW; 5900 IUD; 31900 IMPLAN; 8000 KIE untuk Kader)	2.395.000.000	39.900 orang (400 MOP; 1.700 MOW; 5.900 IUD; 31.900 IMPLAN; 8.000 KIE untuk Kader)	2.395.000.000	39.900 orang (400 MOP; 1700 MOW; 5900 IUD; 31900 IMPLAN; 8000 KIE untuk Kader)	3.990.000.000	39.900 orang (400 MOP; 1700 MOW; 5900 IUD; 31900 IMPLAN; 8000 KIE untuk Kader)	3.990.000.000	39.900 orang (400 MOP; 1700 MOW; 5900 IUD; 31900 IMPLAN; 8000 KIE untuk Kader)	3.990.000.000	Pengendalian Penduduk dan KB

BAB VIII

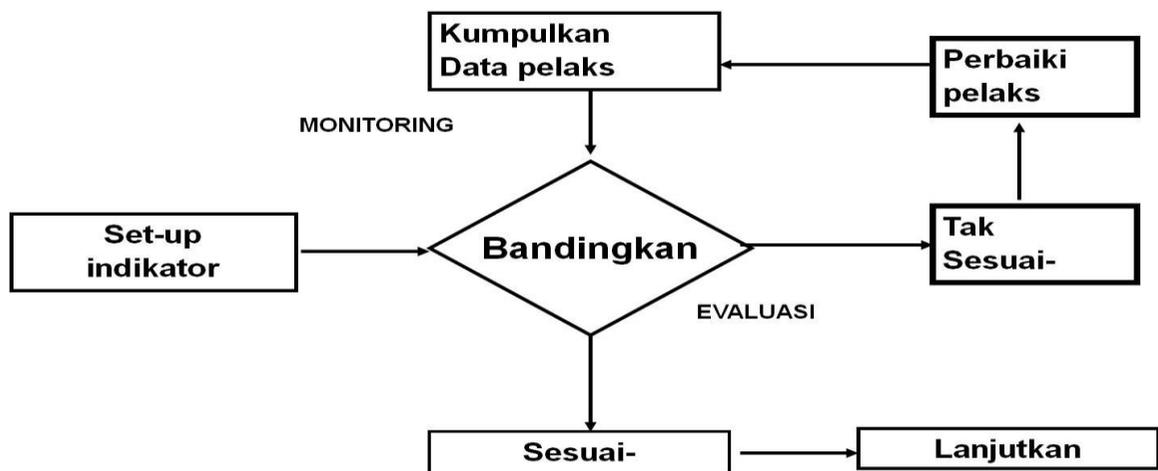
MONITORING DAN EVALUASI

Proses monitoring dan evaluasi merupakan satu tahapan terakhir dalam sebuah manajemen pembangunan setelah perencanaan, penganggaran, dan implementasi. Urgensi proses monitoring dan evaluasi adalah untuk menjamin bahwa apa yang telah direncanakan kemudian dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

Monitoring merupakan aktivitas internal kegiatan yang dirancang untuk mengidentifikasi *feedback* konstan pada setiap progres dari kegiatan tersebut, termasuk masalah-masalah yang dihadapi dan efisiensi dari implementasi kegiatan tersebut. Monitoring juga merupakan proses berkelanjutan dalam mengumpulkan informasi-informasi mengenai apa yang telah direncanakan dalam sebyg kegiatan, termasuk di dalamnya adalah asumsi-asumsi atau faktor-faktor eksternal dan efek samping dari terlaksananya kegiatan tersebut. Monitoring lebih dimaksudkan untuk menilai apakah sumber kegiatan (input) akan dilaksanakan dan digunakan dalam menghasilkan output yang dituju. Monitoring dilakukan untuk lebih melihat dan mencari informasi pelaksanaan di level program dan/atau kegiatan.

Evaluasi merupakan proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan. Evaluasi pada dasarnya akan bermanfaat dalam merancang program/kegiatan yang lebih baik di masa depan. Evaluasi juga bermanfaat untuk mampu mengidentifikasi dampak dari sebuah program/kegiatan, sehingga dampak negatifnya dapat direduksi bahkan dihilangkan. Evaluasi dilaksanakan lebih untuk menilai pencapaian program dan kebijakan atau sasaran pembangunan, dan bukan pada kegiatan.

Monitoring dan evaluasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan meliputi pengumpulan data, proses dan pemilihan informasi mengenai implementasi kegiatan, progres yang akan dicapai sampai kepada dampak dan efek dari adanya program/kegiatan tersebut. Prinsip dalam proses monitoring dan evaluasi adalah dengan membandingkan dari apa yang sudah direncanakan dengan yang dilaksanakan dan dihasilkan. Substansi yang dibandingkan adalah indikator. Maka menjadi penting dalam proses monev ini adalah bagaimana men *set-up* indikator pada saat proses perencanaan, agar dapat dilakukan monev dengan baik dalam rangka mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam satu manajemen pembangunan.



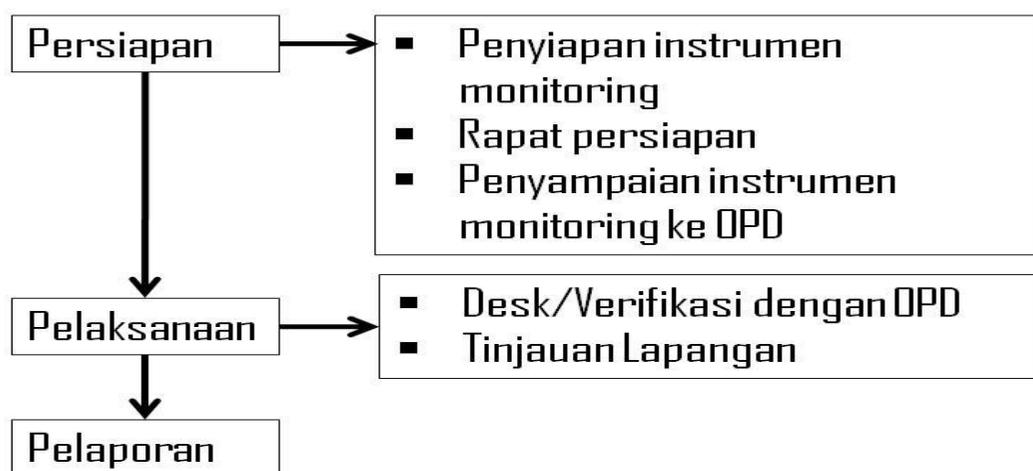
Gambar 8.1.
Prinsip Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

A. Tujuan

Monitoring dan evaluasi pada program penanggulangan kemiskinan diperlukan untuk mengetahui informasi kemajuan dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaannya, memberikan penilaian keberhasilan dari sisi keluaran, kegunaan, dan dampaknya, serta mengukur capaian kinerja penanggulangan kemiskinan.

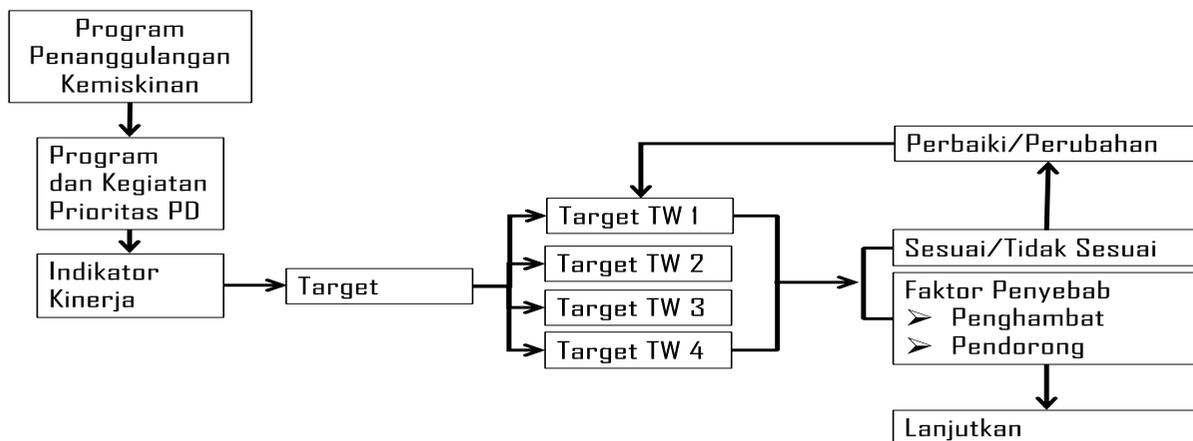
B. Alur Proses Monitoring dan Evaluasi

Alur proses monitoring dan evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.



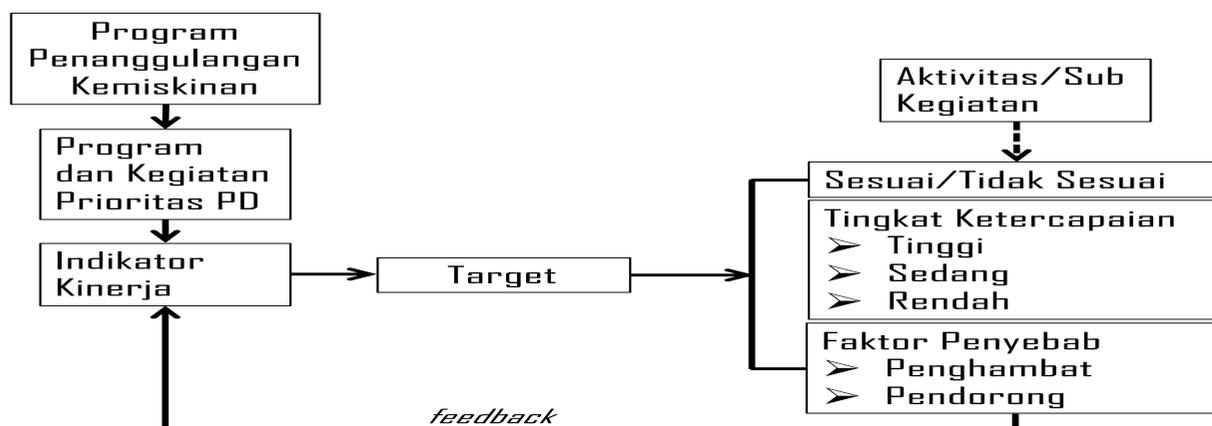
Gambar 8.2.
Alur Proses Pelaksanaan Monitoring

Monitoring capaian program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berkala dalam triwulan bersamaan dengan monitoring terhadap capaian program dan kegiatan prioritas perangkat daerah. Substansi yang dilakukan monitoring adalah indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan (*output* dan *outcome*) yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan dengan melakukan pencatatan informasi pelaksanaan kegiatan.



Gambar 8.3.
Substansi Monitoring

Sedangkan proses evaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berkala tahunan dengan membandingkan target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah yang menjadi jabaran dari program penanggulangan kemiskinan. Substansi yang dilakukan evaluasi adalah tingkat ketercapaian dari seluruh indikator kinerja program dan kegiatan, serta analisis efektivitas dan efisiensi dari program dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.



Gambar 8.4.
Substansi Evaluasi

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi:

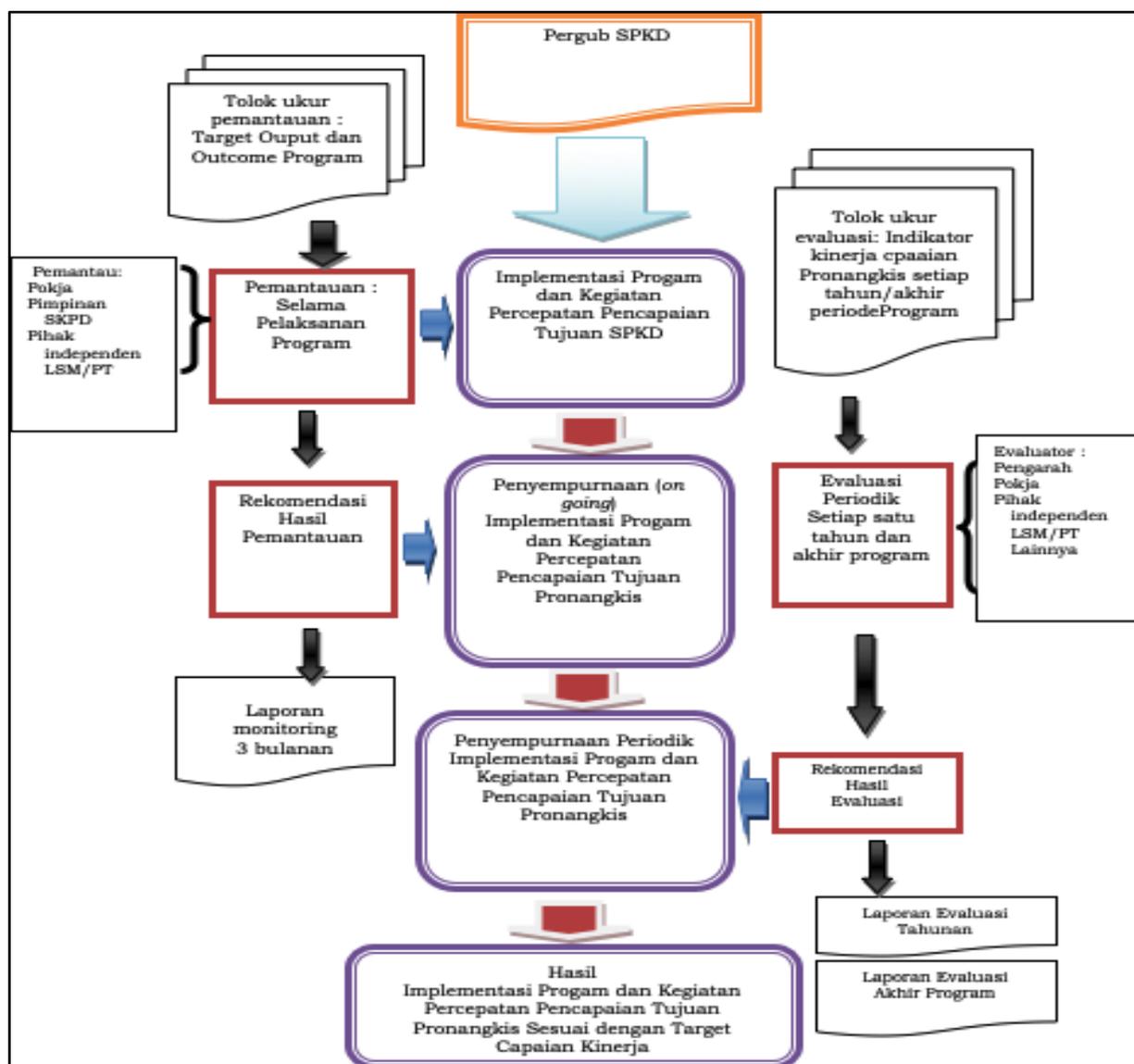
1. Obyek monitoring dan evaluasi adalah semua kebijakan dan program yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, sejak proses perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan;
2. Sarana monitoring dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan adalah seluruh sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan.

Secara umum, kegiatan monitoring dan evaluasi ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan dan program yang direncanakan dalam SPKD dapat dilaksanakan/direalisasi dalam proses perencanaan dan penganggaran?

2. Apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang direncanakan?
3. Apakah indikator kinerja program penanggulangan kemiskinan yang meliputi keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berhasil dilaksanakan? Jika berhasil faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya? dan apabila tidak berhasil, hal-hal apa saja yang menyebabkan ketidakberhasilan tersebut mengapa?
4. Apakah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan daerah perlu dilanjutkan tanpa perbaikan, dilanjutkan dengan perbaikan atau merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang berbeda?
5. Apakah hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan bahan umpan balik bagi peningkatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah untuk periode sekarang maupun yang akan datang ?

Alur lengkap monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut.



Gambar 8.5.
Alur Proses Monitoring dan Evaluasi SPKD

C. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Instrumen yang digunakan untuk monitoring adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1.
Instrumen Monitoring

No	Masalah	Program/Kegiatan Prioritas PD	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW*)	Realisasi TW*)	Target Akhir Tahun	Faktor Penyebab	Saran Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

Kolom (1) : Diisikan nomor

Kolom (2) : Diisikan uraian masalah determinan per bidang

Kolom (3) : Diisikan nomenklatur program dan kegiatan OPD yang mendukung program penanggulangan kemiskinan

Kolom (4) : Diisikan indikator kinerja program dan kegiatan OPD yang sesuai dengan RKPD dan APBD

Kolom (5) : Diisikan satuan indikator kinerja program dan kegiatan OPD

Kolom (6) : Diisikan target kinerja triwulan yang telah direncanakan di awal tahun anggaran (sesuai dengan pelaksanaan triwulan)

Kolom (7) : Diisikan realisasi kinerja triwulan

Kolom (8) : Diisikan target kinerja sampai akhir tahun perencanaan

Kolom (9) : Diisikan faktor penghambat dan/atau pendorong bagi pelaksanaan kegiatan

Kolom (10): Diisikan saran tindak lanjut (diisi oleh pelaksana monitoring)

Sedangkan instrumen evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 8.2
Instrumen Evaluasi

No	Masalah	Program/Kegiatan Prioritas PD	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun n	Realisasi Tahun n	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Ketercapaian	Faktor Penyebab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan:

Kolom (1) : Diisikan nomor

Kolom (2) : Diisikan uraian masalah determinan per bidang

Kolom (3) : Diisikan nomenklatur program dan kegiatan OPD yang mendukung program penanggulangan kemiskinan

- Kolom (4) : Diisikan indikator kinerja program dan kegiatan OPD yang sesuai dengan RKPD dan APBD
- Kolom (5) : Diisikan satuan indikator kinerja program dan kegiatan OPD
- Kolom (6) : Diisikan target kinerja tahunan yang telah direncanakan di awal tahun anggaran (sesuai dengan APBD)
- Kolom (7) : Diisikan realisasi kinerja tahunan
- Kolom (8) : Diisikan target anggaran program dan kegiatan tahunan sesuai APBD
- Kolom (9) : Diisikan realisasi anggaran program dan kegiatan tahunan
- Kolom (10): Diisikan tingkat ketercapaian indikator kinerja program dan kegiatan dengan membagi 3 kelompok ketercapaian yaitu:
- a. Tinggi, jika ketercapaiannya lebih dari sama dengan 100% ($\geq 100\%$);
 - b. Sedang, jika ketercapaiannya antara 80-99%;
 - c. Rendah, jika ketercapaiannya $< 80\%$
- Kolom (11): Diisikan faktor penghambat dan/atau pendorong bagi pelaksanaan kegiatan.

D. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pokja Pengaduan Masyarakat dalam TKPK bersama dengan OPD terkait dari setiap program kegiatan. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, monitoring dan evaluasi akan dilakukan terhadap :

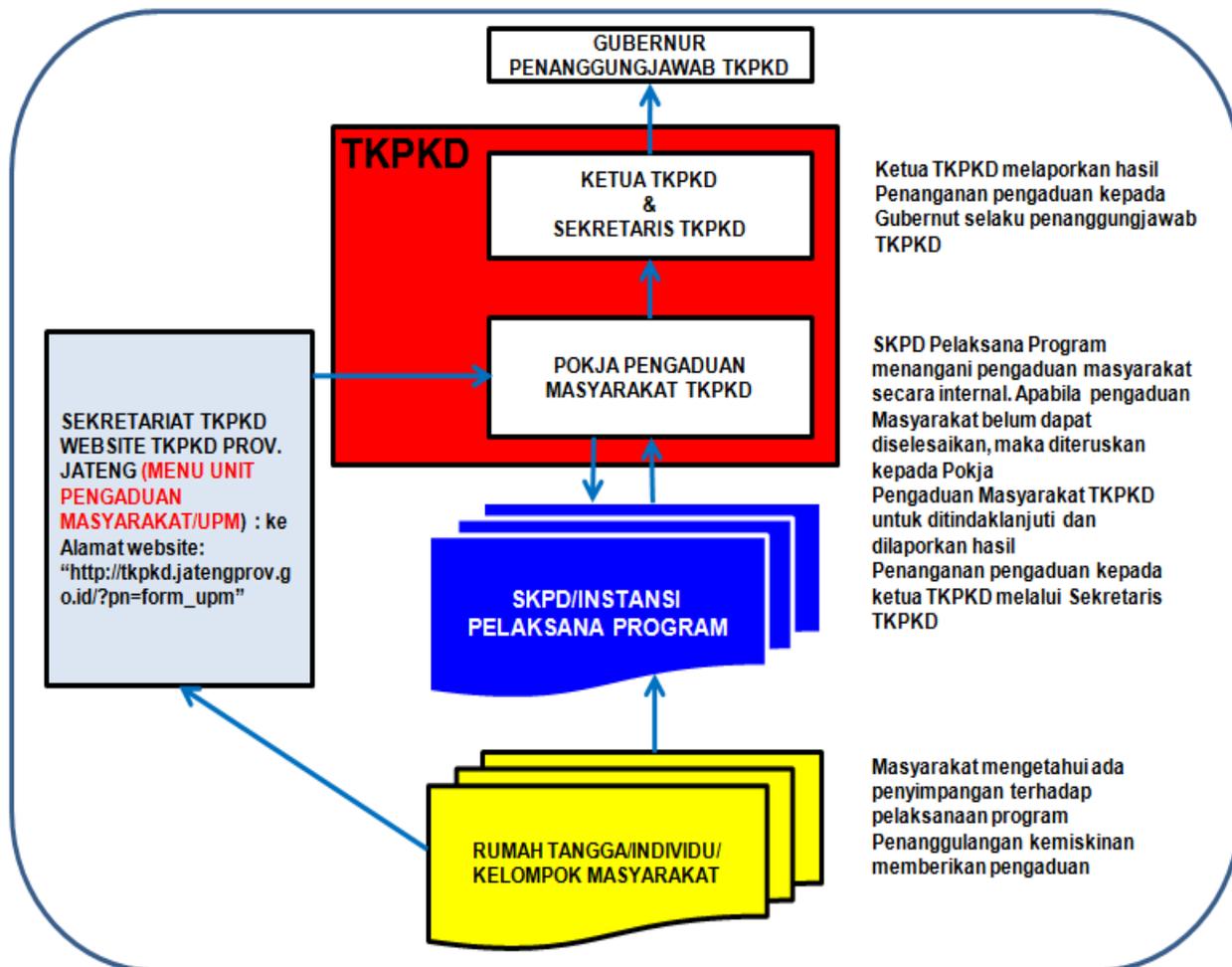
1. Monitoring terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang OPD.
2. Monitoring terhadap program-program penanggulangan kemiskinan bersasaran.
3. Evaluasi terhadap *output* program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang OPD.
4. Evaluasi terhadap capaian indikator-indikator (*outcome*) kemiskinan.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi SPKD Tahun 2019-2023, termasuk proses penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Penanggung jawab pelaporan monitoring dan evaluasi melekat pada masing-masing OPD yang berperan anggota kelompok kerja TKPK yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja SPKD dapat dilakukan secara internal OPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), dengan prinsip: obyektif, transparan, partisipatif, akuntabilitas, efisien, efektif, ketepatan waktu, ketersinambungan, serta berbasis pada indikator kinerja.

E. Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan pengaduan masyarakat adalah suatu proses kegiatan untuk menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi, mengklarifikasi memberikan solusi kepada pengadu, mendokumentasikan dan mensosialisasikan hasil pengelolaan pengaduan kepada masyarakat agar masalah yang dialami, dirasakan atau dihadapi masyarakat dapat segera dicarikan solusi terbaik bagi semua pihak. Mekanisme ini juga akan menjadi alat monitoring program secara eksternal. Mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yaitu :

1. Masyarakat (rumah tangga/individu/kelompok masyarakat) baik sebagai penerima manfaat program ataupun bukan penerima manfaat program, apabila menjumpai terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, dapat menyampaikan pengaduan kepada SKPD Pelaksana Program atau Pokja Pengaduan Masyarakat TKPKD. Selain itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui website TKPKD pada menu UPM dengan alamat "<http://tkpkd.jatengprov.go.id>" selanjutnya Sekretariat TKPKD akan menginformasikan kepada Pokja Pengaduan Masyarakat TKPKD.
2. OPD Pelaksana Program setelah menerima pengaduan dari masyarakat, selanjutnya melakukan analisis terhadap informasi dan mengupayakan solusinya secara internal.
3. Apabila OPD pelaksana program, belum dapat menyelesaikan kasus pengaduan masyarakat atas pelaksanaan program secara intern, selanjutnya materi pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada TKPKD melalui Pokja Pengaduan Masyarakat TKPKD. Pokja Pengaduan Masyarakat TKPKD selanjutnya akan menindaklanjuti dan melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Ketua TKPKD melalui sekretaris TKPKD.
4. Secara rutin/berkala Ketua TKPKD melaporkan hasil penanganan pengaduan rumah tangga/individu/kelompok masyarakat kepada Gubernur selaku Penanggungjawab TKPKD.



Gambar 8.6
Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat
Provinsi Jawa Tengah

BAB IX PENUTUP

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak, memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Langkah-langkah tersebut harus ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, serta diarahkan pula untuk peningkatan pendapatan.

Dalam rangka penurunan angka kemiskinan sesuai target RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung penanggulangan kemiskinan adalah menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen strategis kebijakan di daerah, yaitu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

Sejalan dengan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dapat dilihat bahwa SPKD seharusnya dapat mengisi, memperkaya dan memperkuat proses penyusunan, dan substansi dari setiap dokumen perencanaan dan pembangunan daerah, baik dokumen 5 tahunan yakni RPJMD dan Renstra-OPD, dan dokumen tahunan RKPD dan Renja SKPD.

Hal lain yang membuat SPKD perlu adalah karena masalah kemiskinan merupakan masalah khas lokal (*local specific*) sehingga tiap daerah memerlukan kebijakan yang berbeda, maka SPKD diperlukan untuk menjabarkan strategi dasar ke dalam konteks masalah lokal. Proses ini menjadi sangat strategis, mengingat dokumen SPKD bukanlah dokumen yang eksklusif, tetapi seharusnya inklusif. SPKD harus mengisi, memperkaya dan memperkuat proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran reguler di daerah. Hal ini sejalan dan sesuai dengan semangat otonomi daerah yang sedang berjalan menuju arah perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tt

GANJAR PRANOWO